



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KAJIAN FISKAL REGIONAL

TRIWULAN II TAHUN 2024

KANWIL DJPb PROVINSI BENGKULU

Parade pada Festival Bumi Rafflesia
dan Bengkulu InFact Fair 2019
FOTO BY DIMAS PARIWISATA PROVINSI BENGKULU

Handwritten signature
in Team



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



UNDUH KAJIAN FISKAL REGIONAL

Triwulan II Tahun 2024
Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu



UNDUH DISINI

TIM PENYUSUN

PENGARAH

BAYU ANDY PRASETYA

Kapala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu

PENYUSUN

Sunaryo

Imam Abdurrahman Mursalin

Sabar Sautomo

Puji Sigit Rakhmanto

Thedy Dwi Prasetyo

Moh. Rizal Arwan

Khofipa Oktasya

Balqis Ramadhania Putri

Imam Satriawan

Martini

AKADEMISI

Azansyah, S.E., M.Si.

Ririn Nopiah, S.E., M.Sc.

KATA PENGANTAR

Selain memberikan gambaran mengenai kondisi fiskal dan ekonomi terkini Bengkulu, dalam KFR kali ini juga mengangkat analisis tematik yang merupakan elaborasi analisis tematik yang telah dibahas dalam ALCo Regional sepanjang Triwulan II 2024, yaitu Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah untuk Memitigasi Dampaknya.

Iklim yang kolaboratif antara instansi terkait juga merupakan penentu kesuksesan dalam penyusunan KFR Triwulan II Tahun 2024 ini. Oleh karena itu, apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada, Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, Local Expert Provinsi Bengkulu, Tenaga Ahli dan semua pihak baik eksternal maupun internal yang telah membantu penyelesaian kajian ini. Semoga hubungan kemitraan yang terjalin baik selama ini dapat dijaga hingga masa yang akan datang.

Kami berharap kajian ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para pembaca, para pengamat kebijakan publik, dosen dan mahasiswa. Rekomendasi KFR ini kami harapkan juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan publik pimpinan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang. Dan demi meningkatkan kualitas kajian ini kami juga mengharapkan

masukan dan sarannya agar kajian ini dapat memberikan manfaat yang maksimal. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas-tugas kita masing-masing agar bisa bisa terus memberikan kontribusi terbaik bagi Provinsi Bengkulu, serta bangsa dan negara.

Bengkulu, 30 Agustus 2024

Bayu Andy Prasetya

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	x
Daftar Gambar	xiii
Ringkasan Eksekutif	xiv
Dashboard Makro Ekonomi-Fiskal Regional	xvi
Daftar Pustaka	xviii

BAB I ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1 Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi	3
1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.1.2 Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah) Terhadap Pembentukan PDRB	8
1.1.3 PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera	9
1.1.4 Inflasi	10
1.2 Analisis Indikator Kesejahteraan	14
1.2.1 Tingkat Kemiskinan	14
1.2.2 Tingkat Pengangguran	17
1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	19
1.2.4 Nilai Tukar Petani (NTP)	20
1.2.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	21

BAB II ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi	25
2.1.1 Pendapatan Negara	26
2.1.2 Belanja Negara	30
2.1.3 Surplus/Defisit APBN	33
2.1.4 Prognosis s.d. Triwulan IV Tahun 2024	33
2.1.5 Analisis Neraca Pemerintah Pusat – Tingkat Wilayah	34
2.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)	37
2.2.1 Pendapatan Daerah	37
2.2.2 Belanja Daerah	39
2.2.3 Surplus/Defisit APBD	40
2.2.4 Pembiayaan Daerah	41
2.2.5 Perkembangan BLU Daerah	42
2.2.6 Isu Strategi Pelaksanaan APBD	42
2.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian	43
2.3.1 Pendapatan Konsolidasian	44
2.3.2 Belanja Konsolidasian	44
2.3.3 Surplus/Defisit Konsolidasian	45
2.3.4 Pembiayaan Konsolidasian	45

DAFTAR ISI

BAB III PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

3.1	Gambaran Umum Harmonisasi Belanja KL/DAK Fisik di Tingkat Wilayah	49
3.2	Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik	49
3.2.1	Analisis Perbandingan Antar Rincian Output (RO) Harmonis	50
3.2.2	Analisis Antara RO Harmonis dengan Total Alokasi Belanja K/L Tingkat Wilayah	51
3.2.3	Analisis Alokasi Belanja K/L Per Bidang	52
3.2.4	Distribusi/Sebaran RO Harmonis Tingkat Wilayah Bidang Air Minum	53
3.2.5	Distribusi/Sebaran RO Harmonis Tingkat Wilayah Bidang Jalan	54
3.2.6	Distribusi/Sebaran RO Harmonis Tingkat Wilayah Bidang Kesehatan dan KB	55
3.2.7	Distribusi/Sebaran RO Harmonis Tingkat Wilayah Bidang Pendidikan	57
3.2.8	Distribusi/Sebaran RO Harmonis Tingkat Wilayah Bidang Pertanian	58
3.2.9	Distribusi/Sebaran RO Harmonis Tingkat Wilayah Bidang Sanitasi	59
3.3	Kendala dan Tantangan	60
3.4	Upaya Sinkronisasi d Daerah oleh Satker dan Pemda	61
3.5	Rekomendasi/Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda	62

BAB IV ANALISIS TEMATIK: PERUBAHAN IKLIM DAN UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEMITIGASI DAMPAKNYA

4.1	Pendahuluan	65
4.2	Analisis Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Kinerja Sektor Perekonomian Regional (Identifikasi Sektor Terdampak)	67
4.2.1	Fenomena Perubahan Iklim Dunia	68
4.2.2	Perkembangan Perubahan Iklim Provinsi Bengkulu	68
4.2.3	Identifikasi Sektor-Sektor Perekonomian Regional Provinsi Bengkulu yang Terdampak Perubahan Iklim	69
4.2.4	Analisis Regresi Indikator Perubahan Iklim Terhadap Produksi Unggulan Sektor Perekonomian	71
4.2.5	Hasil Focus Group Discussion Pengaruh Perubahan Cuaca terhadap Kinerja Sektor Perekonomian	71
4.3	Analisis <i>Policy Responses</i> Pemerintah dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim	73
4.3.1	Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Belanja	73
4.3.2	Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Non-Belanja	80
4.4	Evaluasi atas <i>Policy Response</i> Pemerintah dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim	81
4.4.1	Kinerja Belanja Anggaran terkait Perubahan Iklim	82
4.4.2	Pelaksanaan Program Kebijakan Non-Belanja terkait Perubahan Iklim	86
4.4.3	Analisis Rekomendasi Kebijakan Intervensi Pemerintah dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim melalui Analisis SWOT	89

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1	Kesimpulan	95
5.2	Rekomendasi	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nilai dan Laju Pertumbuhan PBDRB Menurut Komponen Pengeluaran y-on-y (Persen)	5
Tabel 1.2	Distribusi PDRB Provinsi Bengkulu Menurut Pengeluaran y-on-y (Persen)	5
Tabel 1.3	Nilai dan Laju Pertumbuhan PBDRB Menurut Lapangan Usaha y-on-y (Persen)	7
Tabel 1.4	Perbandingan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d) dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Bengkulu bulan Juni 2024 (Persen)	10
Tabel 1.5	Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Juni 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu (2022=100)	11
Tabel 1.6	Perbandingan Garis Kemiskinan Provinsi Bengkulu Maret 2022 s.d. Maret 2024	15
Tabel 1.7	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022- Maret 2024	16
Tabel 1.8	Daftar Komoditi yang Memberikan Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2024	16
Tabel 1.9	Nilai Tukar Petani Per Subsektor dan Persentasi Perubahannya, Juni 2024	21
Tabel 2.1	Laporan Realisasi APBN di Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2024 (Miliar Rupiah)	25
Tabel 2.2	Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak s.d triwulan II 2024 (Miliar Rupiah)	27
Tabel 2.3	Capaian Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai s.d triwulan II 2024 (Miliar Rupiah)	27
Tabel 2.4	Capaian Realisasi PNBPN s.d triwulan II 2024 (Miliar Rupiah)	28
Tabel 2.5	Analisis Tax Ratio APBN Wilayah Provinsi Bengkulu triwulan II Tahun 2024 (Triliun Rupiah)	28
Tabel 2.6	Realisasi Anggaran Per Fungsi s.d triwulan II Tahun 2024	31
Tabel 2.7	10 Terbesar Realisasi Anggaran Per K/L s.d triwulan II Tahun 2024	31
Tabel 2.8	Perbandingan Defisit APBN di Provinsi Bengkulu Triwulan II 2023-2024 (Miliar Rupiah)	33
Tabel 2.9	Perkiraan Realisasi APBN sampai dengan Triwulan IV 2024	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.9	Perkiraan Realisasi APBN sampai dengan Triwulan IV 2024	34
Tabel 2.10	Perbandingan Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Tahun 2022 s.d. 2023	34
Tabel 2.11	Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap dari Belanja Modal	35
Tabel 2.12	Realisasi dan Potensi PNBPN dari BMN Tahun 2022 s.d. 2023	36
Tabel 2.13	Uraian Realisasi dan Potensi PNBPN dari BMN Tahun 2022 s.d. 2023	36
Tabel 2.14	Perkembangan Realisasi PNBPN bersumber dari BMN Tahun 2022 – 2023	37
Tabel 2.15	Laporan Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2023 (Miliar Rupiah)	37
Tabel 2.16	Laporan Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2024 (Miliar Rupiah)	38
Tabel 2.17	Analisis Tax Ratio APBD Wilayah Provinsi Bengkulu triwulan II Tahun 2024 (Triliun Rupiah)	38
Tabel 2.18	Rincian Rasio Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2024 (Miliar Rupiah)	39
Tabel 2.19	Rincian Realisasi Belanja Daerah Konsolidasian Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024 (Miliar Rupiah)	40
Tabel 2.20	Rincian Data Surplus/Defisit LKPD Triwulan II Tahun 2024 dari masing Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu	41
Tabel 2.21	Rincian Data Pembiayaan Daerah LKPD Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 dari masing-masing Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu (Miliar Rupiah)	41
Tabel 2.22	LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2023 - 2024 (Miliar Rupiah)	43
Tabel 2.23	Analisis Tax Ratio Pajak Konsolidasian Provinsi Bengkulu triwulan II Tahun 2024	44
Tabel 2.24	Analisis Rasio Belanja Konsolidasian Provinsi Bengkulu triwulan II Tahun 2023	45
Tabel 3.1	Perbandingan Belanja KL RO Harmonis yang Mendukung DAK Fisik	50

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2	Alokasi Anggaran K/L Secara Umum	52
Tabel 3.3	Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik	52
Tabel 3.4	Alokasi Anggaran K/L per RO berdasarkan Bidang Air Minum	53
Tabel 3.5	Alokasi Anggaran K/L per RO berdasarkan Bidang Jalan	54
Tabel 3.6	Alokasi Anggaran K/L per RO berdasarkan Bidang Kesehatan	56
Tabel 3.7	Alokasi Anggaran K/L per RO Berdasarkan Bidang Pendidikan	57
Tabel 3.8	Alokasi Anggaran K/L per RO Berdasarkan Bidang Pertanian	58
Tabel 3.9	Capaian RO utama pada Belanja K/L per RO berdasarkan Bidang Sanitasi	60
Tabel 4.1	Pertumbuhan Volume Produksi Kelapa Sawit dan Karet Per Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2022	70
Tabel 4.2	Pertumbuhan Volume Produksi Kopi dan Padi Per Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2022	71
Tabel 4.3	Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2022	71
Tabel 4.4	Ringkasan Hasil Regresi Perubahan Iklim Terhadap Sektor Perekonomian di SUMBAGSEL Tahun 2015-2022	72
Tabel 4.5	Detail Program terkait Perubahan Iklim Belanja Pemerintah Pusat Tahun Tahun 2024	74
Tabel 4.6	Alokasi Belanja APBD Pemda Provinsi Bengkulu Terkait Perubahan Iklim Tahun 2024	78
Tabel 4.7	Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Non Belanja Tahun 2024	80
Tabel 4.8	Kinerja Belanja K/L terkait Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu Tahun 2021 s.d. 2024	83
Tabel 4.9	Kinerja Belanja K/L untuk Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu tahun 2023-per Juni 2024.	84
Tabel 4.10	Kinerja Belanja K/L untuk Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu tahun 2023-per Juni 2024.	85
Tabel 4.11	Program mitigasi perubahan iklim pemerintah daerah Provinsi Bengkulu Bengkulu berdasarkan dokumentasi publikasi website	88

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perbandingan Besaran PDRB Bengkulu Triwulan II 2024	3
Grafik 1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu 2021-2024 (y-o-y)	5
Grafik 1.3	Struktur PDRB Menurut pengeluaran (Persen)	6
Grafik 1.4	Struktur PDRB dan Pertumbuhannya Menurut Lapangan Usaha Triwulan II 2024 (y-o-y)	6
Grafik 1.5	Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)	8
Grafik 1.6	Kontribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB	8
Grafik 1.7	Tren Inflasi Provinsi Bengkulu bulan Juni 2022 s.d. Juni 2024 secara y-o-y (Persen)	10
Grafik 1.8	Komoditas Penyumbang Utama Inflasi/Deflasi Provinsi Bengkulu Triwulan II 2024 (yoy)	11
Grafik 1.9	Perkembangan Ekspor Provinsi Bengkulu 2022-2024 (Juta USD)	12
Grafik 1.10	Kontribusi Ekspor Provinsi Bengkulu Menurut Komoditas Mei 2024 dan Juni 2024 (Juta USD)	12
Grafik 1.11	Nilai Ekspor Provinsi Bengkulu Menurut Negara Tujuan Juni 2024 (Juta USD)	13
Grafik 1.12	Neraca Perdagangan Bengkulu 2022-2024 (Juta USD)	13
Grafik 1.13	Tren Kemiskinan Provinsi Bengkulu Maret 2016 s.d. Maret 2024	15
Grafik 1.14	Tren Kemiskinan Kota dan Desa Maret 2022 s.d. Maret 2024	15
Grafik 1.15	Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 – Februari 2024	17
Grafik 1.16	Proporsi Pekerja Formal dan Informal Feb 2020 s.d. Feb 2024 (Persen)	18
Grafik 1.17	TPT Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah 2020-2024 (Persen)	18
Grafik 1.18	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bengkulu Maret 2020-Maret 2024	19
Grafik 1.19	Perbandingan Perkembangan NTP Bengkulu dengan Nasional Juni 2022 – Juni 2024	21
Grafik 1.20	Perbandingan Perkembangan NTN Bengkulu dengan Nasional Juni 2022 – Juni 2024	22
Grafik 2.1	Kontribusi Pendapatan Negara Triwulan II 2024 (Miliar Rupiah)	26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.2	Komponen Pendapatan Negara Triwulan II 2024	26
Grafik 2.3	Persentase Capaian Realisasi Belanja Per Jenis Belanja s.d triwulan II 2024 Sesuai Target IKPA	30
Grafik 3.1	Pagu dan Realisasi Belanja KL RO Harmonis yang Mendukung DAK Fisik	49
Grafik 4.1	Perkembangan Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022	69
Grafik 4.2	Perkembangan Tekanan Udara dan Curah Hujan di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022	69
Grafik 4.3	Perkembangan Indeks Kualitas Air, Udara, dan Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022	69
Grafik 4.4	Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah terkait Perubahan Iklim tahun 2021 s.d. 2024	73
Grafik 4.5	Pagu dan Realisasi terkait Perubahan Iklim tahun 2021 s.d. 2024 per Kementerian/Lembaga	74
Grafik 4.6	Data alokasi dan realisasi DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Provinsi Bengkulu tahun 2023 s.d. 2024	75
Grafik 4.7	Data Alokasi dan Realisasi Dana Alokasi Fisik (DAK) Bidang Pertanian pada Provinsi Bengkulu tahun 2023 s.d. 2024	75
Grafik 4.8	Data Alokasi Dana Alokasi Fisik (DAK) Bidang Perikanan pada Provinsi Bengkulu tahun 2023 s.d. 2024	76
Grafik 4.9	Data Alokasi Dana Alokasi Fisik (DAK) Bidang Irigrasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan pada Provinsi Bengkulu tahun 2023 s.d. 2024	76
Grafik 4.10	Data Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan pada Provinsi Bengkulu tahun 2023 s.d. 2024	76
Grafik 4.11	Alokasi Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani Tahun 2021 s.d. 2024 pada Provinsi Bengkulu	76
Grafik 4.12	Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah terkait Perubahan Iklim selama tahun 2021 s.d. 2024	83
Grafik 4.13	Pagu-Realisasi Belanja K/L untuk Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu per Juni 2024	84

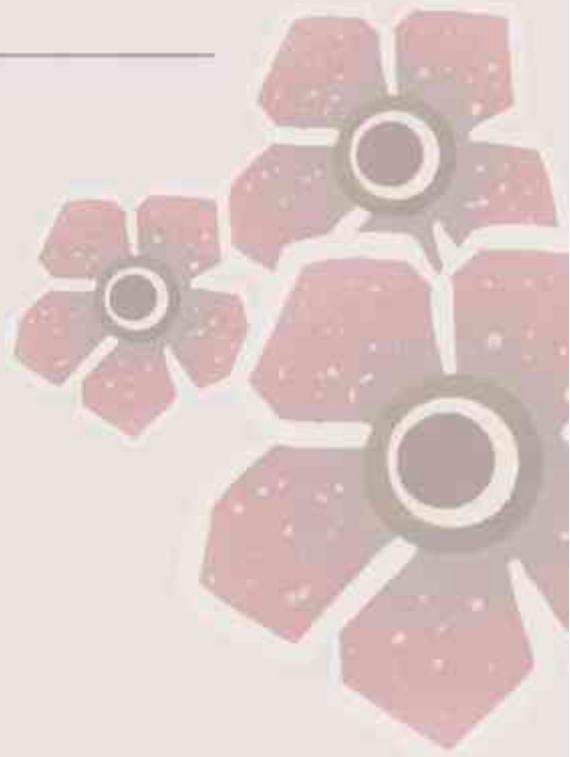
DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.14	Pagu-Realisasi Belanja K/L untuk Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu per Juni 2024	84
Grafik 4.15	Pagu-Realisasi TKD - DAK Non Fisik untuk Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2023-Per Juni 2024 di Provinsi Bengkulu	85
Grafik 4.16	Realisasi APBD Bengkulu - belanja fungsi untuk urusan Lingkungan Hidup 2022-2023	85
Grafik 4.17	Presentase kenaikan APBD Bengkulu - belanja fungsi untuk urusan Lingkungan Hidup dari tahun 2022-2023	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan II 2024 (Persen)	9
Gambar 1.2	Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera, Maret 2024	14

RINGKASAN EKSEKUTIF



01

KONDISI DAERAH & ANALISIS EKONOMI REGIONAL

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Bengkulu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 yang terdiri dari 7 tujuan, 13 sasaran pembangunan dan 30 strategi pembangunan. Adapun visi pembangunan Provinsi Bengkulu adalah **"Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa serta perekonomian kokoh"**. Arah kebijakan fiskal yang diambil harus sejalan dan berkelanjutan guna mencapai tujuan dan meningkatkan perekonomian domestik. Dalam proses pembangunan, Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai tantangan meliputi tantangan pembangunan ekonomi daerah dari sisi letak geografis, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan konektivitas wilayah.

Tantangan yang besar tidak menghalangi Provinsi Bengkulu dibuktikan dengan Pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan II tahun 2024 **tumbuh positif** sebesar 4,70 persen (y-o-y) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang mencapai 5,05 persen (y-o-y). Dibandingkan triwulan sebelumnya pertumbuhan ekonomi Bengkulu tumbuh signifikan sebesar 6,79 persen (q-to-q). Jika dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nominal, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada triwulan II tahun 2024 telah mencapai Rp26,50 triliun dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp13,91 triliun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Secara spasial PDRB Bengkulu berkontribusi sebesar 2,18 persen terhadap PDRB regional Sumatera dan 0,48 persen terhadap PDB Nasional. Menurut lapangan usaha, PDRB di Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh **Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi 30,82 persen** dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,57 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, **konsumsi rumah tangga menjadi komponen penyumbang terbesar sebesar 41 persen**.

Inflasi bulan Juni 2024 di Provinsi Bengkulu mencapai 3,64 persen (y-o-y) dan deflasi 0,04 persen (m-to-m). Angka inflasi ini secara y-o-y **lebih tinggi daripada nasional** yang sebesar 2,51 persen dan **masih di atas sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 2,5 +/- 1 persen** namun secara m-to-m lebih rendah daripada nasional yang mencapai -0,08 persen. Inflasi Bengkulu pada triwulan II tahun 2024 dipicu adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh **naiknya** indeks harga kelompok pengeluaran terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang sebesar 7,54 persen.

Pada indikator kesejahteraan, tingkat kemiskinan **masih tergolong tinggi yaitu 13,56 persen** namun **mengalami tren penurunan** baik dari sisi jumlah maupun persentase. Gini ratio sebesar 0,342 mengalami **sedikit kenaikan namun masih lebih rendah** dibandingkan nasional. Tingkat pengangguran yang **menurun dari periode sebelumnya** hingga mencapai 3,49 persen dibawah angka TPT nasional yang mencapai 4,82 persen. Nilai Tukar Petani pada triwulan II tahun 2024 mencapai 181,42 **meningkat 3,49 persen** dari bulan sebelumnya dan Nilai Tukar Nelayan mencapai 107,08 turun 0,79 persen dari bulan sebelumnya. NTP Provinsi Bengkulu **lebih tinggi** dibandingkan angka NTP nasional yang sebesar 118,77.

02 ANALISIS FISKAL REGIONAL

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bengkulu sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan capaian yang **cukup baik** meskipun masih diwarnai dengan kontraksi penerimaan. Pendapatan negara yang telah mencapai Rp1.598,30 miliar atau 47,97 persen dari target yang ditetapkan, **kontraksi** sebesar 13,1 persen dari capaian pada tahun sebelumnya. Nilai kontraksi ini **mengecil** dibandingkan triwulan I 2024. Kontraksi terjadi pada pendapatan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak. Penurunan kinerja pendapatan pajak **disebabkan oleh** menurunnya produksi sawit akibat musim trek serta menurunnya permintaan ekspor CPO, selain itu permintaan ekspor dan harga batu bara juga mengalami penurunan. Dari sisi kontribusi belanja pemerintah, kontraksi realisasi belanja modal dan DAK Fisik juga menyumbang perlambatan realisasi penerimaan pajak. Di sisi lain, belanja negara telah terealisasi hingga Rp7.545,81 miliar atau 46,69 persen dari pagu. Penyerapan belanja negara yang impresif ini juga mengalami **kenaikan** dari tahun 2023, yaitu tumbuh 14 persen **didorong oleh** pelaksanaan pemilu 2024 pada awal tahun, kenaikan gaji, pembayaran THR, dan gaji ketiga belas. Kontraksi realisasi belanja modal **disebabkan oleh** adanya blokir anggaran dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan perlambatan realisasi DAK Fisik disebabkan oleh adanya penyesuaian regulasi dan sistem sehingga penyaluran baru efektif mulai bulan Mei 2024. Sementara penurunan kinerja penyaluran Dana Insentif Fiskal dipicu oleh turunnya alokasi Dana Insentif Fiskal yang cukup signifikan pada TA 2024.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Bengkulu pada triwulan II tahun 2024 diwarnai oleh **pertumbuhan realisasi pendapatan maupun belanja**. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5.304,69 miliar atau 39,84 persen dari target serta mengalami **kenaikan** 8,78 persen dari pencapaian pada tahun sebelumnya. Sedangkan penyerapan belanja daerah terealisasi Rp4.796,23 miliar atau 34,8 persen dari target dan mengalami **kenaikan** 21,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. **Pemerintah daerah perlu** mengejar pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap APBN **melalui** intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD. Realisasi belanja daerah juga **perlu terus di dorong dari sisi penerapan** maupun proporsi yang lebih ideal alokasi belanja pegawai maupun belanja modal **sesuai amanat UU HKPD**.

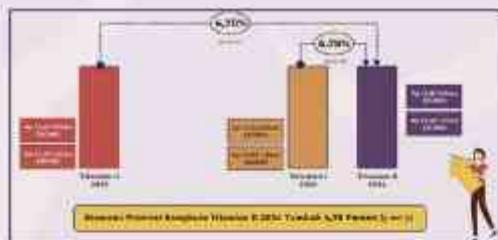
03 PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH

Dalam mengawal implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) melalui **pilar Harmonisasi Belanja antara Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah guna memperkuat desentralisasi fiskal demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat** di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transfer ke Daerah sebagai penopang utama perekonomian Provinsi Bengkulu yang **menyumbang 85,12 persen APBD**, sehingga penting untuk dilakukan potret kendala atau permasalahan yang terjadi di lapangan, dan upaya yang dilakukan oleh Pemda maupun Satker dalam sinkronisasi Belanja K/L dan DAK Fisik. Perhatian yang serius oleh pemerintah termasuk Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu yang dianalisis lebih lanjut dalam kajian ini **menghasilkan rekomendasi kebijakan** bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja K/L yang mendukung DAK Fisik.

Analisis alokasi Belanja pada setiap Bidang di Kementerian/Lembaga yang mendukung DAK Fisik antara lain: alokasi belanja Satker Kementerian PUPR senilai Rp777,59 miliar yang mendukung DAK Fisik Bidang Air Minum, Bidang Jalan, dan Bidang Sanitasi; alokasi belanja pada Satker Kemendikbudristek senilai Rp44,23 miliar yang mendukung DAK Fisik Bidang Pendidikan; alokasi belanja pada Satker Kementerian Pertanian senilai Rp4,17 miliar yang mendukung DAK Fisik Bidang Pertanian; dan alokasi belanja pada Satker Kementerian Kesehatan senilai Rp2,54 miliar yang mendukung DAK Fisik Bidang Kesehatan. **Harmonisasi belanja perlu terus dilakukan dalam rangka memastikan kolaborasi pembiayaan kegiatan yang lebih efektif dan menghindari tumpah tindih penganggaran**.

04 ANALISIS TEMATIK: Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah untuk Memitigasi Dampaknya

Perubahan iklim menjadi tantangan terbesar pada saat ini, yang mempunyai dampak tersendiri bagi suatu wilayah khususnya Provinsi Bengkulu yang berada di Indonesia sebagai negara tropis dengan komponen penggerak perekonomiannya yaitu Pertanian, Perkebunan dan Perikanan yang sangat rentan terhadap dampak negatif dari perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi akibat meningkatnya gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan terjadi untuk jangka waktu tertentu, yang disebabkan oleh siklus alam, seperti terjadinya gunung meletus, gempa bumi dan juga aktivitas manusia. **Dampak yang serius dari perubahan iklim dalam mempengaruhi pembangunan ekonomi menjadi fokus penting Pemerintah** saat ini dalam memitigasi dampaknya agar tidak mematikan kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu. **Perubahan iklim yang sulit diprediksi telah mengganggu kinerja sektor-sektor perekonomian terutama sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta sektor pariwisata**. Untuk itu, **sinergi antar unit yang memiliki fungsi terkait perubahan iklim sangat diperlukan** sehingga dapat dilakukan program yang terintegrasi dalam melakukan mitigasi dampak perubahan iklim baik yang **berupa dukungan fiskal maupun program non belanja yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat**.



PDRB TW II BENGKULU 2024

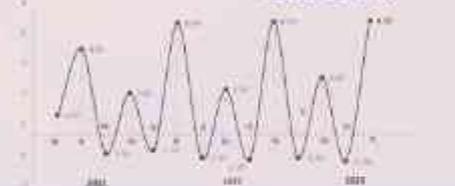
Realisasi PDRB Menurut ADHK: **26.50T**
 Realisasi PDRB Menurut ADHK: **13.90T**

PERTUMBUHAN EKONOMI BENGKULU

Y-O-Y: **4.70%**



Q-TO-Q: **6.79%**



PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB PROVINSI BENGKULU TERHADAP PULAU SUMATERA PADA TRIWULAN II-2024 (y-o-y)

Provinsi Bengkulu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Sumatera sebesar **2,18** persen dengan pertumbuhan y-o-y sebesar **4,70** persen



INFLASI (DEFLASI) BENGKULU

Y-O-Y: **3.64%**
 M-TO-M (DEFLASI): **-0.04%**



INDIKATOR KESEJAHTERAAN



TINGKAT KEMISKINAN

Pedesaan **186,69** ribu jiwa
 Perkotaan **94,67** ribu jiwa

13.56%
TURUN 0,48%

dibanding Maret 2023

Pada bulan Maret 2024, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Bengkulu mencapai 33,56 persen (281,36 ribu orang), berkurang sebesar 0,45 persen poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 34,04 persen (288,56 ribu orang).

TINGKAT KETIMPANGAN (GINI RASIO)

0.342

NAIK 0,009%

Pedesaan **23,28%**
 Perkotaan **17,90%**

Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Bengkulu yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,342. Angka ini meningkat sebesar 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,333. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi Bengkulu cenderung meningkat, namun masih tergolong rendah dalam ketimpangan rendah bila masih terjadi pemertataan ekonomi.

TINGKAT PENGANGGURAN

Jumlah Penduduk Usia Kerja Bengkulu

1.573.688 orang

Penduduk Usia Kerja (meningkat sebanyak **19.523** orang y-o-y)

3.17%

1F1 Februari 2024

TURUN 0,04%

dibandingkan Februari 2023

Jumlah angkatan kerja Provinsi Bengkulu pada Februari 2024 sebanyak 1.116.138 orang, turun 14.035 orang dibandingkan Februari 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,20 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,21 persen. Hal ini memberi arti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Provinsi Bengkulu, terdapat sekitar tiga sampai empat orang penganggur.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

74.30%

NAIK 0.62%

Pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Provinsi Bengkulu sudah berada di level "tinggi". Selama 2020-2023, IPM Provinsi Bengkulu rata-rata meningkat sebesar 0,62 persen per tahun, dari 72,93 pada tahun 2020 menjadi 74,30 pada tahun 2023.

PARTISIPASI ANGGATAN KERJA

Jumlah Penduduk Usia Kerja yang menerapkan angkatan kerja

1,116,138 orang

turun **14.035** orang dibandingkan Februari 2023.

70.92%

TURUN 1,79%
 PER FEBRUARI 2024

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Bengkulu relatif tinggi di angka 70,92%. Daya saing kualitas angkatan kerja cukup rendah sebab masih di dominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SD/SMP keawah. Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Februari 2023-Februari 2024, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/begawai.



NILAI TUKAR PETANI

181.17

NAIK 3,49%
 DIBANDING NTP BULAN SEBELUMNYA

Peningkatan NTP pada Juni 2024 disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada indeks harga hasil produk pertanian (IH), sedangkan Indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal (IB) meningkat lebih rendah.

Peningkatan yang terjadi pada NTP Juni 2024 dipengaruhi oleh peningkatan NTP yang terjadi pada tiga subsektor yaitu subsektor Hortikultura sebesar 8,24 persen; subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 3,98 persen; dan subsektor Peternakan sebesar 2,96 persen. Sementara dua subsektor yang mengalami penurunan adalah subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,89 persen dan subsektor Perikanan sebesar 0,89 persen.



NILAI TUKAR NELAYAN

107.08

TURUN 0,79%
 DIBANDING NTP BULAN SEBELUMNYA

Hal ini terjadi karena Indeks Harga yang Diterima oleh petani (IH) naik sebesar 0,25 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (IB) naik lebih tinggi sebesar 1,06 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya II pada kelompok penangkapan perairan umum dan kelompok penangkapan laut masing-masing sebesar 1,09 persen dan 0,24 persen. Kenaikan IB disebabkan oleh naiknya indeks kelompok KRT sebesar 1,29 persen dan indeks kelompok BPPEM sebesar 0,70 persen.

APBN Triwulan II Tahun 2024

REALISASI PENDAPATAN
Rp1,598.30 M
(47.97% dari target)

GROWTH
-13.10% ▼
(yoy)



PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Dalam Negeri

Rp1,156.59 M

Pajak Perdagangan Internasional

Rp0.38 M

Terealisasi: **38.7%**

TOTAL Rp1,156.96 M

PENERIMAAN PNBP

PNBP Lainnya

Rp101.39 M

PNBP SDA*

Rp217.55 M

Pendapatan BLU

Rp122.4 M

Terealisasi: **128.96%**

TOTAL Rp441.33 M

REALISASI BELANJA
Rp7,545.81 M
(46.69% dari pagu)

GROWTH
14.00% ▲
(yoy)



BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Belanja Pegawai

Rp1,118.72 M

Belanja Barang

Rp993.86 M

Belanja Modal

Rp245.28 M

Belanja Bantuan Sosial

Rp10.55 M

Terealisasi: **44.62%**

TOTAL Rp2,368.42 M

TRANSFER KE DAERAH (TKD)

Transfer Ke Daerah

Rp4,528.22 M

Dana Desa

Rp649.18 M

Terealisasi: **47.62%**

TOTAL Rp5,177.40 M

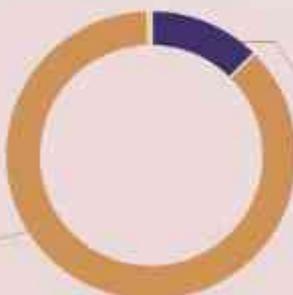
DEFISIT
Rp5,947.51 M 57.40% (yoy)

Sumber: DMS PAN (diolah)

APBD Triwulan II Tahun 2024

REALISASI PENDAPATAN
Rp5,304.69 M
(39.84% dari target)

GROWTH
31.77% ▲
(yoy)



PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pajak Daerah

Rp502.18 M

Retribusi Daerah

Rp84.41 M

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp24.01 M

Lain-Lain PAD yang Sah

Rp51.75 M

Terealisasi: **35.52%**

TOTAL Rp662.35 M

PENDAPATAN TRANSFER

Terealisasi: **40.79%**

TOTAL Rp4,623.09 M

Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah
Rp19.2 M

REALISASI BELANJA
Rp4,796.23 M
(34.80% dari pagu)

GROWTH
21.99% ▲
(yoy)



BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Rp2,480.33 M

Belanja Barang dan Jasa

Rp1,022.44 M

Terealisasi: **39.26%**

TOTAL Rp3,890.21 M

BELANJA TRANSFER

Belanja Bagi Hasil

Rp29.69 M

Belanja Bantuan Keuangan

Rp600.54 M

Total Rp630.22 M

Terealisasi: **32.19%**

BELANJA MODAL

Total Rp278.17 M

Terealisasi: **14.36%**

BELANJA TAK TERDUGA

Total Rp0.62 M

Terealisasi: **0.69%**

SURPLUS
Rp508.46 M 81.50% (yoy)

Sumber: SIKRI (diolah)

BAZAR UMKM

KEMENKEU SATU MENDUKUNG UMKM TUMBUH
DIGITALISASI DAN GLOBALISASI MENUJU INDO

7-8 JUNI 2024
TREFA CENTR BENGKULU



Foto Bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dengan
UMKM Binaan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu
Pada Acara Bazar Kemenkeu-Satu Bengkulu Semester I Tahun 2024

BAB I

ANALISIS EKONOMI REGIONAL



Bazar UMKM Kemenkeu Satu Bengkulu Tahun 2024
dengan mengusung tema "Kemenkeu Satu Mendukung UMKM
Tumbuh Melalui Digitalisasi dan Globalisasi Indonesia Maju"

Agenda Rutin Kemenkeu Satu Bengkulu dalam Rangka Pemberdayaan UMKM



Rumah pengasingan Bung Karno masih lengkap dengan koleksi sang presiden. Rumah ini tidak hanya cantik untuk foto, namun juga kaya akan sejarah kemerdekaan Indonesia.

RUMAH PENGASINGAN *Bung Karno*

01 ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1 Analisis Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

Dalam menyusun suatu kebijakan dan arah Pembangunan suatu daerah, Pemerintah membutuhkan informasi terkait perkembangan indikator ekonomi makro sebagai gambaran dinamika perekonomian yang terjadi dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Analisis terhadap Indikator ini setidaknya mampu memberikan gambaran tentang kinerja perekonomian suatu daerah serta memberikan petunjuk tren jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, indikator makro ekonomi juga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan Masyarakat secara luas sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan produk dan sumber daya.

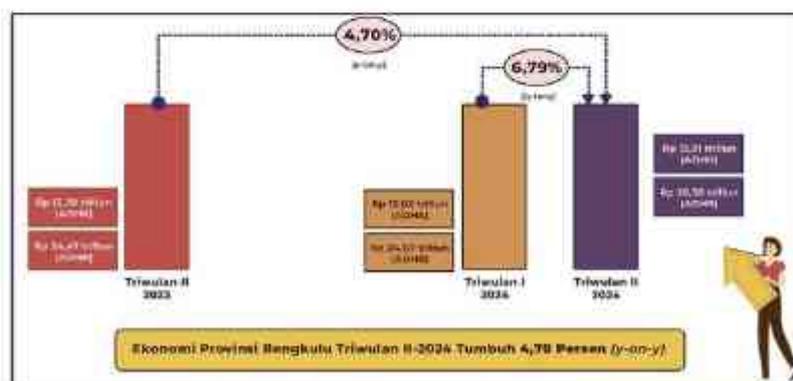
1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah dan sasaran utama pembangunan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain (Sukirno 1994:105).

1.1.1.1. Besaran PDRB Bengkulu

Perekonomian Provinsi Bengkulu berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Triwulan II 2024 mencapai Rp26,50 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp13,91 triliun. Sementara pada periode yang sama di Triwulan II 2023 (y-o-y), PDRB Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp24,47 triliun (ADHB) dan sebesar Rp13,28 triliun (ADHK).

Grafik 1.1 Perbandingan Besaran PDRB Bengkulu Triwulan II 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No.48/08/177Th. XXIII, 5 Agustus 2024

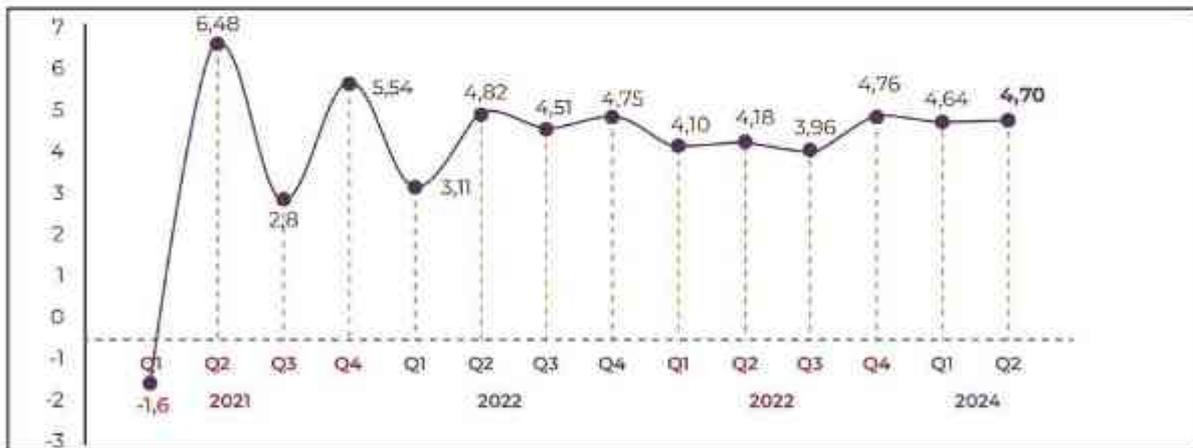
Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) triwulan II 2024 mencapai Rp5.536,5 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 Rp3.231,0 triliun. Sehingga jika dibandingkan, maka besaran PDRB Provinsi Bengkulu triwulan II 2024 hanya sebesar **0,48 persen (ADHB) dan 0,43 persen (ADHK) dari PDRB nasional.**

1.1.1.2. Pertumbuhan PDRB Bengkulu

Perekonomian global sampai dengan triwulan II 2024 masih menghadapi risiko ketidakpastian. Hal tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 yang diproyeksikan stagnan pada level 3,2 persen karena suku bunga The Fed dan European Central Bank (ECB) masih tinggi yang memberikan tekanan pada sektor keuangan global berdampak pada ketatnya likuiditas global, serta terjadinya arus capital flow (modal keluar) di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini akibat belum meredanya tensi geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina yang masih membayangi ekonomi global dan perlu diwaspadai (World Economic Outlook, IMF, April 2024). Di tengah kondisi global yang penuh tantangan, **Perekonomian Provinsi Bengkulu masih Tangguh** dengan pertumbuhan yang stabil dan laju inflasi (disinflasi global) yang melambat. Hal ini tercermin dari nilai pertumbuhan ekonomi Bengkulu yang mengalami pertumbuhan secara y-on-y, q-to-q maupun c-to-c.

Ekonomi Provinsi Bengkulu Triwulan II 2024 terhadap Triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,70 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,21 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,03 persen. Berdasarkan pendekatan q-to-q, ekonomi Provinsi Bengkulu Triwulan II 2024 terhadap triwulan sebelumnya juga mengalami pertumbuhan sebesar **6,79 persen (q-to-q)**. Dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,73 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,12 persen. Ekonomi Provinsi Bengkulu Semester I 2024 terhadap Semester I 2023 mengalami pertumbuhan sebesar **4,67 persen (c-to-c)**. Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,38 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPR) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,19 persen.

Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu 2021-2024 (y-o-y)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 48/08/17/Th. XXIII, 5 Agustus 2024 (diolah)

Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu triwulan II 2024 yang didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 30,82 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, yakni sebesar 61,18 persen. Pertumbuhan di triwulan II 2024 disebabkan oleh harga hasil pertanian lainnya seperti kopi, karet, kelapa sawit, sayuran, ternak dan hasil ternak serta hasil perikanan mengalami peningkatan, yang merupakan komoditas utama penopang perekonomian Bengkulu.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2024 yang tumbuh sebesar 5,05 persen (y-o-y) maka pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan II 2024 terpaut sebesar 0,35 persen poin di bawah pertumbuhan secara nasional.



1.1.1.3. PDRB Berdasarkan Pengeluaran

Berdasarkan pengeluaran hampir seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif pada triwulan II 2024 (y-on-y), kecuali pada komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 8,65 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen PK-LNPRT sebesar 12,03 persen; diikuti komponen PK-RT sebesar 5,16 persen; PK-P sebesar 4,41 persen; dan PMTB sebesar 1,86 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 3,39 persen.

Tabel 1.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PBDRB Menurut Komponen Pengeluaran y-on-y (Persen)

No	Komponen	Laju Pertumbuhan y-on-y (Persen)	ADHB (Miliar Rupiah)		ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	
			Triwulan I-2024	Triwulan II-2024	Triwulan I-2024	Triwulan II-2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,16	15.030,56	16.214,39	8.505,52	9.104,86
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12,03	636,97	625,81	399,04	386,47
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,41	4.119,35	4.551,05	2.332,06	2.614,60
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,86	9.134,61	9.709,36	5.456,87	5.535,00
5	Perubahan Inventori	-	-286,21	406,96	-242,02	350,63
6	Ekspor Barang dan Jasa	-8,65	8.401,78	8.514,85	4.378,09	4.404,46
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3,39	12.367,63	13.520,26	7.805,26	8.487,86
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		4,70	24.669,44	26.502,17	13.024,30	13.908,16

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No.48/06/17/Th. XXIII, 5 Agustus 2024

Pertumbuhan signifikan sebesar 12,03 persen (y-on-y) pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) didorong oleh Perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) mendukung maraknya kegiatan lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan Telah selesainya pemilu presiden dan pemilu legislatif menahan laju pertumbuhan konsumsi LNPRT. Sementara itu, pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) disebabkan oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga di seluruh komponen, utamanya Makanan dan Minuman, Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga, Kesehatan dan Pendidikan, Transportasi dan Komunikasi serta Restoran dan Hotel. Di sisi lain, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tumbuh signifikan sebagai akibat dari Tumbuhnya realisasi Belanja Barang dan jasa serta Belanja Bantuan Sosial APBN dan APBD dan Melambatnya pertumbuhan realisasi Belanja Pegawai APBN dan menurunnya realisasi Dana Desa menahan laju pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

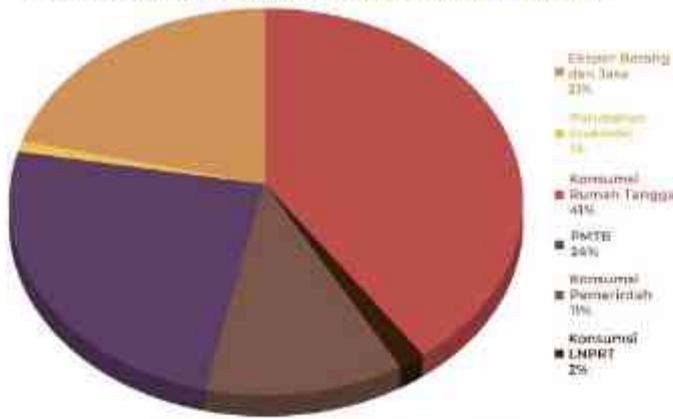
Tabel 1.2 Distribusi PDRB Provinsi Bengkulu Menurut Pengeluaran y-on-y (Persen)

Komponen	2023	2024		Pertumbuhan
	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II	
1. Konsumsi Rumah Tangga	61,06	60,93	61,18	5,16
2. Konsumsi ENPRT	2,21	2,58	2,36	12,03
3. Konsumsi Pemerintah	17,38	16,70	17,17	4,41
4. PMTB	37,51	37,03	36,64	1,86
5. Perubahan Inventori	-2,34	-1,16	1,54	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	35,41	34,06	32,13	-8,65
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	51,23	50,13	51,02	3,39
Total	100,00	100,00	100,00	4,70

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No.48/06/17/Th. XXIII, 5 Agustus 2024



Grafik 1.3 Struktur PDRB Menurut pengeluaran (Persen)



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No.48/08/17/Th. XXIII, 5 Agustus 2024 (diolah)

Struktur PDRB Bengkulu berdasarkan ADHB tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Bengkulu menurut Pengeluaran masih didominasi oleh komponen PK-RT dengan kontribusi sebesar 41 persen, diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan kontribusi sebesar 24 persen dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa dengan kontribusi sebesar 21 persen. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Sumatera, Bengkulu memiliki nilai pertumbuhan PDRB ADHB tertinggi ke 6 dari 10.

1.1.1.4. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Berdasarkan lapangan usaha, Perekonomian Provinsi Bengkulu masih **didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,82 persen**. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus (pertumbuhan negatif) 14,05 persen. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,21 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 9,01 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,95 persen.

Grafik 1.4 Struktur PDRB dan Pertumbuhannya Menurut Lapangan Usaha Triwulan II 2024 (y-o-y)

Struktur PDRB (%)		Pertumbuhan Ekonomi (%)	
30.82	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.57	
13.77	Perdagangan Besar dan Eceran	3.59	
10.37	Transportasi dan Pergudangan	3.66	
9.41	Administrasi Pemerintahan	5.85	
5.90	Jasa Pendidikan	3.22	
5.17	Industri Pengolahan	1.83	
4.66	Konstruksi	5.33	
3.93	Informasi dan Komunikasi	8.86	
3.14	Real Estate	3.89	
2.78	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.74	
2.77	Pertambangan dan Penggalian	-14.05	
2.24	Jasa Perusahaan	7.66	
2.03	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.95	
1.80	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.21	
0.93	Jasa Lainnya	9.01	
0.18	Pengadaan Air	6.14	
0.10	Pengadaan Listrik dan Gas	4.14	

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No.48/08/17/Th. XXIII, 5 Agustus 2024

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai sektor dominan di Provinsi Bengkulu tumbuh positif sebesar 6,57 persen dipengaruhi oleh Masuknya masa panen sehingga meningkatkan produksi tanaman pangan, khususnya padi; Meningkatnya harga komoditas seperti kopi dan sayuran sehingga mendorong petani meningkatkan produksinya; Adanya program penambahan kuota pupuk subsidi; dan pemberian mesin pompa air mendorong peningkatan produksi hasil pertanian dan Peningkatan permintaan hewan qurban.



Sedangkan dari sisi pertumbuhan ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha yaitu tumbuh sebesar 9,21 persen, hal ini disebabkan oleh Permintaan masyarakat terhadap jasa akomodasi dan penyediaan makan minum pada momen libur Hari Besar Keagamaan Nasional dan liburan sekolah; Penyelenggaraan berbagai event dan festival mendorong permintaan terhadap jasa akomodasi dan penyediaan makan minum; Munculnya gerai-gerai baru makanan dan minuman mendorong peningkatan aktivitas penyediaan makan minum.

Tabel 1.3 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha y-on-y (Persen)

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan y-on-y (Persen)	ADHB (Miliar Rupiah)		ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	
			Triwulan I-2024	Triwulan II-2024	Triwulan I-2024	Triwulan II-2024
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,57	7.172,11	8.168,94	3.459,13	3.768,01
B.	Pertambangan dan Penggalian	-14,05	1.251,28	733,31	470,38	346,27
C.	Industri Pengolahan	1,83	1.266,89	1.371,39	700,36	755,69
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,14	25,46	26,03	15,35	15,68
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,34	43,53	48,96	28,18	30,89
F.	Konstruksi	5,33	1.195,89	1.234,73	590,84	608,5
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,59	3.337,25	3.650,48	1.958,06	2.129,55
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,66	2.403,54	2.748,27	1.105,94	1.268,90
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,21	434,94	475,88	248,23	268,73
J.	Informasi dan Komunikasi	8,86	984,51	1.040,35	748,92	785,69
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,74	740,41	736,34	412,91	407,99
L.	Real Estat	3,59	835,14	832,83	572,73	578,17
M, N.	Jasa Perusahaan	7,66	577,18	592,6	318	324,13
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,85	2.256,18	2.492,83	1.216,52	1.333,59
P.	Jasa Pendidikan	3,22	1.422,94	1.564,91	791,79	868,38
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,95	501,73	538,1	270,64	289,03
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	9,01	220,46	246,19	116,3	128,94
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		4,70	24.669,44	26.502,17	13.024,30	13.908,16

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No.48/08/17/Th. XXIII, 5 Agustus 2024

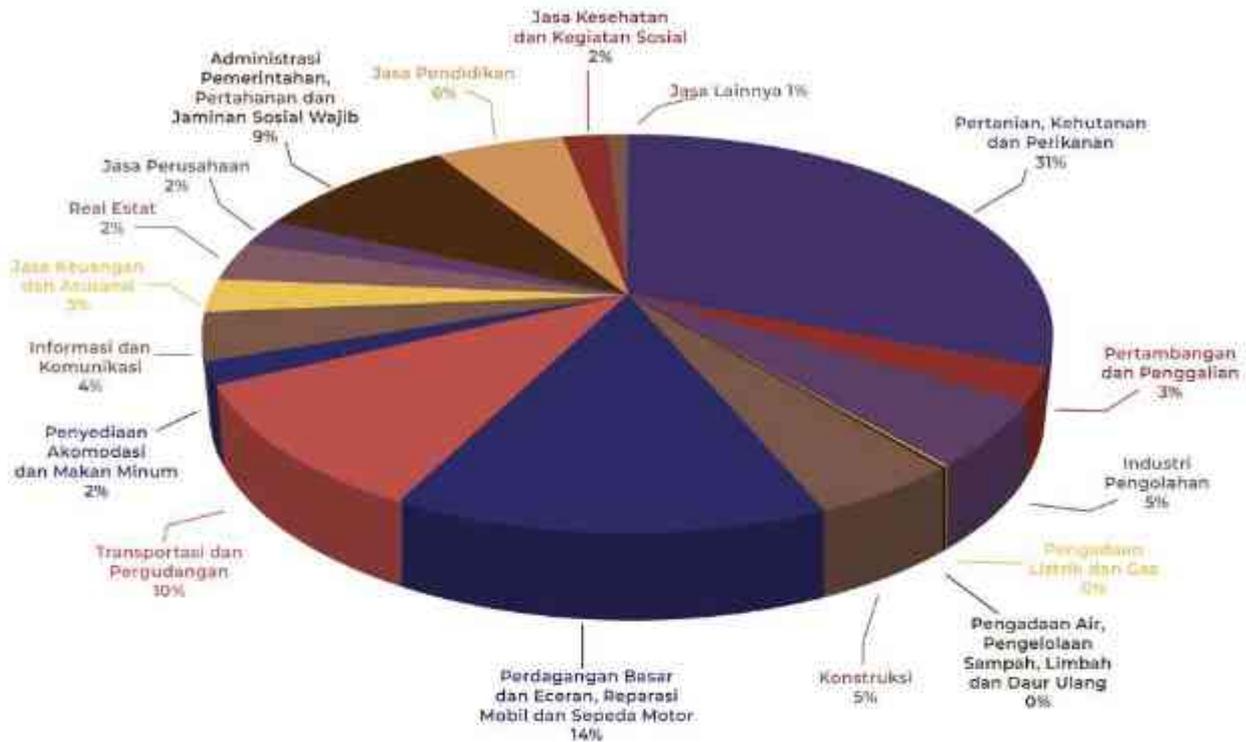
Lima lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB terbesar di Bengkulu di triwulan II 2024, meliputi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (30,82 persen), Perdagangan Besar dan Eceran (13,77 persen), Transportasi dan Pergudangan (10,37 persen), Administrasi Pemerintahan (9,41 persen) dan Jasa Pendidikan (5,90 persen). Peran kelima lapangan usaha tersebut dalam pembentukan PDRB Bengkulu mencapai 70,27 persen dari total PDRB Bengkulu.

***"Kalian tidak pernah sendirian,
kumpulkan keberanian untuk melawan."***

Sri Mulyani Indrawati



Grafik 1.5 Struktur PDRB menurut Lapangan Usaha (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No. 48/08/17/Th. XXIII, 5 Agustus 2024 (diolah)

1.1.2 Kontribusi Fiskal (Pengeluaran Pemerintah) Terhadap Pembentukan PDRB

Berdasarkan pengeluaran, Perhitungan PDRB dirumuskan dengan $Y = C+I+G+NX$. Belanja fiskal Pemerintah yang berkontribusi terhadap PDRB setidaknya berasal dari Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G) yang diproyeksikan oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) dan belanja investasi (I) yang diproyeksikan oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Grafik 1.6 Kontribusi Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No.48/08/17/Th. XXIII, 5 Agustus 2024 (diolah)



Berdasarkan pendekatan di atas, belanja pemerintah di Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2024 berkontribusi terhadap pembentukan PDRB (ADHB) paling sedikit sebesar Rp14.260,41 miliar yang berasal dari penjumlahan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (P-KP) sebesar Rp4.551,05 miliar dan pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp9.709,36 miliar.

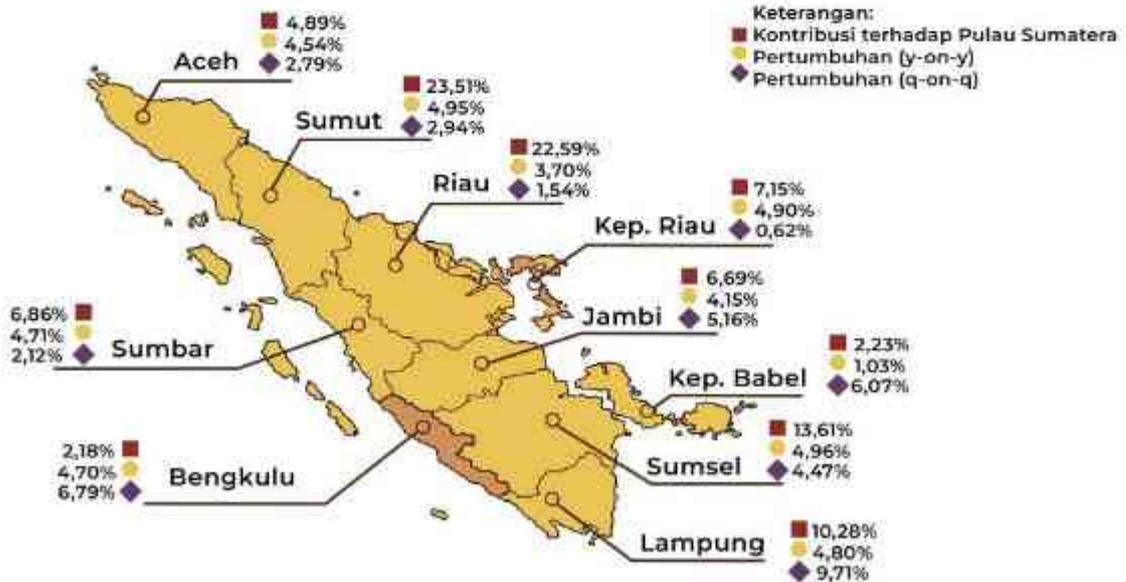
Jika dibandingkan triwulan II 2024 dengan triwulan II 2023 (y-on-y), kontribusi pemerintah pada kedua komponen pengeluaran Pemerintah mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,87 persen dan 0,21 persen. Dari dua komponen kontribusi pengeluaran Pemerintah dalam pembentukan PDRB Bengkulu di triwulan II 2024, komponen PMTB memiliki kontribusi lebih besar daripada komponen P-KP. Hal ini didorong oleh Masih berlanjutnya proyek konstruksi kontrak tahun jamak (multiyears) seperti pembangunan jalan Trans Enggano serta perbaikan jalan dan jembatan di berbagai wilayah kabupaten/kota dan Menurunnya penjualan kendaraan baru jenis pick up dan light truk menahan laju pertumbuhan PMTB.

Pengeluaran konsumsi pemerintah (P-KP) di atas meliputi belanja pegawai ditambah belanja penyusutan sebesar 20 persen dari belanja modal, belanja barang dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja konsumsi rumah tangga berasal dari belanja pemerintah total sampai dengan periode akhir triwulan II 2024 dikurangi belanja P-KP dan belanja modal pemerintah pembentuk PMTB. Sementara PMTB merupakan realisasi belanja pemerintah untuk belanja modal.

1.1.3 PDRB Provinsi-Provinsi Di Pulau Sumatera

Secara spasial, struktur perekonomian di Pulau Sumatera pada Triwulan II 2024 didominasi oleh provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 23,51 persen; diikuti Provinsi Riau sebesar 22,59 persen; dan Sumatera Selatan sebesar 13,61 persen. Sementara itu, Provinsi Bengkulu hanya memiliki kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 2,18 persen (terendah se-Sumatera).

Gambar 1.1 Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan II 2024 (Persen)



Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu No.48/018/17/Th. XXIII, 5 Agustus 2024

Ekonomi di Pulau Sumatera pada Triwulan II 2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,70 persen. Secara spasial, Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan (y-on-y) tertinggi di Pulau Sumatera, yakni sebesar 4,96 persen. Sementara itu, Provinsi Bengkulu menempati posisi ke 6 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dengan pertumbuhan (y-on-y) sebesar 4,70 persen.

1.1.4 Inflasi

Pada bulan Juni 2024, tingkat inflasi Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun (y-o-y) sebesar 3,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 106,72. Diwakili oleh tingkat inflasi y-on-y Kota Bengkulu sebesar 3,28 persen dengan IHK sebesar 106,62, dan di Kabupaten Mukomuko sebesar 4,79 persen dengan IHK sebesar 107,04.

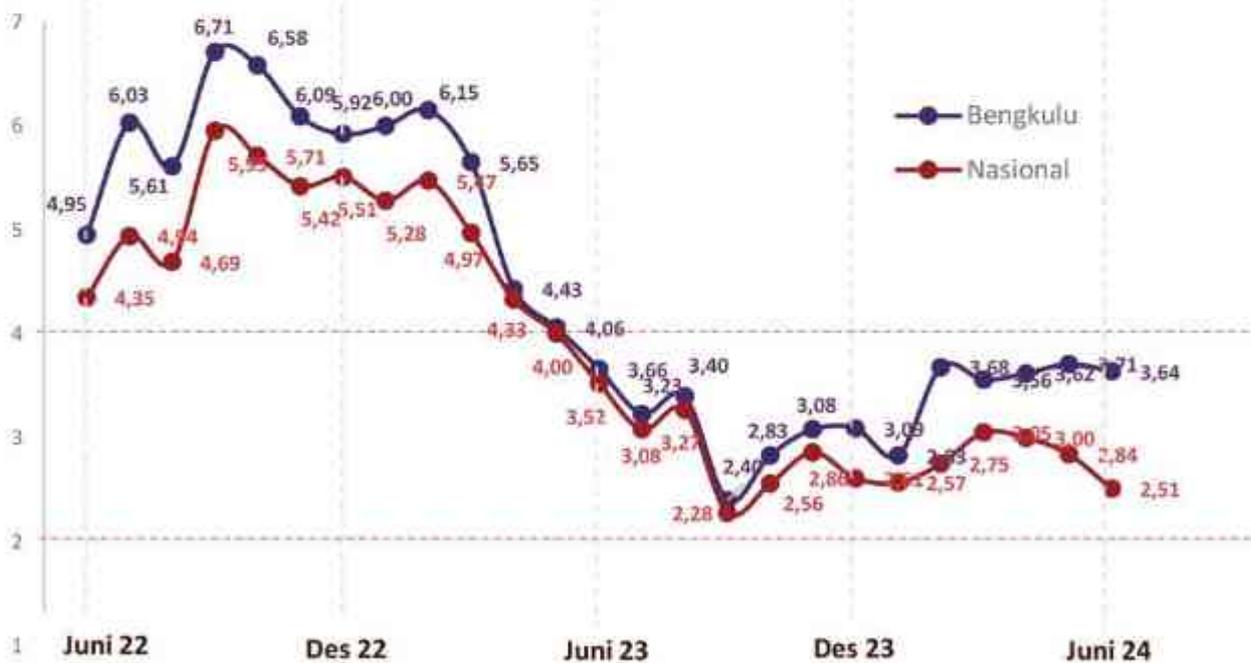
Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional di bulan Juni 2024 yang berkisar pada angka -0,08 persen (mtrm) dan sebesar 2,51 persen (yoy), maka inflasi Provinsi Bengkulu berada lebih tinggi dibandingkan nasional baik secara yoy maupun secara mtrm. Namun lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Bengkulu pada Juni 2023 yang sebesar 3,71 persen. Jika dibandingkan secara regional, inflasi Bengkulu pada Juni 2024 menjadi tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Secara *month to month* (m-to-m), pada bulan Juni 2024 Provinsi Bengkulu mengalami deflasi sebesar 0,04 persen dan tingkat inflasi *year to date* (y-to-d) Juni 2024 sebesar 1,56 persen.

Tabel 1.4 Perbandingan Tingkat Inflasi *Month to Month* (m-to-m), *Year to Date* (y-to-d) dan *Year on Year* (y-on-y) Provinsi Bengkulu bulan Juni 2024 (Persen)

Tingkat Inflasi	Triwulan II 2024
(1)	(2)
<i>Month to Month</i> (m-to-m)	-0,04
<i>Year to Date</i> (y-to-d)	1,56
<i>Year on Year</i> (y-on-y)	3,64

Sumber : Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/177/Th. XXVI, 1 Juli 2024.

Grafik 1.7 Tren Inflasi Provinsi Bengkulu bulan Juni 2022 s.d. Juni 2024 secara y-o-y (Persen)



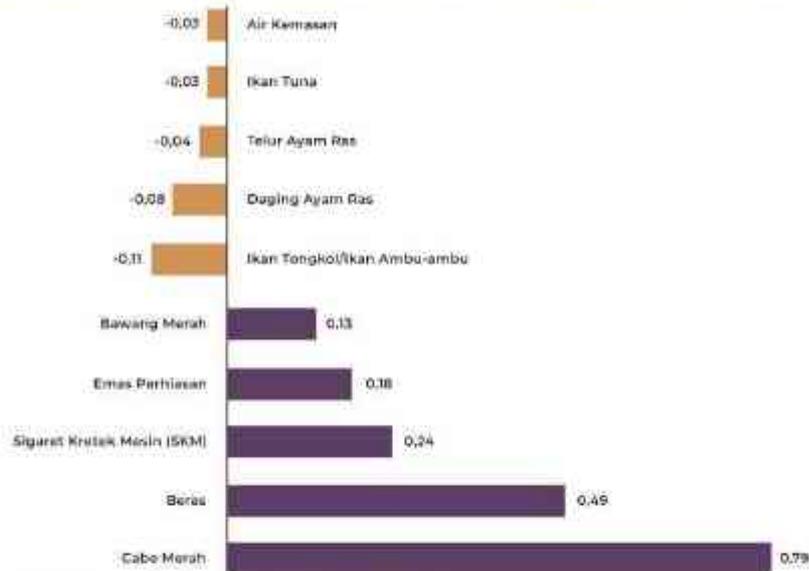
Sumber : Berita Resmi Statistik Nomor 45/08/177/Th. XI, 1 Agustus 2024 (diolah)

Inflasi di Provinsi Bengkulu bulan Juni 2024 disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada sebagian kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,54 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,90 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,31 persen; kelompok transportasi



sebesar 2,76 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,46 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,44 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,98 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,09 persen.

Grafik 1.8 **Komoditas Penyumbang Utama Inflasi/Deflasi Provinsi Bengkulu Triwulan II 2024 (yoy)**



Sumber : Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 13 Juli 2024 (diolah)

Pada awal tahun 2024, terdapat penambahan 1 (satu) wilayah baru dalam perhitungan IHK di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Mukomuko yang menyumbang inflasi y-on-y sebesar 3,80 dengan IHK sebesar 106,49. Inflasi y-on-y di Kota Bengkulu sebesar 3,48 persen dengan IHK sebesar 106,24, dan inflasi y-on-y di Kabupaten Muko Muko sebesar 3,80 dengan IHK sebesar 106,49.

Tabel 1.5 **Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Juni 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu (2022=100)**

K O T A		Juni 2024		
		IHK	Inflasi y-on-y (%)	Inflasi m-to-m (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
Kabupaten Muko Muko		107,04	4,79	0,08
Kota Bengkulu		106,62	3,28	-0,07
PROVINSI		106,72	3,64	-0,04

Sumber : Berita Resmi Statistik, Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024

Keterangan:

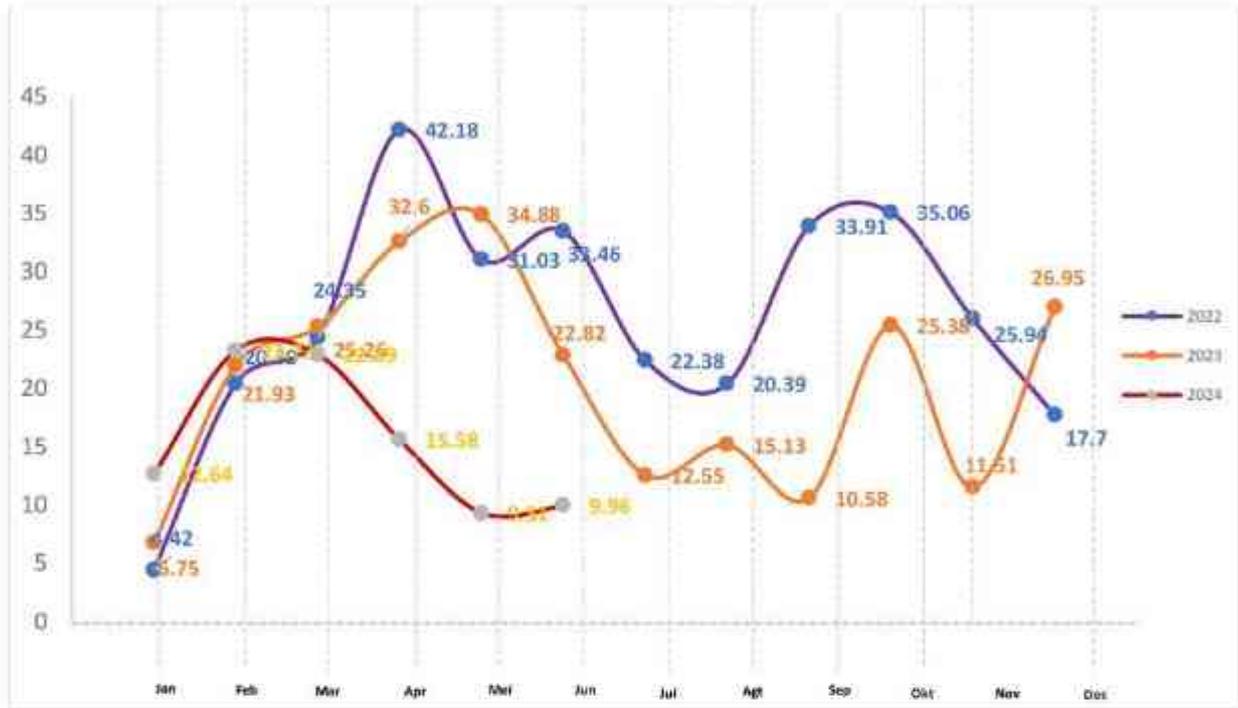
- 1) Sampel baru SBH2022, redaksi angka IHK dan inflasinya menggunakan nama kabupaten dari masing-masing wilayah.
- 2) Sampel lanjutan dari SBH2018, redaksi angka IHK dan inflasinya menggunakan nama kota dari masing-masing wilayah.

Salah satu upaya dalam menekan laju inflasi di Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan beberapa Langkah strategis dalam mengendalikan inflasi, diantaranya adalah pembukaan 10 hektar lahan padi baru di enggano, dan beberapa lokasi lainnya; persiapan perubahan musim tanam/musim hujan dengan kegiatan pompanisasi; pembuatan kajian dan penelitian oleh BMKG mengenai klaster iklim/cuaca per daerah di Bengkulu, sehingga didapati potensi tanam pada masing-masing daerah; dibuatnya kebijakan baru sebagai respon terhadap isu pengolahan gabah diluar Provinsi Bengkulu sehingga Gabah yang dihasilkan di Provinsi Bengkulu tidak boleh lagi diolah keluar Provinsi Bengkulu, yaitu dengan pembukaan pusat pengolahan Gabah kerja sama dengan swasta di Muko-Muko dan Kaur; dan Pelaksanaan kegiatan pasar murah keliling disetiap kelurahan di Kota Bengkulu, dengan mengarahkan kepada seluruh pemda kab/kota untuk melakukan hal yang sama.

1.1.5 Neraca Perdagangan, Ekspor dan Impor

Nilai ekspor Bengkulu pada bulan Juni 2024 mencapai USD 9,96 juta (mtm) atau naik sebesar 6,97 persen dibandingkan Mei 2024 yang sebesar USD 9,31 juta, dan turun signifikan sebesar 56,37 persen (y-on-y) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar USD 22,82 juta.

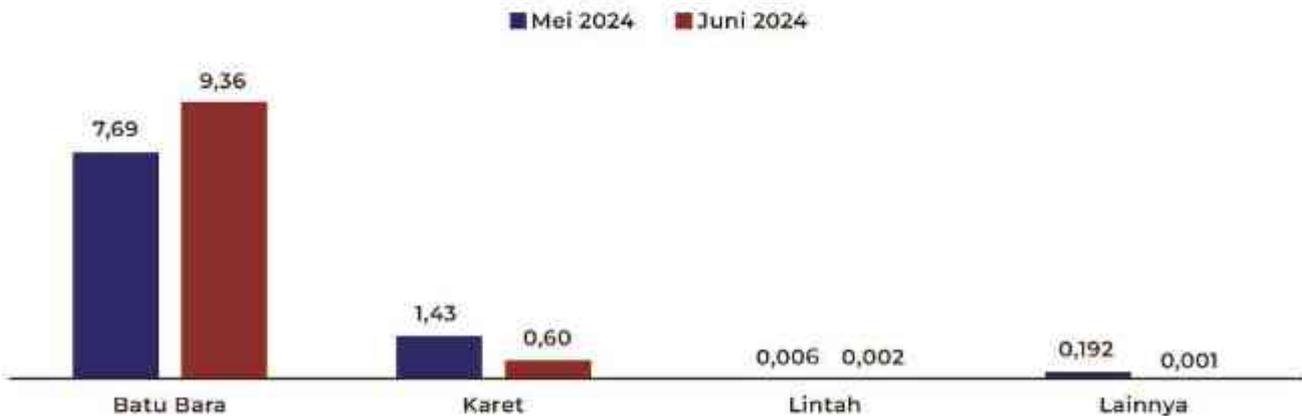
Grafik 1.9 Perkembangan Ekspor Provinsi Bengkulu 2022-2024 (Juta USD)



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 45/08/17/Th. XI, 1 Agustus 2024 (diolah)

Peningkatan ekspor dibandingkan bulan Mei 2024 (mtm) dipengaruhi oleh kenaikan ekspor nonmigas berupa batu bara hingga mencapai 21,73 persen melalui Pelabuhan Pulau Baai mengalami kenaikan sebesar 17,17 persen dan melalui pelabuhan Bengkulu naik sebesar 63,55 persen. Komoditas yang diekspor Provinsi Bengkulu pada bulan Juni 2024 yaitu batubara sebesar USD 9,36 juta (93,95 persen), karet sebesar USD 0,60 juta (6,02 persen), lintah sebesar USD 1,78 ribu (0,02 persen), dan komoditas lainnya sebesar USD 1,36 ribu (0,01 persen).

Grafik 1.10 Kontribusi Ekspor Provinsi Bengkulu Menurut Komoditas Mei 2024 dan Juni 2024 (Juta USD)

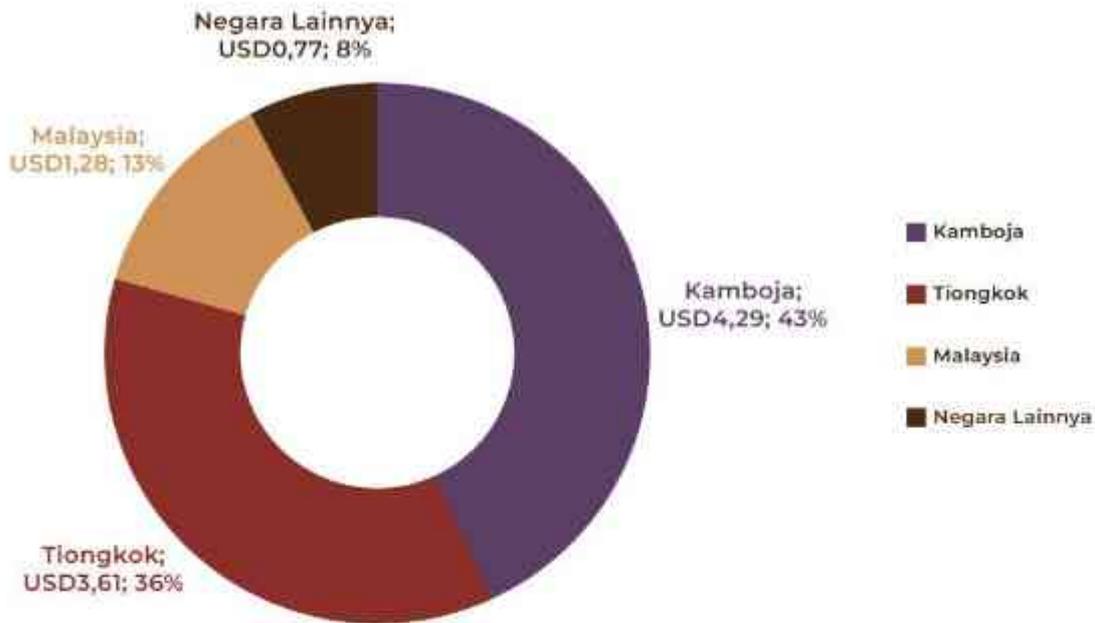


Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 45/08/17/Th. XI, 1 Agustus 2024 (diolah)



Kamboja, Tiongkok, Malaysia, Jepang dan India merupakan lima negara tujuan utama ekspor nonmigas pada Juni 2024 dengan nilai ekspor masing-masing mencapai USD 4,29 juta (43,13 persen), USD 3,61 juta (36,30 persen), USD 1,28 juta (12,83 persen), USD 0,60 juta dan USD 0,17 juta (77,74 persen).

Grafik 1.11 Nilai Ekspor Provinsi Bengkulu Menurut Negara Tujuan Juni 2024 (Juta USD)



Sumber : Berita Resmi Statistik Nomor 45/08/17/Th. XI, 1 Agustus 2024 (diolah)

Berbeda dengan ekspor, tidak tercatat nilai impor barang ke Provinsi Bengkulu sejak bulan September 2021 hingga Juni 2024.

Neraca perdagangan Provinsi Bengkulu bulan Juni 2024 mengalami surplus sebesar US\$ 9,96 juta. Sementara neraca perdagangan Provinsi Bengkulu bulan Juni 2023 mengalami surplus sebesar USD 22,82 juta. Nilai tersebut dipengaruhi oleh surplus komoditi nonmigas batu bara, karet, lintah dan lainnya sebesar USD 9,96 juta, dan tidak ada komoditi migas.

Secara kumulatif nilai perdagangan Bengkulu Selama bulan Juni 2022 - Juni 2024, neraca perdagangan tertinggi terjadi pada bulan April 2022 yaitu surplus sebesar USD 42,18 juta. Selanjutnya bulan Oktober 2022 yang tercatat surplus USD 35,06 juta dan bulan Mei 2023 yang tercatat surplus USD 34,88 juta. Sedangkan neraca perdagangan terendah terjadi pada bulan Januari 2022 yang tercatat mengalami surplus mencapai USD 4,42 juta.

Grafik 1.12 Neraca Perdagangan Bengkulu 2022-2024 (Juta USD)



Sumber : Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024

1.2 Analisis Indikator Kesejahteraan/Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan Masyarakat mencakup perubahan struktur, sikap hidup, dan kelembagaan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara. Dalam mengukur keberhasilan dan menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan Pembangunan suatu daerah, diperlukan indikator sebagai parameter seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat ketimpangan pendapatan (gini ratio), nilai tukar petani (NTP), dan nilai tukar nelayan (NTN). Kondisi kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bengkulu sepanjang triwulan II tahun 2024 terus mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan periode periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Angka Kemiskinan Bengkulu pada Maret 2024 turun menjadi 13,56 persen yang sebelumnya berada di angka 14,04%, mengalami penurunan 4,64 persen (y-o-y) namun masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,03% dan termasuk 18 provinsi di bawah nasional. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Bengkulu mencapai 13,56 persen (281,36 ribu orang), berkurang sebesar 0,48 persen poin atau turun sebesar 7,10 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 14,04 persen (288,46 ribu orang).

Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera, Maret 2024



Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/III/Th. XXVI, 1 Juli 2024

Secara umum tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mengalami tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, namun persentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu pada Maret 2023 masih menjadi tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Tingkat kemiskinan pada periode Maret 2023 ini dipicu oleh peranan komoditi makanan dibandingkan komoditi bukan makanan, Pada maret 2024, komoditi makanan menyumbang sebesar 73,46 persen terhadap garis kemiskinan sedangkan komoditi bukan makanan menyumbang 26,54 persen.

Tabel 1.6 Perbandingan Garis Kemiskinan Provinsi Bengkulu Maret 2022 s.d. Maret 2024

Periode	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)			Sumbangan Garis Kemiskinan (%)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total
Maret 2022	435.393	155.362	590.755	73,70	26,30	100,00
Maret 2023	466.693	170.449	637.142	73,25	26,75	100,00
Maret 2024	492.988	178.107	671.095	73,46	26,54	100,00
Perubahan Mar'22-Mar'23	7,19%	9,71%	7,85%			
Perubahan Mar'23-Mar'24	5,63%	4,49%	5,33%			

Sumber : Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada Maret 2024 mencapai 281,36 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebesar 13,56 persen, menurun 0,48 persen poin terhadap Maret 2023.

Grafik 1.13 Tren Kemiskinan Provinsi Bengkulu Maret 2016 s.d. Maret 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022 - Maret 2024, jumlah kemiskinan di daerah perkotaan dan desa berkurang secara signifikan. Pada Maret 2024 kemiskinan Kota turun menjadi 13,56 persen yang sebelumnya berada diangka 14,21 persen. Sementara itu, kemiskinan Kota juga turun menjadi 13,56 persen yang sebelumnya berada diangka menjadi 13,96 persen.

Grafik 1.14 Tren Kemiskinan Kota dan Desa Maret 2022 s.d. Maret 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024

Jumlah penduduk miskin berdasarkan daerah tempat tinggal baik daerah perkotaan maupun pedesaan masing-masing mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya Maret 2023 - Maret 2024, berkurang sebesar 3 ribu orang (perkotaan) dan 4,1 ribu orang (pedesaan). Tidak hanya itu ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga mengalami penurunan. Kondisi ini terlihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada Maret 2023 hingga Maret 2024, P1 yang mengindikasikan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, turun sebesar 0,028 poin dari 2,138 menjadi 2,110. Terjadi hal yang sama pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menunjukkan variasi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin, turun sebesar 0,028 poin; dari 0,517 pada Maret 2023 menjadi 0,489 pada Maret 2024.

Tabel 1.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022- Maret 2024

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2022	100,69	14,88
Maret 2023	97,66	14,21
Maret 2024	94,67	13,56
Pedesaan		
Maret 2022	196,54	14,49
Maret 2023	190,80	13,96
Maret 2024	186,69	13,56
Total		
Maret 2022	297,23	14,62
Maret 2023	288,46	14,04
Maret 2024	281,36	13,56

Sumber: Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/177/Th. XXVI, 1 Juli 2024

Garis Kemiskinan Bengkulu pada Maret 2024 adalah sebesar Rp 671.095, - per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,33 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2022 dan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 7,85 persen. Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Beras masih menjadi komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, baik diperkotaan maupun di pedesaan. Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan adalah perumahan, bensin, Listrik, Pendidikan, perlengkapan mandi dan pakaian jadi Perempuan dewasa.

Tabel 1.8 Daftar Komoditi yang Memberikan Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2024

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:	74,22	Makanan:	73,13
Beras	20,24	Beras	25,26
Rokok kretek filter	12,28	Rokok kretek filter	10,68
Cabe merah	5,70	Cabe merah	5,08
Daging ayam ras	4,54	Tongkol/tuna/cakalang	3,10
Tongkol/tuna/cakalang	4,09	Daging ayam ras	3,08
Telur ayam ras	4,03	Telur ayam ras	2,94
Mie instan	2,78	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,41
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,13	Cabe rawit	2,25
Bawang merah	1,60	Gula pasir	1,92
Gula pasir	1,55	Mie instan Bawang merah	1,74
Cabe rawit	1,49	Bawang merah	1,54

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
Tempe	1,39	Tempe	1,25
lainnya	12,40	lainnya	11,88
Bukan Makanan:	25,78	Bukan Makanan:	26,87
Perumahan	7,56	Perumahan	9,09
Bensin	4,39	Bensin	4,74
Listrik	2,71	Listrik	2,28
Pendidikan	2,51	Pendidikan	1,42
Perlengkapan mandi	1,00	Perlengkapan mandi	1,17
Kesehatan	0,95	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,79
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,81	Sabun cuci	0,76
Lainnya	5,85	Lainnya	6,62

Sumber : Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Bengkulu pada Maret 2024 antara lain adalah Ekonomi Provinsi Bengkulu Triwulan I 2024 terhadap Triwulan I 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,64 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,14 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,78 persen; Perekonomian Provinsi Bengkulu berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan I 2024 mencapai Rp 24,67 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 13,02 triliun; Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 3,17 persen, turun 0,04 persen poin dibandingkan Februari 2023; Sebanyak 697.181 orang (64,51 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun sebesar 5,47 persen poin dibandingkan Februari 2023; NTP Provinsi Bengkulu Maret 2024 sebesar 168,42 atau naik 3,35 persen dibanding NTP Februari 2024; dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Bengkulu Maret 2024 sebesar 167,66 atau naik 4,25 persen dibanding NTUP Februari 2024.

1.2.2 Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,17 persen turun 0,04 persen poin dibandingkan Februari 2023.

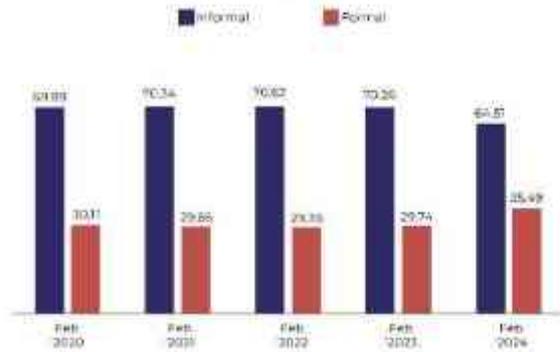
Pengangguran ialah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Jumlah penduduk usia kerja di Bengkulu pada Februari 2024 mencapai 1.573.688 orang, terdiri dari angkatan kerja sejumlah 1.116.138 orang dan sisanya sebanyak 457.550 orang merupakan bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja tersebut terdiri dari 1.080.744 orang yang bekerja dan 35.394 orang merupakan pengangguran. Jika dibandingkan dengan Februari 2023, jumlah penduduk yang bekerja naik 692 ribu orang sedangkan pengangguran turun sebanyak 217 ribu orang.

Grafik 1.15 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 – Februari 2024



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu. Berita Resmi Statistik Nomor No. 29/05/17/Th. XVI, 6 Mei 2024

Grafik 1.16 Proporsi Pekerja Formal dan Informal Feb 2020 s.d. Feb 2024 (Persen)



Number : BPS Provinsi Bengkulu, Berita Resmi Statistik Nomor No. 29/05/17/Th. XVI, 6 Mei 2024

Jumlah angkatan kerja Provinsi Bengkulu pada Februari 2024 sebanyak 1.116.138 orang, turun 14.035 orang dibandingkan Februari 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 1,80 persen poin. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki di Bengkulu adalah sebesar 86,04 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang hanya sebesar 55,15 persen. Komposisi penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama dikelompokkan menjadi kegiatan formal dan informal. Pada Februari 2024, penduduk yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 383.563 orang (35,49

persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 697.181 orang (64,51 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Februari 2024 turun sebesar 5,75 persen poin dibandingkan Februari 2023.

Dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.573.688 orang terdapat jumlah pengangguran sebanyak 35.394 orang, mengalami penurunan pengangguran sebanyak 926 orang dibandingkan Februari 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan tenaga kerja tertinggi dibandingkan Februari 2023 adalah Sektor Pendidikan, Pertanian dan Jasa Perusahaan yaitu masing-masing sekitar 16.313 orang, 14.338 orang, dan 8.214 orang. Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar, yaitu Sektor Perdagangan berkurang sebanyak 36.459 orang dibandingkan Februari 2023. Jumlah pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu meningkat sebanyak 7.503 orang dan 13.804 orang, sedangkan pekerja penuh mengalami penurunan jumlah sebesar 34.416 orang dibandingkan Februari 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,17 persen. Hal ini memberi arti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Provinsi Bengkulu, terdapat sekitar tiga sampai empat orang penganggur.

Grafik 1.17 TPT Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah 2020-2024 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Berita Resmi Statistik Nomor No. 29/05/17/Th. XVI, 6 Mei 2024 (diolah)

Pada Februari 2024 TPT perempuan adalah sebesar 3,18 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan TPT laki-laki dengan jumlah 3,17 persen. TPT laki-laki mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2023 sebesar 0,17 persen poin, sedangkan TPT Perempuan mengalami penurunan sebesar 0,35 persen poin. Sementara itu TPT di wilayah perkotaan tercatat sebesar 3,48 persen cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan yang sebesar 3,01 persen. Dari TPT Februari 2024, tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,36 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Perguruan Tinggi, yaitu sebesar 1,48 persen.



Menanggapi kondisi ini, perlu dilakukan lebih lanjut mengenai kurikulum atau jurusan SMK agar lulusannya memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan permintaan industri atau lapangan kerja saat ini. Beberapa upaya pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam menurunkan angka pengangguran, yaitu memperluas kesempatan kerja diantaranya melalui menurunkan angka pengangguran, yaitu memperluas kesempatan kerja diantaranya melalui peningkatan konektivitas untuk memperlancar jalur distribusi dan perdagangan, diantaranya lanjutan pembangunan jalan tol Bengkulu – Lubuk Linggau, peningkatan fungsi pelabuhan, dan penguatan akses jalur udara; pemenuhan sarana dan prasarana produksi untuk petani, peternak dan nelayan, serta penguatan UMKM; dan penguatan perekonomian daerah, terutama dengan menjadikan pelabuhan Pulau baai sebagai kawasan industri yang kedepannya akan dipersiapkan sebagai kawasan ekonomi khusus.

1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Gini rasio penduduk Provinsi Bengkulu pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,342. Angka ini meningkat sebesar 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2023 yang sebesar 0,333. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi Bengkulu cenderung meningkat, namun masih tergolong kedalam ketimpangan rendah atau terjadi pemerataan ekonomi. Nilai gini ratio berada antara 0 s.d. 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan ekonomi atau terjadi pemerataan ekonomi pada daerah tersebut. Sedangkan nilai 1 menunjukkan adanya nilai kesenjangan ekonomi yang maksimal. Kategori ketimpangan berdasarkan nilai gini ratio terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu ketimpangan rendah (antara 0 – 0,3), ketimpangan sedang (antara 0,3 – 0,5), dan ketimpangan tinggi (lebih dari 0,5).

Grafik 1.18 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bengkulu Maret 2020-Maret 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik Nomor 38/07/19/1h, XXVI, 1 Juli 2024

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 sebesar 0,413 lebih tinggi 0,027 poin dibanding Maret 2023 (yoy) yang sebesar 0,386 dan selalu lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan pedesaan. Untuk daerah pedesaan, Gini Ratio pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,275 turun sebesar 0,008 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 (yoy) yang sebesar 0,283

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

"Semua kekecewaan harus dialirkan menjadi energi positif untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih keras lagi, sehingga berbagai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi bisa diraih."

Sri Mulyani Indrawati

Pada Maret 2024, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah daerah tercatat sebesar 20,75 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,45 persen poin jika dibandingkan dengan Maret 2023 (yoy) yang sebesar 21,20 persen. Kategori ketimpangan menengah sebesar 35,99 persen meningkat sebesar 0,02 persen poin dibandingkan Maret 2023 (yoy). Sedangkan kategori ketimpangan teratas dengan jumlah proporsi pengeluaran kurang dari 12 persen yaitu sebesar 43,25 persen meningkat 0,42 persen poin dibandingkan Maret 2023 (yoy) yang sebesar 42,83 persen.

Jika dibedakan menurut daerah, pada Maret 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 17,90 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah pedesaan tercatat sebesar 23,28 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah pedesaan di Provinsi Bengkulu termasuk dalam kategori dengan ketimpangan rendah. Jika dibandingkan dengan tingkat gini rasio nasional pada Maret 2024 yang berada pada nilai 0,379, maka rasio gini Provinsi Bengkulu sebesar 0,342 masih lebih baik daripada rata-rata nasional lebih baik sebesar 0,037 persen poin.

Kenaikan gini ratio pada Maret 2024 ini dipengaruhi oleh belum meratanya pembangunan di Bengkulu, masih terpusat di bagian Kota sehingga menyebabkan adanya perbedaan kemajuan antar wilayah. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya menurunkan ketimpangan yang terjadi di Provinsi Bengkulu melalui akselerasi pembangunan konektivitas infrastruktur darat, laut dan udara serta secara masif mendorong UMKM naik kelas melalui berbagai program-program unggulan seperti kemudahan dalam penyaluran KUR dan UMi bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Melalui program-program ini diharapkan dapat berkontribusi terus mempertahankan rasio gini Provinsi Bengkulu di level rendah.

1.2.4 Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP Provinsi Bengkulu Juni 2024 berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan sebesar 181,42 atau naik 3,49 persen dibanding NTP Mei 2024 yang senilai 175,06 persen. Peningkatan NTP pada Juni 2024 disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada indeks harga hasil produksi pertanian (It), sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal meningkat lebih rendah (Ib).

Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) mencerminkan kemampuan tukar komoditas hasil pertanian dengan barang dan jasa konsumsi petani yang diperlukan untuk keperluan rumah tangga maupun keperluan dalam proses produksi semakin kuat. Semakin tinggi angka NTP maka semakin kuat kemampuan daya beli yang dimiliki oleh petani.

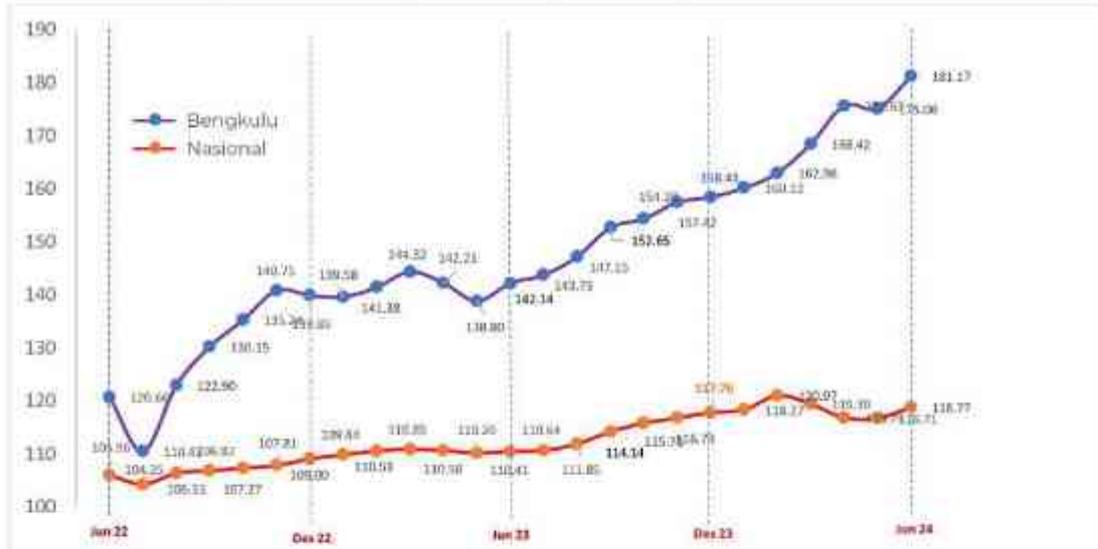
Peningkatan yang terjadi pada NTP Juni 2024 dipengaruhi oleh peningkatan NTP yang terjadi pada tiga subsektor Hortikultura sebesar 8,24 persen; subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 3,98 persen; dan subsektor Peternakan sebesar 2,96 persen. Sementara dua subsektor yang mengalami penurunan adalah subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,89 persen dan subsektor Perikanan sebesar 0,89 persen.

"Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi mencerminkan martabat suatu bangsa yang baik."

Sri Mulyani Indrawati



Grafik 1.19 Perbandingan Perkembangan NTP Bengkulu dengan Nasional Juni 2022 – Juni 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024 (diolah)

Jika dibandingkan dengan nilai NTP nasional pada bulan Juni 2024 yang berada di angka 118,77, maka NTP Provinsi Bengkulu berada di atas nilai NTP nasional sebesar 181,17 persen lebih tinggi 62,94 persen poin. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) meningkat sebesar 4,48 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) meningkat sebesar 0,96 persen.

Peningkatan NTP pada Juni 2024 ini ditopang oleh meningkatnya harga komoditas kopi akibat Penurunan Produksi di Berbagai Negara dan Harga Cabe meningkat karena meningkatnya permintaan pada Hari Raya Idul Adha. Hal ini menunjukkan Produktivitas Petani di Provinsi Bengkulu mampu bertahan ditengah perubahan iklim yang tidak menentu.

Indeks Nilai Tukar Petani secara Parsial di Bawah 100. Jika dilihat secara parsial NTP per subsektor, nilai tukar petani di Provinsi Bengkulu per bulan Juni 2024 seluruhnya telah berada pada nilai di atas 100 sebagai berikut:

Tabel 1.9 Nilai Tukar Petani Per Subsektor dan Persentasi Perubahannya, Juni 2024

Subsektor	Mei 2024	Juni 2024	% Perubahan
Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)	113,20	111,06	-1,89
Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	125,46	135,80	8,24
Nilai Tukar Petani Perkebunann Rakyat (NTPR)	194,42	202,16	3,98
Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	97,54	100,43	2,96
Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (NTNP)	106,38	105,44	-0,89

Sumber : Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024

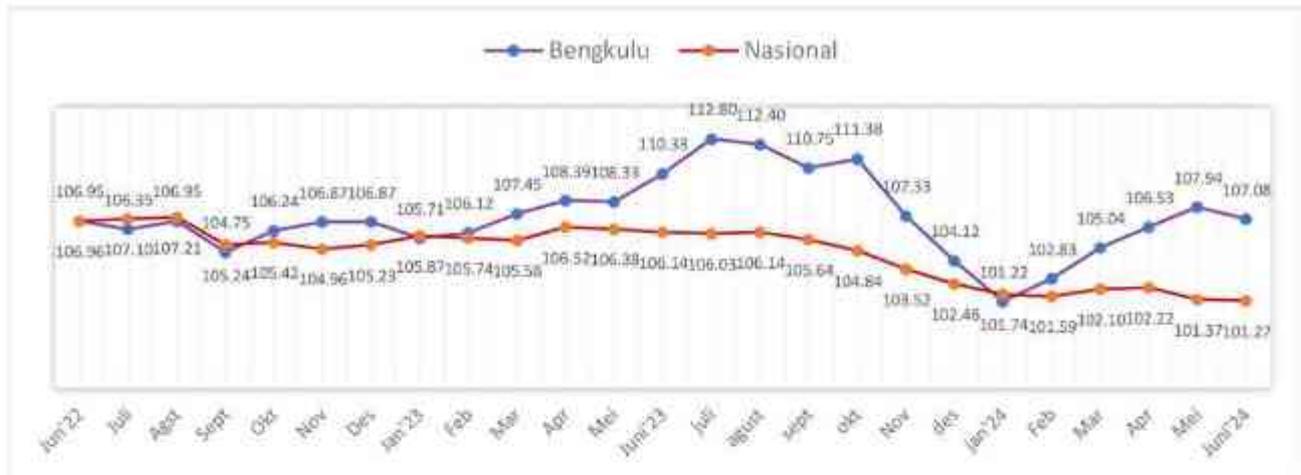
1.2.5 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan nelayan dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan. Data NTN Provinsi Bengkulu diperoleh dari data NTP Subsektor Perikanan Nelayan (NTN).

Pada Juni 2024, NTN Provinsi Bengkulu berada pada angka 107,08 mengalami penurunan 0,79 persen dari bulan Mei sebelumnya. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 0,26 persen, sedangkan Ib naik lebih tinggi sebesar 1,06 persen. Kenaikan It disebabkan oleh naiknya It pada kelompok penangkapan perairan umum dan kelompok penangkapan laut masing- masing sebesar 1,09 persen

dan indeks kelompok BPPBM sebesar 0,70 persen. Hal ini menunjukkan adanya tekanan daya tukar nelayan akibat laju kenaikan harga komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan lebih besar daripada laju kenaikan harga biaya produksi yang dikeluarkan.

Grafik1.20 Perbandingan Perkembangan NTN Bengkulu dengan Nasional Juni2022-Juni 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 13 Juli 2024 (diolah)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi). Pada Juni 2024, NTPi mengalami penurunan sebesar 1,04 persen. Hal ini terjadi karena It mengalami kenaikan sebesar 0,71 persen, sementara Ib mengalami kenaikan lebih besar yaitu 1,77 persen. Kenaikan yang terjadi pada It disebabkan oleh naiknya It kelompok budidaya air tawar sebesar 0,71 persen. Kenaikan yang terjadi pada Ib disebabkan oleh naiknya indeks kelompok KRT sebesar dan indeks kelompok BPPBM masing-masing sebesar 1,07 persen dan 2,13 persen.

Perubahan iklim merupakan faktor utama terjadinya Penurunan NTN pada Juni 2024. Kenaikan suhu muka air laut dan kondisi cuaca yang berubah-ubah berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan dan penurunan harga ikan laut akibat dari jumlah ikan yang melimpah disaat musim penghujan. Sebagai Daerah dengan kondisi laut yang luas membentang, Pemerintah Bengkulu terus berupaya meningkatkan potensi sumber daya perikanan diantaranya dengan melakukan kolaborasi bersama BMKG melalui program- program seperti Sekolah Lapang Laut, Sekolah Lapang Iklim dan program lain bersama instansi terkait, dengan harapan mampu mengoptimalkan kembali produktivitas sektor perikanan di Provinsi Bengkulu.

Jika dibandingkan dengan nilai tukar nelayan nasional yang berada di angka 101,27 maka nilai NTN Provinsi Bengkulu 107,08 persen berada di atas nilai NTN nasional sebesar 5,81 persen poin.

"Kekecewaan itu harus kita salurkan dengan bekerja lebih baik lagi dan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi."

Sri Mulyani Indrawati



BAB II

ANALISIS FISKAL REGIONAL



Kemenkeu Satu Bengkulu Perkuat Sinergi dengan Pemda

Kegiatan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) kinerja pengelolaan keuangan dan ekonomi bersama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong



Pantai unik ini memiliki batu dan daratan di tengahnya. Pantai ini juga merupakan tempat konservasi penyu yang hampir punah.

PANTAI *Way Hawang*

02 ANALISIS FISKAL REGIONAL

2.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

Provinsi Bengkulu hingga triwulan II 2024, Belanja APBN di Provinsi Bengkulu sebagai pilar utama penggerak perekonomian diharapkan mampu berkontribusi maksimal mengingat pertumbuhan ekonomi masih dibawah 5 persen dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih tinggi yaitu 13,56 persen menduduki tertingga nomor 2 setelah Provinsi Aceh.

Realisasi Pendapatan Negara hingga akhir triwulan II 2024 telah mencapai Rp1.59 triliun atau 47,97 persen dari target, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp7,55 triliun atau 46,69% dari pagu sehingga posisi fiskal APBN di Provinsi Bengkulu mengalami defisit sebesar (Rp5,95 triliun). Hal ini menunjukkan Bengkulu memiliki kapasitas fiskal yang sangat rendah dan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan potensi fiskal Bengkulu di masa mendatang.

Tabel 2.1 Laporan Realisasi APBN di Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

i-Account	Tahun 2023			Tahun 2024			Growth
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	
PENDAPATAN NEGARA	3.036,54	1.840,29	60,60	3.331,53	1.598,30	47,97	-13,1%
Pendapatan Perpajakan	2.688,54	1.247,91	46,42	2.989,37	1.156,96	38,70	-7,3%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	348	592,38	170,22	342,17	441,33	128,98	-25,5%
Hibah	-	-	-	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	15.994,79	6.618,72	41,38	16.160,03	7.545,81	46,69	14,0%
BELANJA PEMERINTAH PUSAT	5.386,13	1.972,72	36,63	5.304,38	2.368,42	44,65	20,1%
Belanja Pegawai	1.848,73	948,49	51,3	1.925,59	1.118,72	58,1	17,9%
Belanja Barang	2.590,07	750,21	28,96	2.477,84	993,86	40,11	32,5%
Belanja Modal	928,68	265,58	28,6	882,55	245,28	27,79	-7,6%
Belanja Bantuan Sosial	18,64	8,45	45,32	18,40	10,55	57,34	24,9%
Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFER KE DAERAH	10.608,67	4.645,99	43,79	10.855,65	5.177,4	47,69	11,4%
Dana Transfer Umum (DTU)	7.105,47	3.266,45	45,97	7.248,68	3.731,39	51,47	14,23%
Dana Alokasi Umum (DAU)	6.256,59	3.067,89	49,03	6.562,71	3.449,93	52,57	12,5%
Dana Bagi Hasil (DBH)	848,89	198,56	23,39	685,96	281,46	41,03	41,8%
Dana Transfer Khusus (DTK)	2.311,51	805,82	49,03	2.527,82	783,54	31	2,84%
Dana Alokasi Khusus Fisik	895,85	99,31	11,09	1.089,24	73,37	6,74	-26,1%



i-Account	Tahun 2023			Tahun 2024			Growth
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	
Dana Alokasi Khusus Nonfisik	1.415,66	706,5	49,91	1.438,58	710,17	49,37	0,5%
Dana Insentif Fiskal	110,7	15,03	13,57	26,59	13,29	50	-11,5%
Dana Desa	1.080,98	558,7	51,68	1.052,58	649,18	61,68	16,2%
SURPLUS/DEFISIT	(12.958)	(2.805,07)	21,64%	(7.524,12)	(5.947,51)	79,04%	57,4%
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(12.958)	(2.805,07)	21,64%	(7.524,12)	(5.947,51)	79,04%	57,4%

Sumber: DJP, DJBC, Direktorat PNBP SDA-KND dan OMSPAN

2.1.1 Pendapatan Negara

Realisasi pendapatan negara sampai triwulan II 2024 mencapai Rp1.598,30 miliar mengalami penurunan sebesar Rp131,89 miliar atau tumbuh negatif yaitu minus -13,1 persen dibanding periode yang sama di tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp1.840,29 miliar.

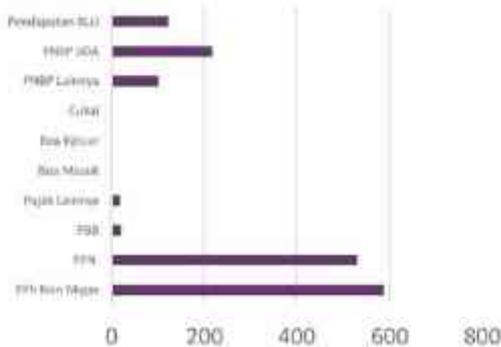
Grafik 2.1 Kontribusi Pendapatan Negara Triwulan II 2024 (Miliar Rupiah)



Sumber: DJP (diolah)

Kontribusi dan Komponen Pendapatan Negara dan Hibah. Kontribusi terbesar pendapatan negara dan hibah di Bengkulu periode Triwulan II 2024 berasal dari penerimaan perpajakan. Dari total pendapatan negara sebesar Rp1,59 triliun, meliputi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional berkontribusi sebesar 72 persen dengan capaian sebesar Rp1,15 triliun. Sedangkan pendapatan dari PNBP terealisasi sebesar Rp0,44triliun atau berkontribusi sebesar 28 persen.

Grafik 2.2 Komponen Pendapatan Negara Triwulan II 2024



Sumber: DJP, DJBC, Direktorat PNBP SDA-KND dan OMSPAN (diolah)

Komponen pendapatan negara dengan penerimaan terbesar adalah jenis Pajak Penghasilan Non Migas sebesar Rp587,85 miliar, disusul Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp529,84 miliar, dan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp20,62 miliar. Komponen pajak selain ketiga jenis pajak di atas yaitu Pajak Lainnya terealisasi sebesar Rp18,27 miliar, Bea Masuk sebesar Rp0,0023 miliar, Bea Keluar Rp0,3 miliar, serta Cukai sebesar Rp0,07 miliar.

Jenis pendapatan negara dari PNBP yaitu PNBP Lainnya mencatatkan realisasi sebesar Rp441,33 miliar yang terdiri dari realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp101,39 miliar, PNBP SDA sebesar Rp217,55 miliar dan Pendapatan BLU sebesar Rp122,4 miliar.

Analisis Penerimaan Pajak. Kontraksi pendapatan negara dikarenakan PPh Non Migas yang memiliki kontribusi 51 persen masih mengalami kontraksi sebesar 14,81 persen. Kontraksi PPh Non Migas terutama disebabkan menurunnya produksi sawit akibat musim trek serta menurunnya permintaan ekspor CPO pada rentang awal hingga akhir triwulan II 2024 di Provinsi Bengkulu. Disamping harga yang belum membaik, ekspor batu bara Bengkulu juga mengalami penurunan karena China dan India membatasi permintaan impor batu bara terkait isu lingkungan. Sawit dan batu bara merupakan komoditas andalan penerimaan pajak di Bengkulu. Menurut data BPS nilai ekspor Bengkulu pada bulan Mei 2024 turun sebesar 73,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyebab lainnya kontraksi PPh Non Migas adalah adanya perubahan pola pembayaran karena konsekuensi dari proses bisnis yang telah berjalan selama 2023 yaitu banyaknya SPT yang statusnya lebih bayar sehingga pembayaran PPh 25 masa berkurang dan banyaknya pengembalian lebih bayar kepada WP di awal tahun. Kontraksi realisasi Belanja Modal dan DAK Fisik juga menyumbang perlambatan realisasi penerimaan PPh Non Migas.

Pajak Lainnya terkontraksi karena permintaan pasar terhadap penggunaan bea materai berkurang. Hal ini juga dipengaruhi oleh perlambatan realisasi perikatan/kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di semester I.

Tabel 2.2 Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak s.d triwulan II 2024 (Miliar Rupiah)

Jenis Pajak	Periode Triwulan II		Naik/turun	Growth (%)
	2023	2024		
PPh Non Migas	690,04	587,85	Turun	-14,81%
PPN	513,51	529,84	Naik	3,18%
PBB	18,85	20,62	Naik	9,4%
Pajak Lainnya	19,7	18,27	Turun	-7,26%
Total	1.242,10	1.156,59	Turun	-6,88%

Sumber: DJP

Analisis Penerimaan Bea dan Cukai. Realisasi penerimaan Bea dan Cukai hingga Triwulan II 2024 sebesar Rp 0,3785 miliar, menurun sangat signifikan sebesar 93,5 persen dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp5,81 miliar.

Tabel 2.3 Capaian Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai s.d triwulan II 2024 (Miliar Rupiah)

Jenis Penerimaan	Periode Triwulan II		Naik/turun	Growth (%)
	2023	2024		
Bea Masuk	0,0053	0,0023	Turun	-55,8%
Bea Keluar	5,79	0,3	Turun	-94,8%
Cukai	0,02	0,07	Naik	292,3%
Total	5,81	0,38	Turun	-93,5

Sumber: DJBC



Penerimaan Bea dan Cukai di Provinsi Bengkulu hingga akhir triwulan II 2024 mengalami penurunan sebesar 93,5 persen yang mana kontribusi penurunan terbesar berasal dari penerimaan bea keluar yang kontraksi hingga 94,8% karena realisasi ekspor komoditas Cangkang Kernel Sawit masih terhambat pembengkakan biaya pemuatan akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Sementara untuk realisasi Bea Masuk juga berkontraksi cukup dalam karena sampai dengan triwulan II 2024 belum ada realisasi impor ke Bengkulu dan penerimaan Bea Masuk hanya disumbang oleh registrasi IMEI HKT yang tidak bisa ditentukan targetnya. Di sisi lain, realisasi penerimaan Cukai HT disumbang oleh pabrik rokok CV. Raflesia Mekar Mandiri di Rejang Lebong dan hasil ultimatum remedium penegahan rokok ilegal. Penerimaan cukai dari pabrik rokok CV belum optimal karena kapasitas produksi masih terbatas (proses masih manual terhambat permodalan) sehingga pemasaran masih terbatas. Peredaran rokok ilegal juga mengganggu pemasaran rokok yang baru berproduksi sejak bulan Maret ini.

Penerimaan Bukan Pajak (PNBP). Realisasi PNBP hingga akhir Triwulan II 2024 terealisasi sebesar Rp441,33 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar -25,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, dimana realisasi PNBP terealisasi sebesar Rp592,38 miliar. Pendapatan BLU tumbuh positif 22,9% menunjukkan kinerja BLU di Bengkulu yang cukup baik.

Tabel 2.4 **Capaian Realisasi PNBP s.d triwulan II 2024 (Miliar Rupiah)**

Jenis PNBP	Periode Triwulan II		Naik/turun	Growth (%)
	2023	2024		
PNBP Lainnya	135,94	101,39	Turun	-25,4%
PNBP SDA	356,82	217,55	Turun	-39%
Pendapatan BLU	99,62	122,4	Naik	22,9%
Total	592,38	266,22	Turun	-25,5%

Sumber: DJBC

Analisis Tax Ratio. Tax Ratio APBN wilayah Provinsi Bengkulu sampai triwulan II 2024 tercatat sebesar 2,60 persen. Nilai ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1 juta rupiah maka penerimaan pajak akan bertambah sebesar Rp26.000,-. Jika dibandingkan dengan nilai tax ratio periode yang sama di tahun sebelumnya, maka nilai tax ratio ini turun 10,96 persen poin, lebih rendah dibandingkan dengan tax ratio nasional triwulan I 2023 yang berada pada level 2,92 persen.

Penurunan tax ratio ini dipengaruhi oleh turunnya penerimaan pajak dari komoditas utama Bengkulu yaitu sawit dan batu bara sebagai dampak perubahan iklim yang menyebabkan musim trek kepala sawit sehingga menurunkan tingkat produksi sawit walaupun harga sawit relatif stabil. Sementara itu harga batu bara di pasar global mengalami penurunan selama triwulan I dan II namun secara proyeksi akan meningkat bertahap pada triwulan berikutnya dikarenakan permintaan pasar internasional (terutama India dan China) yang mulai tumbuh.

Tabel 2.5 **Analisis Tax Ratio APBN Wilayah Provinsi Bengkulu triwulan II Tahun 2024 (Triliun Rupiah)**

Tahun	Pajak		PDRB	Tax Ratio
	Target	Realisasi		
2023	2,68	0,71	24,36	2,92%
2024	2,96	0,69	26,50	2,60%

Sumber: aplikasi OMSPAN diakses tanggal 10 Agustus 2024 pukul 14:00 WIB dan BPS Provinsi Bengkulu

Analisis Kendala Permasalahan dan Strateginya. Kinerja pendapatan negara di wilayah Provinsi Bengkulu sampai triwulan II 2024 tumbuh negatif sebesar -13,1 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Adapun beberapa sumber penerimaan mengalami penurunan yaitu PPh Non Migas, penerimaan pajak lainnya, bea keluar dan penerimaan bea masuk.



Berdasarkan hasil analisis, permasalahan yang menjadi penyebab turunnya kinerja pendapatan negara tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Konstraksi PPH Non Migas disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
 - a. menurunnya produksi sawit akibat musim trek serta menurunnya permintaan ekspor CPO pada rentang awal hingga akhir triwulan II 2024 di Provinsi Bengkulu. Disamping harga yang belum membaik, ekspor batu bara Bengkulu juga mengalami penurunan. Sawit dan batu bara merupakan komoditas andalan penerimaan pajak di Bengkulu. Menurut data BPS nilai ekspor Bengkulu pada bulan Mei 2024 turun sebesar 73,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
 - b. Penyebab lainnya kontraksi PPh Non Migas adalah adanya perubahan pola pembayaran karena konsekuensi dari proses bisnis yang telah berjalan selama 2023 yaitu banyaknya SPT yang statusnya lebih bayar sehingga pembayaran PPh 25 masa berkurang dan banyaknya pengembalian lebih bayar kepada WP di awal tahun.
 - c. Kontraksi realisasi Belanja Modal dan DAK Fisik juga menyumbang perlambatan realisasi penerimaan PPh Non Migas.
2. Pajak Lainnya terkontraksi karena permintaan pasar terhadap penggunaan bea materai berkurang. Hal ini juga dipengaruhi oleh perlambatan realisasi perikatan/kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di semester I.
3. Penerimaan Bea Keluar terkontraksi hingga 94,8% karena realisasi ekspor komoditas Cangkang Kernel Sawit masih terhambat pembengkakan biaya pemuatan akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
4. Penerimaan Bea Masuk hanya disumbang oleh registrasi IMEI HKT yang tidak bisa ditarget. Impor menuju Bengkulu memerlukan biaya tinggi dan kurang efisien bagi pengusaha sehingga importir melakukan kegiatan importasi dari luar Bengkulu seperti Jakarta, bulan September 2021 hingga Juni 2024, tidak ada impor barang ke Provinsi Bengkulu.
5. Realisasi penerimaan Cukai HT disumbang oleh pabrik rokok CV. Rafflesia Mekar Mandiri di Rejang Lebong dan hasil ultimatum penegahan rokok ilegal yang tergantung pada jumlah kasus yang ditangani. Penerimaan cukai dari pabrik rokok CV belum optimal karena karena kapasitas produksi masih terbatas (proses masih manual terhambat permodalan) sehingga pemasaran masih terbatas. Peredaran rokok ilegal juga mengganggu pemasaran rokok yang baru berproduksi sejak bulan Maret ini.
6. Infrastruktur Pelabuhan Pulau Baai belum mendukung kegiatan ekspor curah cair sehingga ekspor CPO masih dilakukan melalui pelabuhan lain di pulau Sumatera seperti Pelabuhan Teluk Bayur di Provinsi Sumatera Barat dan Pelabuhan Panjang di Provinsi Lampung.

Strategi kebijakan yang diterapkan agar kinerja pendapatan negara di Provinsi Bengkulu meningkat pada periode selanjutnya adalah melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan penerimaan pajak (PPN dan PPh) adalah dengan terus melakukan intensifikasi melalui penguatan pengawasan terhadap pemungutan pajak dari sektor komoditas utama di Bengkulu. Pihak Ditjen Pajak melalui tiga KPP yang ada di Bengkulu akan terus melakukan pendataan dan pendalaman terhadap WP Perkebunan dan pertambangan untuk memastikan kepatuhan dalam pembayaran Pajak para WP tersebut.
- 2) Untuk meningkatkan penerimaan pajak yang bersumber dari penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD), KPP akan melakukan penguatan pengawasan kepatuhan pajak pemerintah dan desa melalui penguatan kolaborasi pertukaran data pagu dan realisasi TKD dengan Kanwil DJPb dan KPPN di Provinsi Bengkulu.
- 3) Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sebagai Financial Advisor di daerah bersama Kemenkeu Satu perlu mendorong optimalisasi Pelabuhan Pulau Baai melalui koordinasi dan sinergi yang lebih intensif dengan para stakeholders seperti; PT Pelindo, Pemda, Bank Indonesia dan para pihak yang terkait.
- 4) Melalui peningkatan infrastruktur Pelabuhan dan didukung oleh implementasi NLE Pelabuhan Pulau Baai, diharapkan kegiatan ekspor impor melalui Pelabuhan Baai dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan penerimaan di Bengkulu baik perpajakan, PNBP, maupun PAD serta menggerakkan sektor-sektor ekonomi terkait lainnya.
- 5) Kemenkeu Satu berupaya semaksimal mungkin agar peralihan NIK menjadi NPWP baru dapat terlaksana 100%, sosialisasi terutama pada satker-satker serta pada wajib pajak yang masih banyak



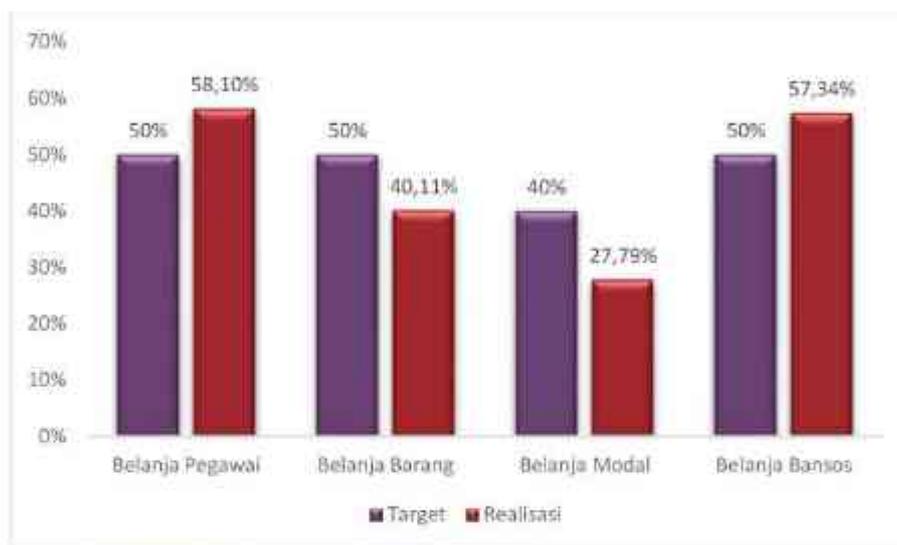
menggunakan NPWP daerah, untuk posisi saat ini dari jumlah 553.284 wajib pajak baru sejumlah 475.107 wajib pajak atau 85,9 % yang valid dalam pemadanan NIK sementara sisanya sejumlah 78.177 wajib pajak masih berstatus belum valid.

2.1.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara di Provinsi Bengkulu sampai dengan akhir triwulan II 2024 mencapai Rp7.545,81 miliar (46,69 persen dari pagu APBN di Provinsi Bengkulu). Realisasi Belanja negara tersebut mencakup Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.368,42 miliar (44,65 persen dari pagu Rp5,3 triliun) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp5.177,40 miliar (47,69 persen dari pagu Rp10,856 triliun).

Belanja Pemerintah Pusat (BPP). Sampai dengan akhir triwulan II 2024 belanja pegawai terealisasi sebesar 58,10 persen, belanja barang terealisasi sebesar 40,11 persen, belanja modal terealisasi sebesar 27,79 persen, belanja bansos terealisasi sebesar 57,34 persen. Berdasarkan target IKPA triwulan II, Belanja Barang dan Belanja Modal masih perlu dilakukan percepatan.

Grafik 2.3 Persentase Capaian Realisasi Belanja Per Jenis Belanja s.d triwulan II 2024 Sesuai Target IKPA



Sumber: aplikasi OMSPAN diakses tanggal 31 Juli 2024 pukul 09.30 WIB (diolah)

Transfer Ke Daerah (TKD). TKD hingga triwulan II 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 11,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seluruh unsur TKD tumbuh positif kecuali DAK Fisik dan Insentif Fiskal.

Dana Alokasi Umum (DAU). Hingga akhir triwulan II 2024, secara akumulasi dari 11 pemda di Provinsi Bengkulu, DAU telah disalurkan sebesar Rp3,45 triliun atau sebesar 52,57 persen dari pagu. Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023, realisasi tersebut lebih tinggi sebesar 12,5 persen. Hal ini sejalan dengan kenaikan alokasi DAU TA 2024.

DAK Fisik. Hingga akhir triwulan II 2024 secara akumulasi dari 11 pemda di Provinsi Bengkulu, penyaluran DAK Fisik baru 6,74 persen kontraksi 26,1 persen. Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Walaupun alokasi DAK Fisik mengalami kenaikan namun sampai akhir triwulan II terjadi perlambatan penyaluran karena keterlambatan terbitnya peraturan terkait DAK Fisik dan penyesuaian aplikasi pendukung penyaluran DAK Fisik.

DAK Non Fisik. Hingga akhir triwulan II 2024, secara akumulasi dari 11 pemda di Provinsi Bengkulu, DAK Non Fisik telah disalurkan sebesar Rp710,17 miliar atau sebesar 49,37 persen dari pagu. Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023, realisasi tersebut tumbuh sebesar 0,5 persen.

Dana Bagi Hasil (DBH). Hingga akhir triwulan II 2024, secara akumulasi dari 11 pemda di Provinsi Bengkulu, DBH telah disalurkan sebesar Rp281,46 miliar atau sebesar 41,03 persen dari pagu. Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023, realisasi tersebut tumbuh sebesar 41,8 persen.

Insentif Fiskal (IF). Hingga akhir triwulan II 2024 secara akumulasi dari 11 pemda di Provinsi Bengkulu, telah disalurkan sebesar Rp13,29 miliar atau sebesar 50 persen dari pagu. Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023, realisasi tersebut kontraksi sebesar 11,5 persen.

Dana Desa. Hingga akhir triwulan II 2024, secara akumulasi dari 11 pemda di Provinsi Bengkulu, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp649,18 miliar atau sebesar 61,68 persen dari pagu. Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023, realisasi tersebut tumbuh signifikan sebesar 16,2 persen.

Berdasarkan fungsi pemerintahan, realisasi terbesar terdapat pada belanja fungsi pelayanan umum dengan realisasi sebesar Rp5,56 triliun, disusul oleh fungsi Ketertiban dan Keamanan dengan realisasi sebesar Rp636,49 miliar. Sementara realisasi terendah terdapat pada fungsi pariwisata dan budaya dengan realisasi Rp502 juta.

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran Per Fungsi s.d triwulan II Tahun 2024

No	Fungsi	Pagu	Realisasi	%
1.	PELAYANAN UMUM	Rp11.618.248.016.000	Rp5.559.811.894.441	47,85%
2.	PERTAHANAN	Rp223.134.649.000	Rp118.238.965.640	52,99%
3.	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp1.239.099.707.000	Rp636.458.285.396	51,36%
4.	EKONOMI	Rp936.162.978.000	Rp343.810.909.119	36,73%
5.	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp130.884.179.000	Rp60.794.887.331	46,45%
6.	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp439.700.419.000	Rp169.084.426.314	38,45%
7.	KESEHATAN	Rp155.373.581.000	Rp80.880.425.112	52,06%
8.	PARIWISATA	Rp1.520.000.000	Rp502.193.340	33,04%
9.	AGAMA	Rp169.622.629.000	Rp95.965.018.436	56,58%
10.	PENDIDIKAN	Rp1.211.293.822.000	Rp469.735.551.928	38,78%
11.	PERLINDUNGAN SOSIAL	Rp19.470.487.000	Rp10.528.815.248	54,08%

Sumber: aplikasi Sintesa diakses tanggal 30 Juli 2024 pukul 10.30 WIB

Berdasarkan Unit Organisasi, dari 42 K/L dan 347 satker yang tersebar di Provinsi Bengkulu, Kepolisian RI menjadi K/L dengan realisasi tertinggi yaitu Rp441,26 miliar 51 persen dari pagu diikuti K/L lain sesuai tabel di bawah.

Tabel 2.7 10 Terbesar Realisasi Anggaran Per K/L s.d triwulan II Tahun 2024

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Pagu	Realisasi	%
1.	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Rp860.749.022.000	Rp441.258.838.816	51%
2.	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Rp1.182.652.078.000	Rp435.207.389.823	37%
3.	025	KEMENTERIAN AGAMA	Rp744.895.162.000	Rp400.811.507.736	54%
4.	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	Rp453.042.685.000	Rp216.704.634.397	48%
5.	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	Rp594.347.683.000	Rp148.037.449.396	25%
6.	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	Rp223.134.649.000	Rp118.238.965.640	53%
7.	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	Rp128.608.868.000	Rp77.131.323.566	60%
8.	005	MAHKAMAH AGUNG	Rp133.788.109.000	Rp67.651.542.712	51%
9.	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	Rp117.762.221.000	Rp61.329.992.613	52%
10.	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	Rp113.143.258.000	Rp59.556.667.142	53%

Sumber: aplikasi Sintesa diakses tanggal 30 Juli 2024 pukul 10.30 WIB



Analisis Kendala Permasalahan dan Strateginya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan II 2024, permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan anggaran di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Untuk pelaksanaan APBN, berdasarkan hasil evaluasi masih terkendali dengan baik, hampir seluruh indikator serapan anggaran per jenis belanja hampir telah terealisasi melebihi target kecuali belanja barang. Khusus untuk belanja barang hingga akhir triwulan I 2024 realisasi mencapai 40,11 persen, Hal ini dibawah target IKPA tahun 2024 sebesar 50 persen. Rendahnya realisasi belanja barang di bawah target IKPA triwulan I 2024 berdasarkan sampel dari 10 KL terbesar di Provinsi Bengkulu disebabkan oleh :

- Total Pagu Belanja barang yang masih terblokir masih cukup besar yaitu Rp77,32 miliar;
- Untuk satker dengan belanja barang terbesar yaitu PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU masih mengalami kendala dalam pelaksanaan anggaran yakni terdapat pekerjaan fisik, dokumen pendukung pembayaran masih belum lengkap serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Hal yang sama juga terjadi pada Belanja Modal yang realisasinya hanya 27,79 persen dari target IKPA triwulan II sebesar minimal 40%. Adapun permasalahan pada realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

- Selama triwulan II terdapat blokir belanja modal sebesar Rp43,23 miliar.
- Terdapat proyek prioritas nasional pembangunan jalan Pulau Enggano pada satker PjN Wilayah I Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp39,10 miliar yang terkendala perizinan penggunaan batu krokos sebagai material pembangun jalan.
- Terdapat tambahan belanja penanganan mendesak tanggap darurat bencana alam pada satker PjN Wilayah I Bengkulu sebesar Rp15,61 miliar yang belum dibayarkan, dikarenakan satker masih menunggu audit BPK (Seharusnya proyek ini sudah bisa dibayarkan tanpa perlu menunggu audit BPK terlebih dahulu).

2. Untuk belanja TKD yang memerlukan perhatian khusus adalah belanja DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal yang growth-nya masih berkontraksi (y-o-y). DAK Fisik mengalami kontraksi hingga akhir triwulan II 2024 antara lain disebabkan adanya perubahan regulasi pengelolaan DAK Fisik yang PMK 25 Tahun 2024 yang diundangkan pada akhir April sehingga penyaluran DAK Fisik baru bisa dilakukan mulai bulan Mei. Perlambatan penyaluran DAK Fisik juga disebabkan oleh kecenderungan untuk memenuhi syarat salur mendekati batas waktu. Hal tersebut juga telah menyebabkan Menteri Keuangan melakukan perpanjangan waktu penyampaian dokumen syarat salur DAK Fisik Tahap I dari tanggal 22 Juli menjadi 31 Juli. Dengan demikian, penyaluran DAK Fisik diprediksi mengalami peningkatan yang signifikan di triwulan III.

3. Kontraksi realisasi penyaluran Insentif Fiskal yang cukup dalam lebih disebabkan oleh turunnya alokasi dari Rp110,7 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp26,59 miliar pada tahun 2024 atau turun sebesar 75,98%.

Rekomendasi dan strategi tindak lanjut atas permasalahan kinerja belanja APBN triwulan II 2024 telah dirumuskan oleh Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Agar KPPN dan Kanwil DJPb bersinergi berkoordinasi lebih intensif dengan satker yang hingga triwulan II 2024 memiliki realisasi yang masih rendah dibawah target IKPA melalui kegiatan one on one meeting dan/atau FGD untuk memetakan permasalahan yang dihadapi dan segera menetapkan alternatif solusi pemecahan masalahnya.

2. DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Insentif Fiskal, agar Pemda segera memenuhi dokumen persyaratan penyaluran sesuai ketentuan yang di atur dalam surat Ditjen PK Nomor: S-146/PK/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada Akhir Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, sebagai langkah kongkrit agar seluruh KPPN di lingkup Kanwil DJPb Bengkulu agar segera melakukan koordinasi dan pendampingan kepada seluruh pemda mitra kerjanya sebagai wujud nyata peran KPPN selaku TREFA.

3. Melakukan audiensi kepada Satker bahwa dalam pengajuan MP PNBPN Satker perlu memperhatikan besaran MP Riil yang diizinkan, realisasi setoran PNBPN TAB dan 3 tahun terakhir, serta realisasi belanja TAB dan TAYL.



4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan II 2024 dengan isu spesifik terkait dengan melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan II 2024 dengan isu spesifik terkait dengan target realisasi sampai dengan triwulan II, deviasi halaman III DIPA, capaian belanja strategis sesuai arahan dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Serta hambatan dan tantangan terkait pelaksanaan anggaran untuk triwulan berikutnya.
5. Memastikan seluruh satker lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, memiliki perencanaan dan realisasi anggaran yang baik, dengan memastikan dan mendorong pelaksanaan dan approval Revisi halaman III DIPA TW II 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
6. Pagu belanja belanja modal terutama yang bersifat pembangunan fisik yang masih diblokir sampai dengan akhir triwulan II perlu dipertimbangkan untuk dilakukan revisi oleh kantor pusat agar tidak menimbulkan risiko pekerjaan tidak selesai atau kualitas kurang baik karena keterbatasan waktu penyelesaian pekerjaan.
7. Pemerintah daerah agar mengupayakan untuk mendapatkan alokasi dana insentif fiskal berdasarkan kinerja tahun berjalan.

2.1.3 Surplus/Defisit APBN

Realisasi APBN hingga triwulan II 2024 menghasilkan pembiayaan defisit sebesar Rp5.947,51 miliar. Nilai defisit tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4.778,43 miliar.

Tabel 2.8 **Perbandingan Defisit APBN di Provinsi Bengkulu Triwulan II 2023-2024 (Miliar Rupiah)**

Uraian	2023	2024	Selisih
Pendapatan Negara	1.840,29	1.598,30	-241,99
Belanja Negara	6.618,72	7.545,81	927,09
Surplus/Defisit	-4.778,43	-5.694,51	-1.169,08

Sumber: OMSPAN (diolah) diakses tanggal 1 Juli 2024 pukul 14.00 WIB

Semakin tingginya defisit APBN di wilayah Provinsi Bengkulu selain disebabkan karena pagu belanja yang meningkat di dibanding tahun anggaran sebelumnya dan realisasinya tumbuh positif 14% sementara di sisi pendapatan negara walaupun targetnya meningkat tetapi realisasinya mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu 13,1%.

2.1.4 Prognosis s.d. Triwulan IV tahun 2024

Sampai dengan 30 Juni 2024, realisasi APBN di Bengkulu menunjukkan defisit sebesar Rp5.947,51 miliar. Defisit ini menunjukkan jumlah pendapatan Provinsi Bengkulu lebih kecil daripada jumlah belanja. Hal ini dipicu oleh besarnya ketergantungan Provinsi Bengkulu terhadap TKD. Banyak faktor yang mendasari ketergantungan ini, salah satunya yaitu Provinsi Bengkulu yang terdiri dari 46 persen hutan, 448.551 hektar Hutan Suaka Alam dan 253.178 hektar Hutan Lindung. Namun Kanwil Provinsi Bengkulu beserta jajaran Kementerian Keuangan di daerah tetap optimis dalam membantu Pemerintah Daerah meningkatkan PAD-nya. Total prognosis penerimaan pendapatan negara sampai dengan Triwulan IV 2024 adalah sebesar Rp4,2 triliun yang terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp3,3 triliun dan PNBPN sebesar Rp0,8 triliun. Pemerintah Provinsi Bengkulu optimis dalam mencapai target pendapatannya sebesar 113 persen dari pagu hingga akhir triwulan IV 2024 dikarenakan meningkatnya harga pajak non-migas.

Perkiraan realisasi belanja negara Bengkulu sampai dengan bulan Desember 2024 secara kumulatif adalah sebesar Rp16,17 triliun atau 100 persen dari total pagu belanja negara yang sebesar Rp16,16 triliun. Total perkiraan belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp5,3 triliun atau 100 persen dari pagu BPP sebesar Rp5,3 triliun dan TKD sebesar Rp10,85 triliun atau 100 persen dari pagu TKD tahun 2024. Realisasi belanja yang melebihi pagu ini dikarenakan adanya penambahan pagu Belanja Pemerintah Pusat di semester II dan akan terus bergerak hingga Tahun Anggaran Berjalan (TAB).



Tabel 2.9 **Perkiraan Realisasi APBN sampai dengan Triwulan IV 2024**

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Realisasi (miliar Rp)	% Terhadap Pagu	Realisasi (miliar Rp)	% Terhadap Pagu
Penerimaan Perpajakan	2.989,37	1.156,96	38,70%	3.381,29	113%
Penerimaan PNBPN*	342,17	441,33	128,98%	847,51	248%
Total Pendapatan Negara	3.331,54	1.598,30	47,97%	4.228,80	127%
Belanja Pemerintah Pusat	5.304,38	2.368,42	44,65%	5.316,69	100%
Transfer Ke Daerah	10.855,65	5.177,40	47,69%	10.855,63	100%
Total Belanja Negara	16.160,03	7.545,82	46,69%	16.172,32	100%

Ket: *Total Pagu PNBPN tanpa PNBPN SDA
Sumber: DJP, DJSBC, Direktorat PNBPN SDA-KND dan QMSPAN

2.1.5 Analisis Neraca Pemerintah Pusat – Tingkat Wilayah

Analisis Neraca Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah merupakan perluasan narasi analisis atas posisi kekayaan pemerintah yang berada dalam lingkup daerah. Analisis posisi neraca pemerintah pusat pada Triwulan II-2024 didasarkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) tahun 2023 dan 2022 (growth yoy).

2.1.5.1 Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Regional Bengkulu, merupakan salah satu output dari Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP). Neraca LKPP Regional Bengkulu menyajikan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu di Regional Bengkulu. Neraca LKPP Regional Bengkulu disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara Neraca Kementerian/Lembaga dengan Neraca Bendahara Umum Negara (BUN) di Bengkulu.

Neraca LKPP Regional Bengkulu per 31 Desember 2023 menunjukkan posisi posisi kekayaan Pemerintah Pusat di Bengkulu sebesar Rp18,88 triliun, naik sebesar 3,73% atau sebesar Rp679,12 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2022 (y-on-y). Kenaikan tersebut dikarenakan oleh Kenaikan Aset lancar yang mencapai 105,37% (y-on-y) atau naik sebesar Rp843,04 miliar.

Tabel 2.10 **Perbandingan Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Tahun 2022 s.d. 2023**

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2023 (Unaudited)	% Growth	Kenaikan/ Penurunan
Aset	18.231.034.326.568	18.969.316.499.463	4,05%	738.282.172.895
Aset lancar	800.109.569.333	1.643.155.508.461	105,37%	843.045.939.128
Kas dan setara kas	239.754.006.097	324.356.140.420	35,29%	84.602.134.323
Investasi jangka pendek	10.000.000.000	35.000.000.000	250,00%	25.000.000.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	4.185.509.401	2.736.029.658	-34,63%	-1.449.479.743
Uang Muka Belanja (prepayment)	4.744.360	2.341.650	-50,64%	-2.402.710
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	4.215.893.967	936.693.980	-77,78%	-3.279.199.987
Piutang (Bruto)	287.144.783.980	358.892.019.023	24,99%	71.747.235.043
Piutang (Neto)	107.162.566.973	220.345.584.657	105,62%	113.183.017.684
Persediaan	434.786.848.535	1.059.778.718.096	143,75%	624.991.869.561
Investasi jangka panjang	-	-		
Aset tetap	17.265.429.498.947	17.030.521.774.610	-1,36%	-234.907.724.337

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2023 (Unaudited)	% Growth	Kenaikan/ Penurunan
Aset	18.231.034.326.568	18.969.316.499.463	4,05%	738.282.172.895
Tanah	8.459.724.573.611	8.487.827.132.196	0,33%	28.102.558.585
Peralatan dan mesin	3.811.915.542.692	4.171.555.972.776	9,43%	359.640.430.084
Gedung dan bangunan	2.962.544.090.596	3.288.762.370.553	11,01%	326.218.279.957
Jalan, irigasi, dan jaringan	9.927.355.602.932	10.420.596.345.224	4,97%	493.240.742.292
Aset tetap lainnya	170.733.132.272	167.747.225.709	-1,75%	-2.985.906.563
Konstruksi dalam pengerjaan	426.862.819.952	395.304.616.664	-7,39%	-31.558.203.288
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	25.759.135.762.055	26.931.793.663.122	4,55%	1.172.657.901.067
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-8.493.706.263.108	-9.901.271.888.512	16,57%	-1.407.565.625.404
Properti Investasi	-	-		
Dana cadangan	-	-		
Piutang jangka panjang	244.045.103	233.805.105	-4,20%	-10.239.998
Aset lainnya	165.251.213.185	295.405.411.287	78,76%	130.154.198.102
Kewajiban / Utang	28.559.367.268	87.718.776.205	207,15%	59.159.408.937
Kewajiban jangka pendek	28.559.367.268	87.718.776.205	207,15%	59.159.408.937
Kewajiban jangka panjang	-	-		
Ekuitas	18.202.474.959.300	18.881.597.723.258	3,73%	679.122.763.958

Sumber: LKPK dan LSKP Kanwil DJPb Bengkulu 2022 - 2023

Posisi Aset Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp18,96 triliun, meningkat sebesar 4,05% (y-on-y) atau sebesar Rp738,28 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2022. Pada aset lancar per 31 Desember 2023 tumbuh 105,37% (y-on-y) atau naik sebesar Rp843,04 miliar begitu pula dengan aset lainnya yang meningkat sebesar 78,76% atau sebesar 130,15 miliar dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2022 sedangkan aset tetap mengalami kontraksi mencapai 1,36% (y-on-y) atau menurun Rp234,90 miliar. Penurunan Aset tetap didominasi oleh naiknya penyusutan Aset Tetap sebesar 16,57% (y-on-y) atau Rp1,40 triliun.

Untuk Kewajiban Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp87,71 miliar yang seluruhnya bersumber dari Kewajiban jangka Pendek, kewajiban tumbuh sebesar 207,15%(y-on-y) atau naik sebesar Rp59,15 miliar dibandingkan posisi 31 Desember 2022.

2.1.5.2 Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap dari Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp1,99 Triliun yang terdiri Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Lainnya. Proporsi terbesar Belanja Modal Pemerintah Pusat tahun 2023 yaitu pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mencapai 62,45%, sementara yang terkecil adalah untuk Belanja Modal Tanah sebesar 0,17% dari total Realisasi Belanja Modal Pemerintah Pusat.

Tabel 2.11 Kontribusi Belanja Pemerintah dalam Pembentukan Aset Tetap dari Belanja Modal

Uraian	Pagu	Realisasi	Proporsi Realisasi
Bel. Modal Tanah	8.707.150.000	1.520.180.000	0,17%
Bel. Peralatan dan Mesin	483.046.782.815	71.923.955.107	8,01%
Bel. Gedung dan Bangunan	573.775.866.732	226.508.517.973	25,21%
Bel. Jalan, Irigasi dan Jaringan	880.199.728.676	561.069.889.366	62,45%
Bel. Aset Tetap Lainnya	48.753.749.121	4.015.207.740	0,45%
Bel. Lainnya	1.710.000.000	33.398.184.575	3,72%
Jumlah	1.996.193.257.344	898.435.934.761	100,00%

Sumber: LKPK dan LSKP Kanwil DJPb Bengkulu 2023



Namun demikian jika ditinjau dari Neraca Pemerintah LKPP, terdapat kontraksi pada Aset tetap sebesar 1,36% atau turun sebesar Rp234,90 miliar. Pada Neraca LKPP tahun 2023 paling besar penurunan pada nilai Aset berupa Konstruksi dalam pengerjaan sebesar 7,39% atau turun sebesar Rp31,55 miliar.

2.1.5.3 Realisasi dan Potensi PNBPN dari BMN

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Presiden Republik Indonesia) di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Objek PNBPN: Pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dan dan hak negara lainnya.

Realisasi penerimaan PNBPN sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp536,64 miliar atau tumbuh 32,05 persen dari penerimaan PNBPN tahun sebelumnya sebesar Rp406,41 miliar. Penerimaan PNBPN terbesar berasal dari kontribusi PNBPN Bukan pajak Lainnya yang mencapai Rp264,50 miliar.

Tabel 2.12 Realisasi dan Potensi PNBPN dari BMN Tahun 2022 s.d. 2023

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2023 (Unaudited)	% Growth	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	183.806.444.430	264.506.371.853	43,90%	80.699.927.423
Pendapatan Badan Layanan Umum	222.604.440.618	272.139.795.968	22,25%	49.535.355.350
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	406.410.885.048	536.646.167.821	32,05%	130.235.282.773

Sumber: LKPP LRA Kanwil DJPb Bengkulu 2022 – 2023

Peningkatan capaian realisasi penerimaan PNBPN tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya ditopang oleh kenaikan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar 43,90% atau Rp80,69 miliar dan pendapatan BLU sebesar 22,25 persen.

Tabel 2.13 Uraian Realisasi dan Potensi PNBPN dari BMN Tahun 2022 s.d. 2023

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2023 (Unaudited)	% Growth	Kenaikan/ Penurunan
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	183.806.444.430	264.506.371.853	43,90%	80.699.927.423
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Perjualan	4.485.115.492	4.806.239.610	7,16%	321.124.118
Pendapatan Jasa	109.313.581.929	119.582.362.404	9,39%	10.268.780.475
Pendapatan Pendidikan	47.871.631.000	40.087.176.409	-16,26%	-7.784.454.591
Pendapatan Lain-lain	22.136.116.009	100.030.593.430	351,89%	77.894.477.421
Pendapatan Badan Layanan Umum	222.604.440.618	272.139.795.968	22,25%	49.535.355.350
Pendapatan Jasa Layanan Umum	214.952.828.169	258.246.357.725	20,14%	43.293.529.556
Pendapatan Hibah BLU		10.000.000		10.000.000
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.287.129.630	4.752.001.024	269,19%	3.464.871.394
Pendapatan dari Alokasi APBN		39.050.000		39.050.000
Pendapatan BLU Lainnya	6.364.482.819	9.092.387.219	42,86%	2.727.904.400

Sumber: LKPP LRA Kanwil DJPb Bengkulu 2022 – 2023

Salah satu obyek penerimaan dari PNBPN adalah penerimaan yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Upaya optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara adalah dengan mendayagunakan BMN yang idle (BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga) melalui sistem sewa BMN maupun penjualan BMN. Kontribusi BMN untuk menghasilkan penerimaan PNBPN masih relatif kecil. Tahun 2022, realisasi penerimaan PNBPN yang bersumber dari pemanfaatan BMN sebesar Rp4,48 miliar atau hanya berkontribusi sebesar 1,10 persen dari total penerimaan PNBPN 2022. Tahun 2023, kontribusi BMN terhadap penerimaan PNBPN tumbuh menjadi Rp4,80 miliar atau berkontribusi sebesar 0,90 persen dari total penerimaan PNBPN tahun 2022.



Tabel 2.14 **Perkembangan Realisasi PNBP bersumber dari BMN Tahun 2022 – 2023**

Uraian	Tahun 2022 (Audited)	Tahun 2023 (Unaudited)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	36.900.000	6.000.000
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	1.036.560.000	1.457.157.270
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	755.140.000	943.704.410
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	62.500.000	69.510.000
424929- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	302.725.680	445.364.501
424939- Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	76.997.499	-
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.950.525.740	1.587.966.237
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	767.735.663	739.100.891
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.214.574.462	1.445.213.218

Sumber: Buku Besar Kas LKPP TW 2022 – 2023

2.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)

2.2.1 Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. APBD juga sebagai salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Tabel dibawah ini menyajikan data profil berupa realisasi APBD secara konsolidasian seluruh Pemda (provinsi/kabupaten/kota) Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2.15 **Laporan Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2023 (Miliar Rupiah)**

Uraian	2023			2024			Growth(%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Daerah	12.321,01	4.025,64	33%	13.314,22	5.304,69	39,84%	31,77%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.725,27	610,34	35,39%	1.864,79	662,35	35,52%	8,49%
Pendapatan Transfer	10.417,85	3.395,85	32,60%	11.333,38	4.623,09	40,79%	36,14%
Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah	177,89	19,25		115,05	19,25	16,58%	
Belanja Daerah	12.695,96	3.931,56	30,97%	13.780,47	4.796,23	34,80%	21,99%
Belanja Operasi	8.695,17	3.094,25	35,52%	9.907,64	3.890,21	39,26%	25,70%
- Belanja Pegawai	5.295,15	2.245,55	42,41%	5.673,37	2.480,33	43,72%	10,46%
- Belanja Barang dan Jasa	3.120,4	783,31	25,10%	3.560,1	1.022,44	28,72%	30,53%
- Belanja Bunga	1,1	1,1	100%				
- Belanja Subsidi				0,14			
- Belanja Hibah	268,36	64,25	23,94%	663,41	386,66	58,28%	501,73%
- Belanja Sosial	10,16	,54	5,31%	10,62	0,79	7,45%	46,76%
Belanja Modal	1.995,39	286,25	14,34%	1.915,99	275,17	14,36%	-4,03%
Belanja Tidak Terduga	45,71	63	137,80%	35,04	0,62	1,77%	-0,39%
Belanja Transfer Pemas. Daerah	1.958,88	549,93	28,07%	1.921,8	630,22	32,79%	12,76%
- Belanja Bagi Hasil	383,67	55,04	14,35%	340,95	29,69	8,71%	-46,07%
- Belanja Bantuan Keuangan	1.575,22	494,89	31,44%	1.580,85	600,54	37,99%	21,35%
Surplus/Defisit	-374,95	94,08	25,10%	-466,25	508,46	109,05%	81,50%

Uraian	2023			2024			Growth(%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pembiayaan Daerah	476,72	147,24	71,98%	497,65	348,35	70,00%	136,59%
Penerimaan Pembiayaan	425,83	214,13	57,75%	481,95	350,35	72,69%	38,88%
- SILPA	425,83	96,79	39,77%	481,95	178,99	37,14%	84,97%
- Pencairan Dana Cadangan	-	117,33		-	171,36		
- Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-		
Pengeluaran Pembiayaan	50,88	66,89	36,73%	15,7	2,0	12,74%	-3244,46%
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37,38	37,38	100,00%	-	-		-100,00%
- Pembentukan Dana Cadangan		27,71		-	-		
- Penyertaan Modal Daerah	13,5	1,8	13,33%	15,7	2	0,127388535	11,71%
- Pemberian Pinjaman Daerah							
SILPA/SIKPA	-			-	856,81		

Sumber: LRA LKPK dan LSKP Triwulan II Bengkulu 2023 - 2024

Komponen PAD. Pajak daerah masih menjadi sumber utama PAD yang terealisasi sebesar Rp502,18 miliar atau 75,82 persen dari total PAD diikuti oleh retribusi daerah sebesar Rp84,41 miliar atau 12,74 persen lalu lain – lain PAD yang sah sebesar Rp84,41 miliar atau 7,81% dan yang terakhir Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 24,01 miliar atau 3,63% dari total PAD .

Tabel 2.16 Laporan Realisasi APBD Konsolidasi Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

Uraian	2023			2024			Growth(%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.725,27	610,54	35,39%	1.864,79	662,35	35,52%	8,49%
- Pajak Daerah	1.111,32	439,1	39,51%	1.191,16	502,18	42,16%	14,37%
- Retribusi Daerah	67,07	9,45	14,09%	103,86	84,41	81,28%	793,12%
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	39,81	26,72	67,12%	36,03	24,01	66,64%	-10,15%
- Lain-Lain PAD yang Sah	507,08	135,27	26,68%	533,74	51,75	9,70%	-61,74%

Sumber: LRA LKPK dan LSKP Triwulan II Bengkulu 2023 - 2024

Analisis Pertumbuhan (Growth) Pendapatan PAD dan Dana Transfer. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Provinsi Bengkulu dalam periode yang sama pada tahun 2023, maka realisasi pendapatan daerah untuk periode triwulan II tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 8,49 persen dari Rp610,54 miliar tahun 2023 menjadi Rp662,35 miliar tahun 2024. Jika dilihat dari komponen pendapatan daerah, naiknya realisasi pendapatan daerah pada triwulan II 2024 dikontribusi oleh naiknya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Analisis Tax Ratio PAD Terhadap PDRB. Tax ratio menunjukkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah pendapatan nasional atau produk domestik bruto. Nilai tax ratio Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2024 sebesar 1,88 persen menurun cukup signifikan apabila dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 3,24 persen. Hal ini perlu dipelajari lebih lanjut apakah terdapat potensi pajak daerah dari faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang belum dikelola dengan optimal.

Tabel 2.17 Analisis Tax Ratio APBD Wilayah Provinsi Bengkulu triwulan II Tahun 2024 (Triliun Rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (triliun)	PDRB (triliun)	Tax Ratio
2023	0,43	13,28	3,24 %
2024	0,50	26,50	1,88%

Sumber: LKPKD Triwulan II 2024 dan BPS Provinsi Bengkulu



Analisis Kemandirian Fiskal Pemda. Rasio kemandirian daerah merupakan rasio yang merepresentasikan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan serta urusan pemerintahannya sendiri. Rasio kemandirian daerah dapat diukur dengan perhitungan proporsi PAD terhadap Pendapatan Transfer yang diterima oleh Pemda berkenaan.

Secara keseluruhan, rasio kemandirian Pemda di Bengkulu mencapai angka 13,81% atau memiliki kemampuan keuangan "rendah sekali". Dalam hal ini, hampir seluruh Pemda di Bengkulu memiliki kemampuan kemandirian dengan kategori "rendah sekali", kecuali Pemprov Bengkulu yang memiliki kemandirian "Rendah". Pemprov Bengkulu memiliki kemandirian yang tinggi karena ditopang oleh jenis pajak yang memiliki volume dan nilai transaksi besar yang berada dalam wewenang provinsi Bengkulu dan merupakan pusat aktivitas perekonomian. Namun masih ada pajak daerah yang masih harus dibagi ke masing-masing pemerintah daerah yang merupakan hak masing-masing pemerintah daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Tabel 2.18 Rincian Rasio Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

Nama Pemda	PAD	Belanja	Rasio Kemandirian Fiskal	Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Bengkulu	506,98	1,430,99	35,43%	Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
B e n g k u l u Utara	15,92	395,08	4,03%	Rendah	>25-50%	Konsultatif
B e n g k u l u Selatan	13,81	409,22	3,37%	Sedang	>50-75%	Partisipasif
Rejang Lebong	17,08	429,34	3,98%	Tinggi	>75-100%	Delegatif
Seluma	4,32	396,57	1,09%			
Kaur	4,27	243,08	1,76%			
Muko-Muko	8,79	380,3	2,31%			
Lebong	8,86	251,56	3,52%			
Kepahiang	6,67	217,08	3,07%			
B e n g k u l u Tengah	9,27	348,88	2,66%			
Kota Bengkulu	66,39	439,14	15,12%			

Sumber: LKPKD Triwulan II 2024

2.2.2 Belanja Daerah

Analisis Komposisi Belanja Daerah dan Perbandingannya. Belanja Daerah Provinsi Bengkulu pada triwulan II 2024 mencapai Rp4,79 triliun atau 34,80 persen dari alokasi belanja yang disediakan. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 21,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,93 triliun. Kenaikan kinerja penyerapan belanja daerah didorong oleh belanja operasi.

Berdasarkan Jenis Belanja secara agregat, dari pada Triwulan II-2024, rasio belanja masih didominasi oleh Belanja Operasi dengan proporsi 81,11 persen, diikuti Belanja Transfer Pemerintah Daerah sebesar 13,14 persen sementara belanja modal hanya mencapai 5,74 persen dari total belanja.

2.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja untuk memenuhi kegiatan sehari-hari pemerintah daerah dan memberi manfaat dalam jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.



Realisasi Belanja Operasi pada Triwulan II-2024 sebesar Rp4.796,23 miliar mengalami peningkatan 1 dari Triwulan II-2023 yang mencapai Rp3.931,56 miliar, secara persentase realisasi belanja operasi tahun 2024 juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 34,80 persen. Secara proporsi, belanja pegawai masih mendominasi dari keseluruhan belanja operasi dengan porsi 81,11 persen.

Tabel 2.19 Rincian Realisasi Belanja Daerah Konsolidasian Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

Uraian	2023			2024			Growth(%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Belanja Daerah	12.695,96	3.931,56	31%	13.780,47	4.796,23	34,80%	21,99%
Belanja Operasi	8.695,17	3.094,75	13,32%	9.907,64	3.890,21	39,26%	25,70%
- Belanja Pegawai	5.295,15	2.245,55	16,54%	5.673,37	2.480,33	43,72%	10,46%
- Belanja Barang dan Jasa	3.120,4	783,31	8,58%	3.560,1	1.022,44	28,72%	30,53%
- Belanja Bunga	1,1	1,1	71,11%				
- Belanja Subsidi				0,14			
- Belanja Hibah	268,36	64,25	5,16%	663,41	386,66	58,28%	501,79%
- Belanja Sosial	10,16	,54	2,03%	10,62	0,79	7,45%	46,76%

Sumber: LRA LKPK dan LS KP Triwulan II Bengkulu 2023 - 2024

2.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Realisasi belanja modal pada Triwulan II- 2024 mencapai Rp275,17 miliar lebih kecil dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp286,25 miliar. Kontraksi sebesar 4,03% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal memiliki proporsi sebesar 5,74% dari total Belanja Daerah.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tentunya alokasi Belanja Modal dalam 3 tahun ke depan dapat ditingkatkan minimal 40 persen dari alokasi belanja daerah.

2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sampai dengan Triwulan II-2024, realisasi belanja tidak terduga baru mencapai Rp624,6 juta lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp628,38 juta.

2.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Realisasi Belanja Transfer pada tahun 2024 sebesar Rp630,22 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,74 persen dari tahun 2023. Belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memperhatikan target penerimaan pajak daerah dan memperhitungkan kelebihan penerimaan pajak daerah yang ada.

2.2.3. Surplus/Defisit APBD

Secara konsolidasian, pelaksanaan APBD Bengkulu sampai dengan Triwulan II TA 2023-2024 menunjukkan selalu terjadi Surplus, namun besaran surplus dari tahun 2023 sampai dengan 2024 semakin mengecil mengindikasikan terjadi sedikit perbaikan dalam perencanaan kas antara Penerimaan Kas dan Pengeluaran (Tahun 2024) meskipun masih belum pada tahap optimal. Dibandingkan dengan Triwulan II-2023, surplus Triwulan II-2024 meningkat sebesar Rp414,38 miliar



atau tumbuh 81,50%. Surplus sampai dengan Triwulan II-2024 tercatat Rp508,46 miliar.

Jika dirinci per pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Triwulan II 2023, berikut data surplus/defisit dari masing-masing pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu :

Tabel 2.20 Rincian Data Surplus/Defisit LKPD Triwulan II Tahun 2024 dari masing-masing Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu

No.	Pemda	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit	Ket.
1.	Provinsi Bengkulu	1.502.624.232.181	1.430.985.012.557	71.639.219.624	SURPLUS
2.	Bengkulu Utara	449.979.747.568	395.077.411.277	54.902.336.291	SURPLUS
3.	Bengkulu Selatan	416.782.507.895	409.219.937.925	7.562.569.970	SURPLUS
4.	Rejang Lebong	428.656.816.600	429.336.890.022	-680.063.422	DEFISIT
5.	Seluma	436.326.976.558	396.569.697.533	39.757.279.025	SURPLUS
6.	Kaur	254.835.609.149	243.081.345.872	11.754.263.277	SURPLUS
7.	Muko-Muko	392.043.349.453	380.300.119.863	11.743.229.590	SURPLUS
8.	Lebong	355.693.000.492	251.555.701.024	104.037.299.468	SURPLUS
9.	Kepahiang	271.015.265.559	217.084.669.074	53.930.596.485	SURPLUS
10.	Bengkulu Tengah	373.767.326.261	348.884.999.134	24.882.327.127	SURPLUS
11.	Kota Bengkulu	568.077.287.259	439.142.060.277	128.935.226.982	SURPLUS

Sumber: LRA LKPK dan LSKP Bengkulu 2023 - 2024

2.2.4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang harus dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari Rp214,13 miliar menjadi Rp350,35 miliar sementara pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan dari Rp66,89 miliar menjadi Rp2,0 miliar.

Tabel 2.21 Rincian Data Pembiayaan Daerah LKPD Triwulan II Tahun 2023 dan 2024 dari masing-masing Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu (Miliar Rupiah)

Uraian	2023			2024			Growth(%)
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pembiayaan Daerah	476,72	147,24	31,96%	497,65	348,35	70,00%	136,59%
Penerimaan Pembiayaan	425,83	214,13	67,75%	481,95	350,35	72,69%	63,62%
- SILPA	425,83	96,79	39,77%	481,95	178,99	37,14%	84,91%
- Pencairan Dana Cadangan	-	117,33	-	-	171,36	-	46,05%
- Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	50,88	66,89	36,73%	15,7	2,0	12,74%	-97,01%
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37,38	37,38	100,00%	-	-	-	-100,00%
- Pembentukan Dana Cadangan	-	27,71	-	-	-	-	-100,00%
- Penyertaan Modal Daerah	13,5	1,8	13,33%	15,7	2,0	12,74%	11,11%
- Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: LRA LKPK dan LSKP Bengkulu 2023 - 2024

2.2.5. Perkembangan BLU Daerah

Monitoring dan asistensi BLUD sebagai salah satu tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dimaksudkan agar BLUD memiliki kinerja pengelolaan keuangan dan proses bisnis yang baik sehingga mampu memberikan layanan publik yang berkualitas. Berdasarkan hasil monitoring dan asistensi BLUD yang dilaksanakan selama kurun waktu semester I tahun 2024, di lingkup wilayah provinsi Bengkulu terdapat 63 BLUD yang tersebar di 11 pemerintah daerah yang terdiri dari :

- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).....13 unit RSUD
- Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).....48 unit (Ranap dan regular)
- Pengelola Dana Bergulir1 unit
- Pengelola Air Minum1 unit

Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan target Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjadikan seluruh Puskesmas yang jumlahnya mencapai 179 unit menjadi BLUD. Mekanisme penyaluran BOK Puskemas dan klaim BPJS Kesehatan juga turut mendorong percepatan BLUD Puskesmas untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD karena dianggap lebih sesuai. Pada saat akhir tahu 2023 telah selesai dibangun RSUD Pratama Ippuh di Mukomuko yang bersumber dari anggaran DAK Fisik TA 2023 dan diharapkan mulai beroperasi mulai Agustus tahun 2024. Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menetapkan Puskesmas sebagai BLUD baru ada 3 (tiga) yaitu Kepahiang, Rejang Lebong, dan Lebong.

Dalam rangka monitoring dan asistensi pengelolaan keuangan BLUD, selama semester I Tahun 2024 Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Monitoring dan asistensi ke RSUD Mukomuko pada tanggal 19 Januari 2024
- b. Melakukan perjanjian kerja sama monitoring dan asistensi BLUD dengan Bupati Bengkulu Utara pada tanggal 22 Februari 2024
- c. Melakukan perjanjian kerja sama monitoring dan asistensi BLUD dengan Bupati Kepahiang pada tanggal 30 April 2024
- d. FGD dan benchmarking pengelolaan keuangan BLUD RSUD lingkup Provinsi Bengkulu bersama BPKP pada tanggal 20 Juni 2024

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa pengelolaan BLUD belum sepenuhnya melaksanakan praktik proses bisnis pengelolaan keuangan BLU sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu dampaknya adalah adanya kasus hukum yang timbul dari praktek pengelolaan keuangan BLUD yang tidak sehat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan BLUD di Provinsi Bengkulu, beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD di Provinsi Bengkulu diantaranya:

- Minimnya regulasi yang memayungi fleksibilitas pengelolaan BLUD,
- Keterbatasan SDM,
- Kurang dan atau beragamnya pemahaman pihak yang terlibat dalam pengelolaan BLUD baik pimpinan daerah, dinas pembina teknis, dinas pembina keuangan, serta
- Kurangnya tenaga di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD yang ada di lingkup masing-masing pemerintah daerah.

2.2.6. Isu Strategis Pelaksanaan APBD

Penyerapan Anggaran yang lambat merupakan permasalahan yang terjadi di setiap tahun, lambatnya serapan belanja APBD membuat perekonomian daerah tidak maksimal karena kurangnya stimulus untuk menggerakkan ekonomi sehingga berdampak juga pada perekonomian nasional. Beberapa Permasalahan yang dihadapi oleh Pemda pada Triwulan II Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Adanya beberapa pos pendapatan khususnya pendapatan transfer (TKD) yang belum salur sehingga penyerapan belanja barang maupun belanja modal tidak terealisasi secara optimal.
2. Beberapa kegiatan/ sub kegiatan baru dalam tahap perikatan (kontrak dengan pihak ketiga/ rekanan), belum dapat diselesaikan sampai tahap pencairan dana.



3. Perubahan sistem pengelolaan keuangan pada tahun 2024, sehingga OPD membutuhkan penyesuaian kembali untuk mengoperasikan sistem informasi keuangan daerah.
4. Proses administrasi, perijinan, pelelangan dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengadaan barang dan jasa yang tidak segera dilaksanakan pada awal-awal tahun yang selalu setiap tahunnya bertumpu di akhir tahun dan menunggu perubahan APBD.
5. Banyak kegiatan yang belum terlaksana yang disebabkan karena ketidaksesuaian dengan perencanaan anggarannya.

2.3. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Total pendapatan konsolidasian Provinsi Bengkulu triwulan II 2024 terealisasi sebesar Rp2,10 triliun belanja konsolidasian terealisasi sebesar Rp7,79 triliun, sehingga dari struktur tersebut menyisakan defisit anggaran sebesar Rp5,69 triliun. Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan netto yang terealisasi di triwulan II 2024 sebesar Rp348,34 miliar sehingga nilai Sisa Kurang Pembiayaan anggaran di Provinsi Bengkulu sebesar Rp-5,34 triliun.

Tabel 2.22 LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Bengkulu Triwulan II Tahun 2023 - 2024 (Miliar Rupiah)

Uraian	Trw. I 2023	Triwulan II 2024				
	Konsolidasi	Pusat	Daerah	Eliminasi	Konsolidasi	Growth%
Pendapatan	1.986,41	1.344,85	5.304,69	-4.544,79	2.104,75	5,96%
Penerimaan perpajakan	1.554,34	1.121,03	502,18	0	1.623,2	4,43%
PNBP	432,07	223,82	4.783,27	-4.544,79	462,3	7,00%
- Pendapatan SDA, Bagian Laba BUMN/D, PNBP lainnya, BLU/D	188,09	223,82	160,18	0	384	104,16%
- Bantuan Keuangan	57,65	0	25,1	0	25,1	-56,46%
- Penerimaan Hibah	-	0	0	0	0	
- Pendapatan Transfer	-	0	4.598	-4.544,79	53,21	
Belanja	7.160,27	7.545,81	4.796,23	-4.544,79	7.797,25	8,90%
Belanja Pegawai	319,4	1.118,72	2.480,33		3.599,05	1026,80%
Belanja Barang dan Jasa	1.533,52	993,86	1.022,44		2.016,3	31,48%
Belanja Modal	551,83	245,28	275,17		520,45	-5,69%
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	1,1	0	0		0	
Belanja Subsidi		0	0		0	
Belanja Hibah	64,25	0	386,66		386,66	501,79%
Belanja Bantuan Sosial	8,99	10,55	,79		11,34	26,19%
Belanja Lain-lain	0,63		,62		,62	-0,59%
Belanja Transfer	1.805,92	5.177,4	630,22	-4.544,79	1.262,83	-30,07%
Surplus/Defisit Anggaran	-5.173,87	-6.200,96	508,46		-5.692,5	10,02%



Pembiayaan	147,24	0	348,35	348,35	136,59%
Penerimaan Pembiayaan Drh	214,13	0	350,35	350,35	63,62%
Pengeluaran Pembiayaan Drh	66,89	0	2,0	2,0	-97,01%
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	-5.026,63	-6.200,96	856,81	-5.344,15	6,32%

Sumber: LRA konsolidasian Tingkat Wilayah & LSKP Tk Wilayah Triwulan II tahun 2023 - 2024

2.3.1 Pendapatan Konsolidasian

Analisis kontribusi pendapatan konsolidasian terhadap pendapatan total konsolidasian. Pada triwulan II 2024 realisasi pendapatan konsolidasian mencapai Rp2,10 triliun. Dimana penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama pendapatan konsolidasian dengan realisasi mencapai Rp1,62 triliun menyumbangkan 77,12 persen dari total pendapatan konsolidasian. Selanjutnya diikuti oleh penerimaan PNPB dengan realisasi mencapai Rp462,3 miliar atau 21,96 persen dari total pendapatan konsolidasian.

Analisis Pertumbuhan (Growth) Komponen pendapatan konsolidasian. Pada Triwulan II 2024 realisasi pendapatan konsolidasian tumbuh positif jika dibandingkan triwulan II 2023 yaitu sebesar 5,96 persen, dimana pada triwulan II 2023 terealisasi sebesar Rp1,98 triliun menjadi Rp2,14 triliun pada triwulan II 2024. Pertumbuhan ini tidak lepas dari kenaikan penerimaan PNPB sebesar 7,00 persen atau Rp30,23 miliar dan penerimaan perpajakan sebesar 4,43% atau Rp68,82.

Analisis Tax Ratio konsolidasian. Dengan realisasi penerimaan pajak konsolidasian sebesar Rp1,62 triliun maka tax ratio pajak konsolidasian triwulan II 2024 menjadi 6,11 persen atau turun dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.23 Analisis Tax Ratio Pajak Konsolidasian Provinsi Bengkulu triwulan II Tahun 2024

Tahun	Real Pener. Pajak (triliun)	PDRB (ADHB) (triliun)	Tax Ratio
2023	1,55	24,36	6,36%
2024	1,62	26,50	6,11%

Sumber: LRA konsolidasian Tingkat Wilayah & LSKP Tk Wilayah Triwulan II tahun 2023 - 2024

2.3.2 Belanja Konsolidasian

Analisis komposisi komponen Belanja Pemerintah terhadap total Belanja konsolidasian. Setelah dilakukan konsolidasi belanja antara pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah, diketahui bahwa belanja pemerintah pusat triwulan II 2024 yang terealisasi sebesar Rp7,54 triliun memberi andil terbesar dengan porsi sebesar 61,14 persen dari total belanja konsolidasian, sisanya belanja pemerintah daerah dengan realisasi sebesar Rp4,796,23 miliar atau 38,86 persen dari total belanja konsolidasian. Pada belanja konsolidasi dilakukan eliminasi terhadap akun yang bersifat resiprokal pada LRA Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar Rp4,54 triliun yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lainnya Pemerintah Daerah.

Analisis pertumbuhan (growth) Belanja Pemerintah dan TKDD. Pada triwulan II 2024 realisasi belanja konsolidasian tumbuh sebesar 8,90 persen dibandingkan triwulan II tahun 2023. Kenaikan ini dikontribusi oleh naiknya belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja hibah.

Analisis rasio Belanja Pemerintah Konsolidasian terhadap PDRB. Pada triwulan II 2024 rasio belanja konsolidasian sama dibandingkan tahun 2023.



Tabel 2.24 Analisis Rasio Belanja Konsolidasian Provinsi Bengkulu triwulan II Tahun 2023

Tahun	Realisasi Belanja Konsolidasi (miliar)	PDRB (ADHB) (miliar)	Rasio Belanja
2023	7.16	24.36	29,39 %
2024	7.79	26.50	29,39 %

Sumber: LRA konsolidasian Tingkat Wilayah & LSKP Tk Wilayah Triwulan II tahun 2023 - 2024.

2.3.3. Surplus/Defisit Konsolidasian

Kinerja konsolidasian APBN - APBD triwulan II 2024 memperlihatkan nyatanya *deficit spending* di Provinsi Bengkulu dengan nilai sebesar Rp5,69 triliun yang mengalami kenaikan secara yoy dibanding triwulan yang sama tahun 2023 sebesar 10,02 persen. Hal ini mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah di Provinsi Bengkulu terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

2.3.4 Pembiayaan Konsolidasian

Analisis pertumbuhan pembiayaan konsolidasian. Pada triwulan II 2024 pembiayaan konsolidasian mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 136,59 persen jika dibandingkan tahun 2023. Pembiayaan pada triwulan II, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp350,35 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2 miliar.

"Sejarah bisa saja memberi makna sesuatu untuk kita semua. Sejarah akan memberikan pelajaran berharga, tak peduli seberapa baiknya kita, kita tidak akan bisa bertahan lama jika tidak didukung oleh elemen yang lengkap sejak awal. Sebuah perubahan dan juga gebrakan tidak akan mampu bertahan, jika tidak didukung dengan maksimal."

Sri Mulyani Indrawati

BAB III

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN TRANSFER KE DAERAH



**Monitoring dan Evaluasi Dana Desa pada Desa Lubuk Saung,
Kabupaten Bengkulu Utara**

Dalam rangka implementasi harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah yang sejalan dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

bengkulu  natural



Taman di Kabupaten Bengkulu Utara ini berfungsi sebagai pelestarian populasi gajah sumatera yang terancam. Dengan bentangan sungai dan padang rumput yang indah, disini kita bisa menikmati keindahan alam ala safari di Afrika.

TAMAN WISATA
Alam Seblat

03

Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

“Harmonisasi belanja Pemerintah Pusat dan TKD menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat”

Dalam rangka membangun harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah yang sejalan dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan menetapkan SOP Link 70 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD). Sinergi antara Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menjadi sangat penting dalam mengawal harmonisasi belanja pemerintah pusat dan TKD. Adapun poin utama dalam SOP Link 70 tahun 2023 antara lain: 1) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. SOP ini bertujuan untuk mengharmonisasikan belanja pusat dengan belanja daerah, terutama dalam hal belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di tingkat wilayah; 2) Koordinasi dan Efisiensi Pengeluaran, SOP ini fokus pada koordinasi dan efisiensi pengeluaran antara pemerintah pusat dan daerah.

Adapun peran dari masing-masing unit di lingkungan Kementerian Keuangan dalam SOP Link 70 tahun 2023 yaitu: 1) Peran DJA dalam monev berupa identifikasi kelengkapan dan kesesuaian lokus pada belanja K/L dan identifikasi Rincian Output yang harmonis dengan DAK Fisik; 2) Peran DJPK berupa identifikasi kelengkapan dan kesesuaian lokus pada belanja DAK Fisik, identifikasi potensi duplikasi pendanaan antara belanja K/L, dan DAK Fisik; dan 3) Peran DJPb dalam hal ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi berupa :

1. **Reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian output harmonis.**

Reviu kinerja realisasi anggaran Kementerian/Lembaga dan capaian output harmonis dengan Transfer Keuangan Daerah merupakan proses evaluasi yang penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan kepada kementerian dan daerah digunakan secara efektif dan efisien dan saling mendukung dalam tercapainya output yang diharapkan. Berikut adalah beberapa langkah dan aspek penting dalam proses reviu ini:

a. **Evaluasi Kinerja Realisasi Anggaran Kementerian**

Merupakan proses sistematis untuk menilai bagaimana kementerian menggunakan anggaran yang diberikan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana serta peraturan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah dan aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kinerja realisasi anggaran kementerian

b. **Capaian Output Harmonisasi Transfer Keuangan Daerah**

Merupakan parameter yang dapat digunakan sebagai evaluasi dari sejauh mana transfer keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Harmonisasi dalam konteks ini berarti memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta menghasilkan output yang diinginkan.



2. Analisis permasalahan harmonisasi belanja pemerintah pusat yang mendukung DAK Fisik.

Harmonisasi belanja pemerintah pusat yang mendukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik melibatkan koordinasi dan integrasi antara alokasi dan penggunaan dana dari pemerintah pusat dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Permasalahan dalam harmonisasi ini dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai.

3. Identifikasi Upaya Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah.

Harmonisasi antara belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik oleh Pemerintah Daerah merupakan upaya penting dalam memastikan alokasi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan berjalan sinergis dan efektif.

Upaya harmonisasi atau sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan belanja TKD merupakan bagian dari upaya mensinergikan belanja kementerian/lembaga dengan belanja TKD sehingga terjadi keselarasan dan saling melengkapi serta untuk menghindari terjadinya duplikasi pembiayaan oleh dua entitas yang berbeda. TKD yang ditransfer ke daerah tersebut diarahkan pada beberapa hal, yaitu meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta membangun harmonisasi belanja pusat dan daerah; memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; memperkuat penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung sektor-sektor prioritas; meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat [1]

3.1 Gambaran Umum Harmonisasi Belanja KL/DAK Fisik di Tingkat Wilayah

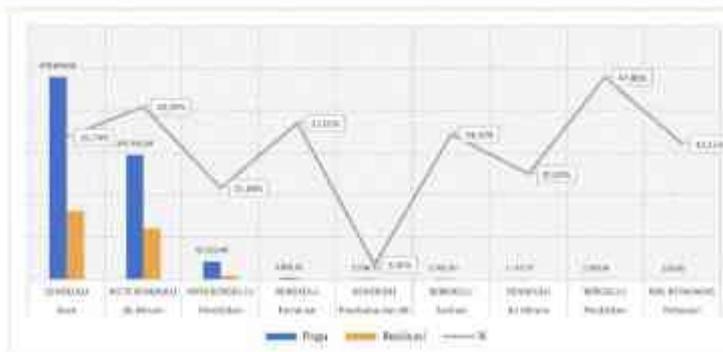
Harmonisasi belanja Kementerian Negara Lembaga di Provinsi Bengkulu dengan Belanja DAK Fisik yang dialokasikan kepada 11 pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

- 1) Harmonisasi belanja KL/DAK Fisik difokuskan pada 4 Kementerian negara Lembaga dan 6 bidang DAK Fisik antara lain: (1) Bidang Air Minum; (2) Bidang Jalan; (3) Bidang Kesehatan dan KB; (4) Bidang Pendidikan; (5) Bidang pertanian; dan 6) Bidang Sanitasi.
- 2) Kementerian negara dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran dalam upaya harmonisasi DAK Fisik antara lain: (1) Kementerian Pertanian; (2) Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Riset dan Teknologi; (3) Kementerian Kesehatan; dan (4) Kementerian PUPR.
- 3) Data monitoring dan evaluasi harmonisasi belanja yang dielaborasi menurut data hasil monitoring kinerja belanja KL-DAK Fisik Harmonis di Provinsi Bengkulu di tahun 2024 sebesar Rp828,52 Miliar dengan capaian realisasi samapi dengan periode akhir Juni 2024 sebesar 35,59 persen.

3.2 Alokasi Belanja K/L yang Mendukung DAK Fisik

Sampai dengan periode akhir triwulan II tahun 2024 bahwa alokasi belanja pada Kementerian/Lembaga di Provinsi Bengkulu yang mendukung DAK Fisik tersebar di 3 Pemerintah Daerah yaitu: Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang, dengan sebaran 6 Bidang Harmonisasi DAK Fisik. Dari keenam bidang tersebut, untuk Bidang Jalan mendapatkan alokasi dana terbesar dengan pagu Rp 479,06 Miliar sedangkan untuk Bidang Sanitasi mendapatkan alokasi paling sedikit dengan nilai pagu Rp2,06 Miliar.

Grafik 3.1. Pagu dan Realisasi Belanja KL RO Harmonis yang Mendukung DAK Fisik



Sumber : Aplikasi Sintesa dan Aplikasi OMSPAN

Alokasi Belanja K/L di Provinsi Bengkulu masih menitikberatkan di bidang jalan, dan diprioritaskan pada jalan nasional atau Provinsi, sehingga unit pengampu bidang ini berlokasi di ibukota provinsi. Berdasarkan press release dari BPS Provinsi Bengkulu bahwa Panjang jalan negara dan nasional di Provinsi Bengkulu sekitar 4.224 KM [2], jalan nasional ini menghubungkan Bengkulu dengan provinsi lain di Sumatera dan merupakan jalur utama transportasi antar daerah, sehingga sangat vital, mengingat perekonomian Provinsi Bengkulu Sebagian besar masih mengandalkan dari daerah luar Bengkulu.

3.2.1 Analisis Perbandingan Antar Rincian Output (RO) Harmonis

Jika dibandingkan alokasi pagu belanja Kementerian/Lembaga(K/L) per RO dengan alokasi TKD DAK Fisik di Provinsi Bengkulu, bahwa alokasi belanja K/L hanya terdiri dari 6 Bidang dari 11 Bidang TKD DAK Fisik, antara lain: Air Minum, Jalan, Kesehatan dan KB, Pendidikan, Pertanian dan Sanitasi. Keenam bidang tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dari TKD DAK Fisik di daerah.

Nilai Alokasi Pagu dari Belanja K/L yang didasarkan RO Harmonis TKD DAK Fisik sebesar Rp828,52 Miliar dengan capaian realisasi sampai dengan akhir triwulan II 2024 sebesar 35,59 persen. Sedangkan untuk alokasi pagu dari TKD DAK Fisik sebesar Rp1.089 Triliun dengan capaian realisasi sebesar 6,74 persen, capaian TKD DAK Fisik diperiode triwulan II tahun 2024 masih sangat rendah karena beberapa kendala diantaranya adanya perubahan regulasi penyaluran yang berakibat pemerintah daerah harus dapat segera menyesuakannya.

Sampai dengan akhir triwulan II 2024 progres capaian Belanja K/L yang cukup optimal ada pada bidang Air Minum 40,84 persen, bidang ini cukup baik kinerjanya dalam penyediaan infrastruktur ketersediaan air minum untuk masyarakat. Begitu juga pada bidang yang mendapatkan alokasi pagu terbesar yaitu Bidang Jalan, capaian realisasinya sebesar 33,74 persen. Bidang Jalan ini merupakan program Prioritas Nasional dalam membangun infrastruktur jalan nasional dalam mendukung konektivitas antar daerah, sebab selama ini perekonomian di Bengkulu masih banyak ditopang produk dari luar daerah.

Tabel 3.1. **Perbandingan Belanja KL RO Harmonis yang Mendukung DAK Fisik**

No	Bidang (Dutaan Rp)	Belanja K/L (RO Harmonis)			TKD DAK Fisik		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Air Minum	296.475,71	121.079,71	40,84%	96.589,27	12.499,83	12,94%
2	Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	-	7.500,00	0,00	-
3	Irigasi	0,00	0,00	-	35.643,25	6.533,94	18,33%
4	Jalan	479.059,90	161.634,41	33,74%	193.739,46	39.207,97	20,24%
5	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	-	27.361,49	1.243,49	4,54%
6	Kesehatan dan KB	2.538,71	88,75	3,50%	365.548,38	1.476,87	0,40%
7	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	-	1.931,63	0,00	-
8	Pariwisata	0,00	0,00	-	3.654,39	0,00	-
9	Pendidikan	44.226,85	9.850,22	22,27%	322.995,45	10.460,62	3,24%
10	Pertanian	4.169,31	1.526,05	36,60%	34.271,88	1.943,22	5,67%
11	Sanitasi	2.050,00	704,56	34,37%	0,00	0,00	-
Total		828.520,48	294.883,70	35,59%	1.089.235,19	73.365,94	6,74%

Sumber : Aplikasi Sintesa dan Aplikasi OMSPAN

Alokasi belanja KL yang termasuk dalam RO Harmonis dengan belanja DAK Fisik tingkat wilayah di Provinsi Bengkulu diharapkan saling selaras dan memberikan dukungan pada bidang masing-masing sesuai klasterisasi Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu (khususnya pada belanja APBN), Namun masih ada bidang pada belanja K/L yang belum dianggarkan pada DAK Fisik antara lain: Industri Kecil dan Menengah, Irigasi, Kelautan dan Perikanan, Kesehatan dan KB, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata. Adapun untuk analisis dari masing-masing bidang pada belanja K/L dan DAK Fisik antara lain:



1. Pada Kategori Air Minum, belanja K/L dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui satker-nya di daerah untuk kegiatan penyelenggaraan air minum yang layak. Selaras pula dengan Bidang Air Minum DAK Fisik untuk pelaksanaan kegiatan pada subbidang Air Minum dengan rata-rata capaian output 12,94 persen.
2. Belanja K/L pada Kategori Jalan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. Sementara itu pada Bidang Jalan DAK Fisik terdapat pelaksanaan kegiatan pemenuhan prasarana jalan dalam rangka pemenuhan kegiatan di subbidang jalan regular dengan rata-rata capaian output sebesar 20,24 persen.
3. Pada Kategori Kesehatan & KB, sebagian besar pelaksanaan kegiatan APBN dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan sebagian kecil BKKBN. Beberapa kegiatan antara lain pada pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga, promkes dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, hingga pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga. Beberapa kegiatan yang selaras dengan DAK Fisik pada Bidang Kesehatan & KB antara lain Kefarmasian, Keluarga Berencana, Pengendalian Penyakit, Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Penguatan Percepatan Penurunan Stunting dan Penguatan Sistem Kesehatan. Rata-rata capaian output pada Bidang Kesehatan & KB adalah 3,5 persen.
4. Pada Kategori Pendidikan, sebagian besar kegiatan APBN dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta sebagian lagi pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pertanian untuk vokasi penyuluhan pertanian. Sebagian besar kegiatan APBN berupa penguatan-penguatan pada lembaga pendidikan tinggi dan vokasi. Sementara itu, satuan pendidikan yang lebih rendah dialokasikan melalui DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk kegiatan-kegiatan pada subbidang PAUD, SD, SKB, SLB, SMP, SMK, SMK serta Perpustakaan. Berdasarkan penjelasan ini bahwa belanja pemerintah baik dari APBN maupun DAK Fisik telah secara komplementer memenuhi pembiayaan pada seluruh jenjang pendidikan.
5. Pada Kategori Pertanian, Belanja K/L dilaksanakan seluruhnya oleh Kementerian Pertanian melalui satker DK/TP di Daerah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengelolaan air irigasi, perluasan & perlindungan lahan pertanian, pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, fasilitasi pembiayaan pertanian, penyelenggaraan karantina pertanian, dan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian. Sementara itu, pada Bidang Pertanian DAK Fisik dialokasikan untuk membiayai kegiatan tematik untuk pengembangan food estate dan sentra produksi pangan.
6. Selanjutnya pada kategori Sanitasi pada belanja K/L juga dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam kegiatan penyelenggaraan sanitasi yang layak. Namun pada alokasi DAK Fisik bidang ini belum dianggarkan oleh Pemerintah daerah karena keterbatasan fiskal yang dimiliki.

Sinkronisasi belanja Pemerintah Pusat dan Daerah mutlak dilakukan agar arah pembangunan negara dapat dicapai secara terpadu oleh seluruh lini pemerintahan, termasuk antara DAK Fisik dan APBN. Oleh sebab itu, untuk mempermudah analisis dan pemetaan sinkronisasi belanja, perlu dilakukan klusterisasi atau perumusan nomenklatur Bidang/Kategori yang selaras pada belanja-belanja pemerintah sehingga secara umum dapat dikelompokkan dan diperbandingkan sesuai kategori/bidang yang sama.

3.2.2 Analisis Antara RO Harmonis dengan Total Alokasi Belanja K/L Tingkat Wilayah

Alokasi belanja K/L sebagai pengampu RO Harmonis DAK Fisik di Bengkulu terdiri dari 4 Kementerian/Lembaga, dengan total alokasi belanja sebesar Rp828,52 Miliar atau 43,17 persen dari total pagu Kementerian/Lembaga. Satker yang mendapatkan alokasi belanja sebanyak 36 Satker, didominasi oleh satker lingkup Kementerian PUPR sebanyak 14 satker. Dan total jumlah RO kegiatan sebanyak 353 RO dimana Kementerian PUPR masih mendominasi dengan jumlah RO sebanyak 125.

“Korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak merupakan masalah global, tidak hanya tantangan bagi negara berkembang.”

Sri Mulyani Indrawati



Tabel 3.2. Alokasi Anggaran K/L Secara Umum

NO	Kementerian/Lembaga (Jutaan Rp)	Pagu yang Mendukung DAK Fisik	Total Pagu	Porsi (%)	Jumlah Satker	Jumlah RO
1	016 KEMENTERIAN PERTANIAN	4.169,31	31.897,52	13,07%	13	67
2	023 KEMENTERIAN DIKBUD, R & T	44.226,85	609.867,05	7,25%	6	54
3	024 KEMENTERIAN KESEHATAN	2.538,71	91.359,36	2,78%	3	107
4	033 KEMENTERIAN PUPR	777.585,62	1.186.183,14	65,55%	14	125
Total		828.520,48	1.919.307,07	43,17%	36	353

Sumber : Aplikasi Sintesa dan Aplikasi OMSPAN

Porsi alokasi pagu belanja K/L yang mendukung DAK Fisik sampai dengan triwulan II tahun 2024 dibandingkan total pagunya cukup signifikan, hal ini sebagai wujud dukungan dalam harmonisasi DAK Fisik di daerah.

- 1. Kementerian PUPR**, mendapatkan alokasi pagu terbesar pertama dengan nilai pagu Rp777,59 Miliar atau 65,55 persen dari total pagu yang dimiliki oleh satker lingkup Kementerian PUPR di Bengkulu dengan jumlah Satker sebanyak 14 satker yang terdiri dari 125 RO pada DIPA;
- 2. Kementerian Dikbud**, Riset dan Teknologi, alokasi pagu belanja yang mendukung DAK Fisik sebesar Rp44,27 Miliar atau dengan porsi 7,25 persen dari total pagunya, dengan jumlah satker sebanyak 6 satker dan 54 RO;
- 3. Kementerian Pertanian**, Alokasi pagu sebesar Rp4,17 Miliar atau 13,07 persen dari total pagunya, dengan jumlah satker sebanyak 13 satker dan jumlah RO 67;
- 4. Kementerian Kesehatan**, mendapatkan alokasi pagu belanja pendukung DAK Fisik terkecil sebesar Rp2,54 Miliar atau 2,78 persen dari porsi total pagunya, dengan jumlah satker sebanyak 3 satker dan 107 RO.

3.2.3 Analisis Alokasi Belanja K/L Per Bidang

Pada setiap Kementerian/Lembaga mempunyai alokasi anggaran pendukung DAS Fisik sesuai dengan tugas pokoknya, hal ini tercermin dari masing-masing bidang. Untuk Bidang Air Minum, Sanitasi dan Jalan diampu oleh Kementerian PUPR, Bidang Kesehatan dibebankan pada Kementerian Kesehatan dan KB, Bidang Pendidikan diampu oleh Kementerian Dikbud, Ristek dan Teknologi, sedangkan Kementerian Pertanian menangani Bidang Pertanian.

Progres capaian realisasi belanja K/L pendukung DAK Fisik sampai dengan triwulan II tahun 2024 mencapai 35,59 persen, hal ini dirasa belum optimal mengingat diperiode pertengahan tahun 2024 seyogyanya sudah terserap diatas 50 persen. Namun diharapkan diperiode triwulan berikutnya diharapkan dapat diakselerasi agar capaian kinerjanya lebih baik.

Tabel 3.3. Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

No	Nama Bidang	Kementerian/Lembaga (Jutaan Rp)	Pagu	Realisasi	%	Jml Satker	Jml RO
1	Air Minum	KEMENTERIAN PUPR	296.475,71	121.079,71	40,84%	4	5
2	Jalan	KEMENTERIAN PUPR	479.059,90	161.634,4	33,74%	3	21
3	Kesehatan & KB	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.538,71	88,75	3,50%	1	22
4	Pendidikan	KEMENTERIAN DIKBUD, R & T	44.226,85	9.850,22	22,27%	3	7
5	Pertanian	KEMENTERIAN PERTANIAN	4.169,31	1.526,05	36,60%	7	15
6	Sanitasi	KEMENTERIAN PUPR	2.050,00	704,56	34,37%	1	1
Total			828.520,48	294.883,70	35,59%	19	71

Sumber : Aplikasi Sintesa dan Aplikasi OMSPAN



Berdasarkan Tabel 3.3 Satker vertikal pada Kementerian/Lembaga sebagai pengampu masing-masing bidang pendukung DAK Fisik berjumlah 19 satker dengan sebaran RO pada DIPAnya sebanyak 71 RO. Satker terbanyak terdapat pada satker lingkup Kementerian PUPR, hal ini seiring dengan nilai alokasi pagu belanja yang dimiliki lebih besar dibandingkan Kementerian lain. Analisis alokasi Belanja pada setiap Bidang di Kementerian/Lembaga antara lain:

- 1. Kementerian PUPR**, Alokasi belanja sebagai pendukung DAK Fisik tersebar pada 3 Bidang, yaitu:
 - a. Bidang Air Minum, untuk alokasi pagu belanja bidang Air Minum sebesar Rp296,48 Miliar dengan capaian realisasi 4,84 persen dari pagu. Bidang ini diampu oleh 4 satker dengan jumlah RO sebanyak 5 RO;
 - b. Bidang Jalan, pada bidang jalan mendapatkan alokasi pagu belanja terbesar dibandingkan dengan bidang lain, sebesar Rp479,06 Milliar, dengan serapan realisasi sebesar 33,74 persen dari pagu. Alokasi belanja tersebar pada 3 Satker dengan 21 RO;
 - c. Bidang Sanitasi, pada bidang sanitasi mendapatkan alokasi belanja terkecil dibandingkan bidang lain, dengan nilai sebesar Rp2,05 Miliar, serapan realisasi 34,37 persen, dan bidang ini hanya diampu oleh satu Satker;
- 2. Kementerian Dikbud, Riset dan Teknologi**, sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang Pendidikan, maka satker lingkup Kementerian Dikbud, Riset dan Teknologi yang berjumlah 3 Satker mengampu bidang ini, alokasi belanjanya sebesar Rp44,23 Miliar dengan serapan realisasi sebesar 22,27 persen.
- 3. Kementerian Pertanian**, alokasi belanja pada bidang pertanian sebesar Rp4,17 Miliar dengan serapan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 36,60 persen dari pagu, tersebar pada 7 satker sebagai pengampu dan dibebankan pada 15 RO diDIPA.
- 4. Kemeterian Kesehatan dan KB**, Pada bidang Kesehatan hanya terdiri dari 1 satker dengan alokasi belanja tidak begitu signifikan nilainya dibandingkan bidang lain, capaian realisasi sampai dengan triwulan II masih sangat rendah sebesar 3,50 persen dari pagu belanja Rp2,54 Miliar. Alokasi belanja K/L di bidang ini hanya sebagai pendukung DAK Fisik yang cukup besar Rp365,55 Miliar sehingga nilainya tidak signifikan.

3.2.4 Distribusi/Sebaran RO Harmonis Tingkat Wilayah Bidang Air Minum

Alokasi pagu belanja RO Harmonis pada Bidang Air Minum di Bengkulu tersebar pada 5 RO, dengan total alokasi belanja sebesar Rp296,48 Miliar dan sampai dengan triwulan II 2024 sebesar 40,84 persen dari pagu. Capaian serapan realisasi pada Bidang air minum cukup optimal, namun ada beberapa RO yang kinerjanya masih kurang baik yaitu RO Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat 1,29 persen, hal ini karena adanya proses pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dan diproyeksikan di triwulan III akan terealisasi.

Tabel 3.4. **Alokasi Anggaran K/L per RO berdasarkan Bidang Air Minum**

No	Nama RO (Dutaan Rupiah)	Satuan	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Vol RO	Real RO	% Capaian RO
Bidang Air Minum								
1	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	SR	5.425,44	69,91	1,29%	1920	0	0,00%
2	Jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan	Km	18.648,42	10.371,20	55,61%	15	1,85	12,33%
3	Jaringan air baku yang dioperasikan dan dipelihara	unit	5.494,76	2.184,02	39,75%	12	4,16	34,67%
4	Pembangunan SPAM Regional	Liter/detik	265.764,72	108.168,70	40,70%	400	100	25,00%
5	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Daerah	1.142,37	285,88	25,02%	10	10	100,00%
Total			296.475,71	121.079,71	40,84%			

Sumber: Aplikasi Sintesa dan Aplikasi OMSPAN



Berdasarkan data sebaran RO Harmonis Bidang Air Minum tersebut di atas, beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja K/L RO Harmonis pada Bidang Air Minum tersebar di 5 RO, dengan alokasi pagu total Rp296,48 Miliar dan tingkat serapan realisasi sebesar 40,84 persen;
2. RO Pembangunan SPAM Regional mendapatkan alokasi pagu belanja terbesar dibandingkan RO yang lain, sebesar Rp265,77 Miliar dengan capaian realisasi sebesar 40,70 persen dari pagu. Namun capaian kinerja RO nya masih belum optimal dengan baik 25 persen;
3. RO Jaringan air baku yang dibangun/ditingkatkan mendapatkan alokasi terbesar kedua sebesar Rp18,65 Miliar, dan diantara RO yang lain maka RO ini kinerjanya paling optimal 55,61 persen dan diharapkan diperiode berikutnya dapat ditingkatkan lagi;
4. RO Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat, merupakan RO pada bidang Air Minum yang kinerjanya kurang optimal, dengan alokasi pagu belanja sebesar Rp5,43 Miliar dengan serapan realisasi sebesar 1,29 persen dan capaian RO nya masih 0,00 persen;
5. Tantangan dan hambatan yang dialami berdasarkan aspek penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), Eksekusi Kegiatan, Regulasi dan SDM adalah sebagai berikut :

a. Penganggaran

- Blokir Anggaran dan Revisi : Terdapat blokir anggaran AA s.d. Juni 2024, dan masih dalam proses pembukaan blokir dengan berkoordinasi Eselon I terkait.
- Potensi pagu minus pada belanja modal akibat sisa lelang sistem lelang, paket non kontraktual sebesar Rp800 jutaan. Hal ini karena adanya kesalahan sistem.

b. Pengadaan Barang dan Jasa

- Proses Pengadaan barang dan jasa masih dalam tahap lelang dan diproyeksikan akan segera selesai dibulan Juli sehingga penyelesaian pekerjaan akan tuntas ditriwulan III tahun 2024.

c. Eksekusi Kegiatan

- Faktor luar: masih adanya bahan material yang harus didatangkan dari luar Bengkulu sehingga membutuhkan waktu yang lebih dalam proses penyelesaian pekerjaan.

d. Regulasi

- Koordinasi dengan Kantor pusat Kementerian PUPR terkait penyamaan persepsi tentang aturan teknis dalam pekerjaan.

e. SDM

- Jika terjadi keterlambatan SK pengangkatan atas perubahan pejabat baru dalam pengelola keuangan atau pejabat pengadaan barang dan jasa diterbitkan oleh kantor pusat Kementerian

3.2.5 Distribusi/Sebaran RO Harmonis Tingkat Wilayah Bidang Jalan

Alokasi belanja RO Harmonis pada Bidang Jalan di Bengkulu tersebar pada 9 RO, dengan total alokasi pagu belanja sebesar Rp479,06 Miliar dan sampai dengan triwulan II 2024 sebesar 33,74 persen dari pagu. Capaian serapan realisasi pada Bidang Jalan cukup optimal, namun ada beberapa RO yang kinerjanya masih kurang baik yaitu RO Jalan Strategis (ProPN) 20,39 persen dan RO Preservasi Rutin Jembatan dengan serapan masih 0,00 persen, hal ini karena adanya proses pelaksanaan kegiatan yang masih sedang berjalan dan diproyeksikan ditriwulan III akan terealisasi.

Tabel 3.5. **Alokasi Anggaran K/L per RO berdasarkan Bidang Jalan**

No	Nama RO (Dutaan Rujlah)	Satuan	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Val RO	Real RO	% Capaian RO
Jalan								
1	Jalan Strategis (ProPN)	Km	3136,97	6.349,42	20,39%	523	0	0,00%
2	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Puluh Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (18P3T)	Km	136580,8	65104,24	47,68%	2552	14	54,84%
3	Penggantian Jembatan	m	21.386,35	4.107,73	19,48%	99	11,97	12,40%
4	Preservasi Jembatan	m	30.878,54	12.474,74	24,76%	1014,2	20,2	13,06%
5	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	6433,86	19.652,81	30,4%	342,67	114,9	33,51%
6	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	Km	13.400,05	510,84	3,81%	435,75	1873	39,25%
7	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	114.934,75	43.849,74	29,59%	13	2,72	37,26%
8	Preservasi Rutin Jembatan	m	24,89	0,00	0,00%	21,8	3,68	1,74%
9	Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	m	569610	2.914,78	0,08%	8921,6	2701,2	30,27%
Total			479010,90	111634,41	23,3%			

Sumber : Aplikasi Sintesa dan Aplikasi OMSPAN





Berdasarkan data sebaran RO Harmonis Bidang Jalan tersebut di atas, beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja K/L RO Harmonis pada Jalan tersebar di 9 RO, dengan alokasi pagu total Rp479,06 Miliar dan tingkat serapan realisasi sebesar 33,74 persen;
2. RO Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan mendapatkan alokasi pagu belanja terbesar dibandingkan RO yang lain, sebesar Rp154,94 Miliar dengan capaian realisasi masih belum optimal sebesar 29,59 persen dari pagu dan capaian kinerja RO nya 37,26 persen;
3. RO Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) mendapatkan alokasi terbesar kedua sebesar Rp136,58 Miliar, dan diantara RO yang lain maka RO ini kinerjanya paling optimal 47,68 persen serta capaian RO nya 54,84 persen dan diharapkan diperiode berikutnya dapat ditingkatkan lagi;
4. RO Preservasi Rutin Jembatan, merupakan RO pada bidang Jalan yang kinerjanya paling kurang optimal, dengan alokasi pagu belanja sebesar Rp24,69 Juta dengan serapan realisasi masih 0,00 persen;
5. Tantangan dan hambatan pada Bidang Jalan berdasarkan aspek penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), Eksekusi Kegiatan, Regulasi dan SDM adalah sebagai berikut :
 - a. Penganggaran
 - Blokir Anggaran dan Revisi : Masih adanya blokir anggaran AA s.d. Juni 2024, dan masih dalam proses pembukaan blokir dengan berkoordinasi Eselon I terkait.
 - Pemblokiran terjadi karena masih adanya dokumen persyaratan yang masih perlu dilengkapi.
 - Adanya penambahan dana belanja barang dan modal untuk program IJD (inpres jalan daerah), anggaran tersebut sebagai tambahan belanja penanganan mendesak tanggap darurat bencana alam.
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa
 - Ada beberapa program kegiatan yang masih dalam proses tahap lelang dan diproyeksikan akan segera selesai dibulan Juli sehingga penyelesaian pekerjaan akan tuntas ditriwulan III tahun 2024.
 - c. Eksekusi Kegiatan
 - Faktor luar: masih adanya bahan material yang harus didatangkan dari luar Bengkulu sehingga membutuhkan waktu yang lebih dalam proses penyelesaian pekerjaan.
 - Terdapat kendala pada pembangunan jalan enggano 3 karena ada permasalahan perizinan pemakaian material, batu krokos sehingga diperlukan perizinan kepada pihak terkait;
 - Adanya demo oleh masyarakat sekitar sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan
 - d. Regulasi
 - Koordinasi dengan Kantor pusat Kementerian PUPR terkait penyamaan persepsi tentang aturan teknis dalam pekerjaan.
 - Target penyerapan anggaran 50 persen belum tercapai, sebab pada Kementerian PUPR ada arahan tentang kebijakan target penyerapan di triwulan II 2024 sebesar 47 persen.
 - e. SDM
 - Jika ada keterlambatan SK pengangkatan atas perubahan pejabat baru dalam pengelola keuangan atau pejabat pengadaan barang dan jasa diterbitkan oleh kantor pusat Kementerian PUPR.

3.2.6 Distribusi/Sebaran RO Harmonis Tingkat Wilayah Bidang Kesehatan dan KB

Alokasi belanja RO Harmonis pada Bidang Kesehatan dan KB di Bengkulu tersebar pada 22 RO, dengan total alokasi pagu belanja sebesar Rp2,54 Miliar dan sampai dengan triwulan II 2024 sebesar 3,50 persen dari pagu. Capaian serapan realisasi pada Bidang Kesehatan dan KB kurang optimal, dan sebagian besar RO belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga serapan masih 0,00 persen, hal ini karena adanya proses pelaksanaan kegiatan yang masih sedang berjalan dan diproyeksikan ditriwulan III akan terealisasi.

Sebaran alokasi anggaran K/L pada bidang Kesehatan ada pada satker dengan kewenangan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yaitu pada satker Dinas di pemerintah daerah, sehingga RO pada bidang ini selaras dengan tugas dan fungsi pada instansi dinas di pemerintah daerah, dimana kebijakannya tidak lepas dari kebijakan pimpinan daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan Gubernur (Pergub).





Tabel 3.6. Alokasi Anggaran K/L per RO berdasarkan Bidang Kesehatan

No	Nama RO (Jutaan Rupiah)	Satuan	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Vol RO	Real RO	% Capaian RO
Kesehatan								
1	Dinas Kesehatan Kab./Kota yang dilakukan Pembinaan Program Usia Produktif dan Lansia	Provinsi	70,14	0,00	0,00%	1	0	0,00%
2	Fasilitas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam Pemenuhan Data Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas dan Klinik Pratama Sesuai Standar (LP-1)	Kab/Kota	105,74	0,00	0,00%	10	0	0,00%
3	Kab./Kota yang Dibina Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (LP-1)	Kab/Kota	34,13	0,00	0,00%	5	0	0,00%
4	Kab./Kota yang Dibina Pelaksanaan Labkesmas (LP-2)	Kab/Kota	23,72	0,00	0,00%	3	0	0,00%
5	Kab./Kota yang Dilakukan Fasilitas Surveilans Gizi dan KIA (LP-7)	Kab/Kota	15,52	0,00	0,00%	10	0	0,00%
6	Kab./Kota yang Dilakukan Fasilitas Upaya Perbaikan Status Gizi Remaja (LP-4)	Kab/Kota	18,20	0,00	0,00%	2	0	0,00%
7	Kab./Kota yang Mendapatkan Fasilitas/Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (LP-7)	Kab/Kota	52,00	23,52	45,23%	6	0	0,00%
8	Pemerintah Daerah yang Dilakukan Pembinaan Germas di Berbagai Tatanan (LP-3)	Daerah	98,22	0,00	0,00%	10	0	0,00%
9	Pemerintah Daerah yang Dilakukan Pembinaan Revitalisasi Posyandu (LP-1)	Daerah	144,78	65,23	45,05%	10	0	0,00%
10	Tenaga Dinkes Kab./Kota yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Kompetensi Dasar Posyandu (LP-1)	Orang	110,61	0,00	0,00%	30	0	0,00%
11	Tenaga Kesehatan di FKTP yang dilatih TOT Penanggulangan TBC bagi petugas kesehatan (SDM-23)	Orang	136,70	0,00	0,00%	30	0	0,00%
12	Tenaga kesehatan Dinkes Kab./Kota yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Komunikasi Puskemas Pelayanan Prima (LP-1)	Orang	110,61	0,00	0,00%	30	0	0,00%
13	Tenaga Kesehatan yang dilatih TOT kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging di FKTP (SDM-23)	Orang	278,45	0,00	0,00%	30	0	0,00%
14	Tenaga Kesehatan yang dilatih TOT Pencegahan dan pengendalian infeksi (SDM-23)	Orang	235,86	0,00	0,00%	30	0	0,00%
15	Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Aplikasi GIKIA (termasuk ePPGBM) (LP- 4)	Orang	130,22	0,00	0,00%	27	0	0,00%
16	Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Kebugaran Jasmani (LP-10)	Orang	17,85	0,00	0,00%	50	0	0,00%
17	Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Kesehatan Kelompok Rentan (LP-7)	Orang	17,85	0,00	0,00%	50	0	0,00%
18	Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Kesehatan Kerja (LP-10)	Orang	17,85	0,00	0,00%	50	0	0,00%
19	Tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Pelaksanaan Advokasi Germas (LP-3)	Orang	81,76	0,00	0,00%	30	0	0,00%
20	Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri (LP-10)	Orang	176,54	0,00	0,00%	30	0	0,00%
21	Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Pelayanan Kesehatan Reproduksi Catin dan KB (LP-7)	Orang	17,85	0,00	0,00%	50	0	0,00%
22	Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status Gizi (LP - 4)	Orang	644,12	0,00	0,00%	60	0	0,00%
Total			2.538,71	88,75	3,50%			

Sumber : Aplikasi Sintesa dan Aplikasi OMSPAN



Berdasarkan data sebaran RO Harmonis Bidang Kesehatan tersebut di atas, beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja K/L RO Harmonis pada bidang Kesehatan tersebar di 22 RO, dengan alokasi pagu total Rp2,54 Miliar dan tingkat serapan realisasi masih kurang optimal sebesar 3,50 persen;
2. RO Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Upaya Perbaikan Status Gizi (LP - 4) mendapatkan alokasi pagu belanja terbesar dibandingkan RO yang lain, sebesar Rp644,12 juta, dengan capaian realisasi/RO masih belum sangat kurang optimal sebesar 00,00 persen dari pagunya;
3. RO Pemerintah Daerah yang Dilakukan Pembinaan Revitalisasi Posyandu (LP-1) merupakan salah satu RO yang kinerjanya cukup optimal, dengan alokasi pagu yang cukup signifikan dibandingkan yang lain sebesar Rp144,78 juta, serapan realisasi 45,05 namun untuk capaian RO nya masih belum optimal 00,00 persen;
4. RO Kab./Kota yang Mendapatkan Fasilitasi/Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (LP-7) dengan alokasi pagu belanja sebesar Rp52,00 Juta kinerjanya hampir sama dengan RO pada poin 8, dengan serapan realisasi 45,23 persen meskipun demikian untuk capaian RO nya masih 0,00 persen;
5. Tantangan dan hambatan pada Bidang Kesehatan pada aspek penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), Eksekusi Kegiatan, Regulasi dan SDM adalah sebagai berikut :
 - a. Penganggaran
 - Blokir Anggaran dan Revisi : Masih adanya blokir anggaran AA pada belanja Barang, dan masih dalam proses pembukaan blokir dengan berkoordinasi Eselon I terkait di Kementerian Kesehatan.
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa
 - Belum ada kendala pada pengadaan barang dan jasa, karena sebagian besar kegiatan untuk pelatihan para tenaga kesehatan.
 - c. Eksekusi Kegiatan
 - Terlambatnya eksekusi kegiatan dikarenakan adanya transisi pergantian pejabat baru, sehingga masih membutuhkan penyesuaian di lapangan.
 - d. Regulasi
 - Perubahan pergantian pimpinan daerah sehingga berdampak adanya aturan/peraturan daerah yang baru sehingga membutuhkan penyesuaian teknis di lapangan.
 - e. SDM
 - Adanya pergantian kepala dinas (KPA) sehingga mengharuskan adanya penggantian SK yang disahkan oleh Gubernur sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan.

3.2.7 Distribusi/Sebaran RO Harmonis Tingkat Wilayah Bidang Pendidikan

Alokasi belanja RO Harmonis pada Bidang Pendidikan di Bengkulu tersebar pada 7 RO, dengan total alokasi pagu belanja sebesar Rp44,23 Miliar dan sampai dengan triwulan II 2024 sebesar 22,27 persen dari pagu. Capaian serapan realisasi pada Bidang Pendidikan belum optimal, dan terutama pada RO yang mendapatkan alokasi pagu terbesar yaitu RO Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga serapan masih 21,42 persen serta capaian RO nya masih rendah sebesar 28,94 persen.

Tabel 3.7. Alokasi Anggaran K/L per RO Berdasarkan Bidang Pendidikan

No	Nama RO (Jutaan Rupiah)	Satuan	Pagu	Realisasi 	% Realisasi 	Vol RO	Real RO	% Capaian RO
Pendidikan								
1	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat	Orang	5.500,94	2.400,76	43,64%	688	352	51,09%
2	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inhouse	Orang	6.455,21	943,71	14,62%	1648	400	24,27%
3	Guru yang mengikuti Program Pendidikan	Orang	23.050,15	4.938,48	21,42%	1199	347	28,94%
4	Penutur bahasa terbisa	Orang	693,28	418,87	60,39%	296	200	67,57%
5	Penutur bahasa teruji	Orang	308,73	61,56	19,97%	825	318	38,79%
6	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan	Lembag	8.089,03	990,87	12,26%	2025	208	10,52%
7	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan	Lembag	1473,22	56,38	3,82%	2111	1415	67,03%
Total			44.726,85	9.850,72	22,27%			

Sumber : Aplikasi Sintesa dan Aplikasi OMSPAN



Berdasarkan data sebaran RO Harmonis Bidang Pendidikan tersebut di atas, beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja K/LRO Harmonis pada bidang Pendidikan tersebar di 7RO, dengan alokasi pagu total Rp44,23 Miliar dan tingkat serapan realisasi sebesar 22,27 persen;
2. RO Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Barumendapatkan alokasi pagu belanja terbesar dibandingkan RO yang lain, sebesar Rp23,05 Miliar dengan capaian realisasi masih belum optimal sebesar 21,42 persen dari pagu dan capaian kinerja RO nya 28,94 persen;
3. RO Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya mendapatkan alokasi terbesar kedua sebesar Rp8,07 Miliar, namun dibandingkan RO yang lain maka RO ini kinerjanya paling rendah 12,28 persen serta capaian RO nya 10,32 persen dan diharapkan diperiode berikutnya dapat ditingkatkan lagi;
4. Tantangan dan hambatan pada Bidang Pendidikan pada aspek penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), Eksekusi Kegiatan, Regulasi dan SDM adalah sebagai berikut:
 - a. Penganggaran
 - Blokir Anggaran dan Revisi : Masih adanya blokir anggaran AA, dan masih dalam proses pembukaan blokir dengan berkoordinasi Eselon I terkait adanya dokumen persyaratan yang masih perlu dilengkapi.
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa
 - Ada beberapa program kegiatan yang masih dalam proses tahap lelang dan diproyeksikan akan segera selesai dibulan Juli sehingga penyelesaian pekerjaan akan tuntas ditriwulan III tahun 2024.
 - c. Eksekusi Kegiatan
 - Kegiatan sebagian besar melibatkan pemerintah daerah terutama data-data kependidikan di dinas Pendidikan daerah. Koordinasi dengan pejabat daerah yang terkadang harus disesuaikan dengan agenda pimpinan daerah baik Bupati/Walikota maupun Gubernur yang tidak menentu.
 - d. Regulasi
 - Belum ada kendala yang berarti terkait regulasi teknis, karena sosialisasi petunjuk teknis telah dilakukan dengan baik, karena sinkronisasi antara regulasi pusat dari kementerian Dikbud dan Dinas pendidikan di daerah secara intensif dilaksanakan
 - e. SDM
 - Belum ada kendala teknis yang berarti.

3.2.8 Distribusi/Sebaran RO Harmonis Tingkat Wilayah Bidang Pertanian

Alokasi belanja RO Harmonis pada Bidang Pertanian di Bengkulu tersebar pada 15 RO, dengan total alokasi pagu belanja sebesar Rp4,17 Miliar dan sampai dengan triwulan II 2024 capaian realisasi sebesar 36,60 persen dari pagu. Capaian kinerja pada Bidang Pertanian masih belum optimal, dan sebagian RO belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga serapan masih dibawah 30,00 persen, namun ada juga RO yang sudah optimal 100 persen kinerjanya yaitu RO Area penyaluran benih padi dan Sarana Pascapanen Holtikultura.

Tabel 3.8. Alokasi Anggaran K/L per RO Berdasarkan Bidang Pertanian

No	Nama RO (Jutaan Rupiah)	Satuan	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Vol RO	Real RO	% Capaian RO
Pertanian								
1	Sarana Pengolahan Tanaman Perkebunan	unit	397,99	108,98	27,41%	1	0	0,00%
2	Area penyaluran benih jagung	Hektar	900,00	0,00	0,00%	1000	0	0,00%
3	Area penyaluran benih padi	Hektar	340,00	340,00	100,00%	1000	1000	100,00%
4	Areal Perigandalian OPT Tanaman Pangan	Hektar	213,16	84,95	39,85%	0	0	0,00%
5	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	layanan	68,44	12,50	14,25%	6	1	16,67%
6	Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Hektar	482,91	26,52	5,49%	7	1	14,29%
7	Layanan Kesehatan Hewan	layanan	750,00	748,93	99,99%	3000	2997	99,99%

Sumber : Aplikasi Sintesa dan Aplikasi OMSPAN





No	Nama RO (Jutaan Rupiah)	Satuan	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Vol RO	Real RO	% Capaian RO
Pertanian								
6	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Lembaga	235,00	8,48	3,61%	1	0	0,00%
9	Perangkat Perlindungan Perkebunan	unit	142,20	35,85	25,91%	2	0	0,00%
10	Pesarana Pascapanen Hortikultura	unit	240,00	3,50	1,04%	1	1	100,00%
11	Pesarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	unit	50,00	0,00	0,00%	1	0	0,00%
12	Sarana Pascapanen Hortikultura	unit	70,00	70,00	100,00%	1	1	100,00%
13	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	unit	150,00	0,00	0,00%	1	0	0,00%
14	Sarana Pengolahan Hortikultura	unit	40,00	39,90	99,75%	1	0	0,00%
15	Sertifikat Benih padi	produk	70,00	45,35	64,79%	400	337,72	84,43%
Total			4.169,31	1.526,05	36,60%			

Sumber : Aplikasi Sintesa dan Aplikasi QMSPAN

Berdasarkan data sebaran RO Harmonis Bidang Pertanian tersebut di atas, beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja K/L RO Harmonis pada bidang Pertanian tersebar di 15 RO, dengan alokasi pagu total Rp4,17 Miliar dan tingkat serapan realisasi sebesar 36,60 persen;
2. RO Area penyaluran benih jagung mendapatkan alokasi pagu belanja terbesar dibandingkan RO yang lain, sebesar Rp900 juta dengan
3. RO Layanan Kesehatan Hewan mendapatkan alokasi terbesar kedua sebesar Rp750 juta, dan kinerjanya sudah cukup optimal 99,99 persen;
4. Tantangan dan hambatan pada Bidang Pertanian berdasarkan aspek penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), Eksekusi Kegiatan, Regulasi dan SDM adalah sebagai berikut:
 - a. Penganggaran
 - Blokir Anggaran dan Revisi : Masih adanya blokir anggaran AA pada program Bantuan pemerintah (Banper), dan masih dalam proses pembukaan blokir dengan berkoordinasi Eselon I terkait.
 - Pemblokiran terjadi karena masih adanya dokumen persyaratan yang masih perlu dilengkapi.
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa
 - Ada beberapa program kegiatan yang masih dalam proses tahap lelang dan diproyeksikan akan segera selesai dibulan Juli sehingga penyelesaian pekerjaan akan tuntas ditriwulan III tahun 2024.
 - c. Eksekusi Kegiatan
 - Ada kegiatan bantuan benih jagung, tahapan persiapan sudah dilaksanakan dibulan Maret 2024 dan pada bulan Mei 2024 telah didistribusikan sekita 980-an hektar, sisa 200 hektar tidak lolos sertifikasi kemudian Dinas terkait harus dilakukan sertifikasi ulang untuk sisanya.
 - Kegiatan fisik telah selesai dilaksanakan, tetapi pencairan dana tertunda akibat gagalnya sertifikasi
 - d. Regulasi
 - Belum ada kendala berarti terkait regulasi.
 - e. SDM
 - Belum ada kendala berarti terkait SDM.

3.2.9 Distribusi/Sebaran RO Harmonis Tingkat Wilayah Bidang Sanitasi

Alokasi belanja RO Harmonis pada Bidang Sanitasi di Bengkulu hanya pada 1 RO, dengan total alokasi pagu belanja sebesar Rp2,05 Miliar dan sampai dengan triwulan II 2024 capaian realisasi sebesar 34,37 persen dari pagu. Capaian serapan realisasi pada Bidang Sanitasi cukup optimal dengan capaian RO nya sudah 100 persen.





Tabel 3.9. Capaian RO utama pada Belanja K/L per RO berdasarkan Bidang Sanitasi

No	Nama RO (Jutaan Rupiah)	Satuan	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Vol RO	Real RO	% Capaian RO
Sanitasi								
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Daerah	2.050,00	704,56	34,37%	10	10	100,00%
Total			2.050,00	704,56	34,37%			

Sumber : Aplikasi Sintesa dan Aplikasi QMSPAN

Berdasarkan data sebaran RO Harmonis Bidang Sanitasi tersebut di atas, beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja K/L RO Harmonis pada bidang Sanitasi hanya ada di 1 RO, dengan alokasi pagu total Rp2,05 Milliar dan tingkat serapan realisasi sebesar 34,37 persen;
2. Pada Bidang Sanitasi hanya ada RO Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi dengan capaian realisasi cukup optimal sebesar 34,37 persen dari pagu dan capaian kinerja RO nya sudah 100 persen, sehingga dapat dilakukan optimalisasi dari sisa pagu anggarannya untuk kegiatan lain yang dapat mendukung bidang Sanitasi;
3. Tantangan dan hambatan pada Bidang Sanitasi berdasarkan aspek penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), Eksekusi Kegiatan, Regulasi dan SDM adalah sebagai berikut :
 - a. Penganggaran
 - Blokir Anggaran dan Revisi : Adanya blokir anggaran AA dan masih dalam proses pembukaan blokir dalam pemenuhan dokumen prasyarat buka blokir sehingga secara intensif berkoordinasi dengan Eselon I terkait.
 - b. Pengadaan Barang dan Jasa
 - Belum ada kendala yang berarti.
 - c. Eksekusi Kegiatan
 - kegiatan Sanitasi ada di kegiatan regular berupa Kegiatan pendampingan seperti perjalanan dinas, sehingga untuk realisasinya harus disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan, sedangkan jadwal kegiatan dilapangan bersifat dinamis;
 - d. Regulasi
 - Koordinasi dengan Kantor pusat Kementerian PUPR terkait penyamaan persepsi tentang aturan teknis dalam pekerjaan.
 - e. SDM
 - Tidak kendala yang berarti di bidang Sanitasi.

3.3 Kendala dan Tantangan

Berdasarkan hasil analisis kendala dan permasalahan dari Distribusi/Sebaran RO Harmonis masing-masing Bidang di atas, maka secara garis besar 5 aspek yang meliputi aspek penganggaran, aspek PBJ, aspek eksekusi kegiatan, aspek regulasi dan aspek SDM dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Aspek Penganggaran

Meskipun rencana penyerapan belanja dari setiap Bidang telah dibuat oleh masing-masing K/L pengampu kegiatan, namun capaian kinerja di akhir triwulan II 2024 pada beberapa RO Harmonis masing-masing bidang yang penyerapannya masih belum optimal, kendala dan permasalahan yang berhasil dihimpun dari satker pada aspek penganggaran meliputi :

1. Kepatuhan dalam penyesuaian revisi halaman III DIPA yang mengurangi nilai IKPA satker. Ketika terjadi perubahan dari rencana penarikan awal, satker tidak atau terlambat dalam menyampaikan revisi penarikan halaman III DIPA;
2. Terjadinya revisi pengurangan pagu DIPA yang mengakibatkan berubahnya rencana kegiatan yang sudah disusun sebelumnya;
3. Terjadinya revisi anggaran tambahan (ABT) pada triwulan II yang menyebabkan perubahan rencana eksekusi kegiatan mendasar, perubahan dari rencana awal yang menyita waktu dalam proses perencanaan ulang pelaksanaan kegiatan;
4. Alokasi dana terblokir karena adanya kebijakan automatic adjustment (AA), dana diblokir karena adanya refocusing dari pemerintah pusat serta terdapat revisi terpusat yang menihilkan sisa belanja modal yang tidak terealisasi;
5. Blokir auto adjustment masih membutuhkan kelengkapan dokumen dan koordinasi dengan unit eselon satu terkait sehingga menyebabkan pekerjaan terlambat untuk dilaksanakan;





2. Aspek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Secara umum tidak terdapat permasalahan dalam aspek pengadaan barang dan jasa untuk satker dengan RO harmonis yang realisasi kegiatannya masih minim. Namun terdapat beberapa permasalahan yang terhimpun sebagai berikut :

1. Terdapatnya kebijakan terkait kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas barang dan jasa yang akan diadakan yang sedikit banyak menyita waktu untuk proses pengadaannya karena menyulitkan pihak penyedia barang/jasa. Beberapa pengadaan sulit diadakan karena banyak alat-alat laboratorium yang murni komponen luar negeri;
2. Terdapat permasalahan di RO bidang pertanian yaitu terkendalanya pencairan anggaran disebabkan karena eksekusi anggaran baru dapat dilaksanakan ketika penyebab eksekusi kegiatan muncul di lapangan. Contohnya adalah biaya vaksin dan biaya perjalanan dinas bagi dokter hewan yang mengunjungi lokasi wabah penyakit menular hewan di suatu daerah. Jika tidak terjadi kasus wabah penyakit dan sebagainya maka kegiatan dapat dipastikan tidak terealisasi.

3. Aspek Eksekusi Kegiatan

Untuk permasalahan pada aspek eksekusi kegiatan, beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi satker meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Satker menyampaikan keluhan atas pedoman umum (Pedum), juknis dan dokumen pelaksanaan lainnya yang terkait terlambat diberikan oleh Kantor Pusat kementerian lembaga di Jakarta;
2. Pekerjaan yang dilaksanakan lebih banyak menunggu terbitnya juknis dari pusat, karena jika dilaksanakan mendahului juknis dikhawatirkan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan terjadinya wan prestasi atau kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa;
3. Beberapa satker mengeluhkan adanya perintah eksekusi kegiatan dipersyaratkan harus dilaksanakan di triwulan III dan IV tahun berjalan;
4. Kendala cuaca musim hujan yang menyebabkan keterbatasan waktu dan menghambat pelaksanaan proyek. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ABT memiliki rentang waktu pelaksanaan yang sangat sempit;
5. Untuk daerah remote area, pengadaan terkendala oleh kesulitan material (listrik masih minim) di area transmigran.

4. Aspek Regulasi

Untuk permasalahan bidang regulasi secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti. Namun terdapat beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh satker meliputi :

1. Beberapa satker mengeluhkan rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh tagihan dari entitas lain seperti munculnya biaya operasional yang dikeluarkan bergantung pada permintaan dan tagihan dari pemerintah daerah setempat. Jika tidak ada permintaan dari pemda maka dana tidak dapat dicairkan;
2. Pergantian pimpinan menteri KL mengakibatkan perubahan fokus kebijakan pengadaan tingkat kementerian yang mengubah rencana pengadaan barang/jasa dari sebelumnya.
3. Perlu adanya sinkronisasi dan dilakukan secara intensif antara peraturan dari Kantor Pusat K/L dengan Pemerintah daerah setempat

5. Aspek SDM

Untuk permasalahan dari aspek SDM belum ditemukan permasalahan yang berarti. Namun terdapat beberapa satker yang mengeluhkan kendala dalam aspek SDM yang meliputi :

1. Ada satu satker yang mengeluhkan terkait adanya penambahan SDM pada satker yang menyebabkan terjadinya pagu minus belanja pegawai;
2. Minimnya pemahaman SDM satker yang menangani aplikasi yang memerlukan pendampingan dari KPPN setempat;
3. Khusus untuk proyek fisik di pulau terluar, beberapa satker di bidang jalan mengeluhkan kurangnya SDM dan lokasi kegiatan yang tersebar di berbagai titik.

3.4 Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

1. Harmonisasi belanja KL dengan belanja DAK Fisik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mensinkronkan belanja antara belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi pembiayaan dalam satu kegiatan yang sama.
2. Monitoring dan evaluasi belanja RO Harmonis KL dengan DAK Fisik dilakukan pada 6 bidang DAK Fisik yang meliputi bidang pertanian, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan KB, bidang jalan,





1. bidang Air Minum dan bidang Sanitasi. Dari 6 bidang tersebut jika dikomparasi dengan bidang DAK Fisik yang ada di Provinsi Bengkulu, maka terdapat 5 bidang fisik yang tidak ditemukan output belanja KL yang harmonis, yaitu: belanja bidang Industri Kecil dan Menengah, bidang irigasi, Kelautan dan Perikanan dan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Pariwisata.
3. Total pagu RO harmonis KL mencapai Rp828,52 Miliar dengan total realisasi sampai dengan akhir triwulan II 2024 mencapai Rp294,88 Miliar atau terserap sebesar 35,59 persen. Realisasi seluruh Pendidikan 22,27 persen.
4. Jika dibandingkan dengan alokasi pagu DAK Fisik secara total di Provinsi Bengkulu, maka total alokasi pagu RO harmonis lebih rendah dibandingkan alokasi pagu DAK fisik (alokasi pagu RO harmonis K/L sebesar Rp828,52 miliar sementara alokasi Pagu DAK Fisik mencapai Rp1.089,2 miliar).
5. Berdasarkan lokus pemda, dari 11 pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu, baru 3 pemerintah daerah yang terdapat belanja KL harmonis dengan belanja DAK Fisik yaitu Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

3.5 Rekomendasi/Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

1. Agar belanja KL yang harmonis dengan belanja DAK Fisik merata di seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu, tidak terbatas pada 3 Pemda di atas. Upaya harmonisasi belanja dari tahap perencanaan anggaran di tingkat pusat agar ditingkatkan lagi. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) agar berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian negara/lembaga serta pemerintah daerah agar bersinergi lebih aktif dalam upaya pengharmonisasian belanja KL di daerah terutama untuk daerah yang belum harmonis dengan belanja DAK Fisik.
2. Sampai dengan akhir triwulan II 2024 capaian realisasi belanja pada RO harmonis K/L masih belum optimal, rata-rata capaian 35,59 persen. Sehingga untuk permasalahan-permasalahan mendasar pada sisi eksekusi pelaksanaan anggaran pada tingkat satker yaitu permasalahan kurang atau terlambatnya pedum/juklak/juknis dari pusat agar dapat diminimalisir dengan baik. Terlambatnya juklak dan juknis menunjukkan kurang siapnya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian negara lembaga terkait dalam menyusun perencanaan. Oleh karena itu perlunya peningkatan kualitas perencanaan di tingkat pusat.
3. Monitoring dan evaluasi RO harmonis sangat penting untuk terus ditingkatkan sehingga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan tiap tahun secara berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pihak terkait baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
4. Kegiatan lanjutan dalam hasil monev belanja harmonis ini agar dikomunikasikan dan disebarluaskan kepada seluruh stakeholder terkait baik satker KL di tingkat daerah maupun dengan pemerintah daerah pada saat pelaksanaan disseminasi KFR pada tiap triwulan secara teratur.

"Semua kekecewaan harus dialirkan menjadi energi positif untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih keras lagi, sehingga berbagai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi bisa diraih."

Sri Mulyani Indrawati



BAB IV

ANALISIS TEMATIK: PERUBAHAN IKLIM DAN UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEMITIGASI DAMPAKNYA



Rapat Komite ALCo Regional Periode Realisasi s.d. 30 April 2024

Kegiatan rutin bersama Seluruh Perwakilan Kemenkeu Satu Bengkulu dihadiri oleh BPS, Bank Indonesia, OJK, dan Akademisi UNIB membahas analisis tematik perubahan iklim.



Tabut adalah upacara tradisi masyarakat Bengkulu untuk mengenang mati syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib dalam peperangan dengan pasukan Ubaidillah bin Zaid di padang Karbala.

Perayaan di Bengkulu pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685.

FESTIVAL Tabut



04

ANALISIS TEMATIK Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah untuk Memitigasi Dampaknya

4.1 Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

APBN memuat berbagai kebijakan belanja negara, yang pada dasarnya merupakan formulasi kebijakan untuk merespon perekonomian, menjawab tantangan dan isu strategis serta mendukung sasaran dan target pembangunan yang diwujudkan dalam pengelolaan keuangan negara yang kredibel, transparan dan akuntabel (*good governance*). Dalam praktiknya, pengelolaan APBN mempunyai permasalahan yakni keterbatasan ruang fiskal, terbatasnya kemampuan negara didalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan. Kebijakan belanja APBN diarahkan untuk memenuhi visi dan misi presiden terpilih, dalam rangka pemenuhan visi dan misi tersebut telah ditetapkan program yang menjadi prioritas pemerintah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pembangunan berketahanan iklim (PBI) telah menjadi salah satu Prioritas Nasional (PN) 6 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024, peningkatan ketahanan iklim ditargetkan dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi dari dampak perubahan iklim sebesar 1,15 persen PDB pada 2024. Kebijakan pembangunan berketahanan iklim merupakan implementasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Low Carbon and Climate Resilience Strategy, Sendai Framework, dan pemenuhan target Paris Agreement. Program pembangunan berketahanan iklim (PBI) menjadi sangat penting karena Indonesia terletak pada garis ekuator dan diapit dua samudera sehingga tercipta pola iklim dinamis, yaitu yang berlangsung cepat (*rapid onset*) dan dalam kurun waktu yang relatif panjang (*slow onset*).

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh manusia pada abad ke-21 ini. Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata atau distribusi kejadian cuaca ekstrem di seluruh dunia. Perubahan ini disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂) dan metana ke atmosfer. Beberapa fenomena yang telah terjadi dan terus berlangsung sebagai akibat dari terjadinya perubahan iklim antara lain mencakup:

1. **Pemanasan Global:** temperatur rata-rata global meningkat, yang berkontribusi pada perubahan cuaca ekstrem, pencairan es, dan kenaikan permukaan air laut.
2. **Perubahan Pola Hujan:** Pola hujan menjadi lebih tidak stabil, dengan beberapa daerah mengalami kekeringan parah, sementara tempat lain mengalami banjir.
3. **Kenaikan permukaan air laut:** pencairan es di Kutub Utara dan Kutub Selatan menyebabkan kenaikan permukaan air laut, mengancam pulau-pulau kecil dan pesisir.
4. **Kerusakan Lingkungan:** perubahan iklim menyebabkan kerusakan habitat alami dan kehilangan keanekaragaman hayati, mengancam ekosistem dan species.
5. **Kesehatan masyarakat:** perubahan iklim dapat meningkatkan risiko penyakit terkait cuaca ekstrem, seperti penyakit infeksi dan gangguan pernapasan.

Dampak perubahan iklim tersebut tidak hanya terbatas pada lingkungan alam, tetapi juga merambah ke sektor ekonomi global. Perubahan suhu, peningkatan tingkat laut, cuaca ekstrem, dan pola iklim yang tidak terduga semakin menantang ketahanan ekonomi dunia. Beberapa contoh dampak perubahan iklim terhadap perekonomian antara lain (dikutip dari artikel "Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi Global (ekonomi.esaunggul.ac.id)):

1. **Kerugian di sektor pertanian:** Perubahan iklim dapat menyebabkan ketidakstabilan produksi pangan karena dampaknya terhadap cuaca dan kondisi pertanian. Peningkatan suhu yang ekstrem, kekeringan, dan banjir dapat mengurangi hasil panen dan mengganggu rantai pasokan pangan. Ini akan mengakibatkan kenaikan harga pangan dan ketidakpastian pasokan, memengaruhi kedaulatan pangan suatu negara dan meningkatkan risiko kelaparan.
2. **Ancaman terhadap infrastruktur dan properti:** Fenomena cuaca ekstrem, seperti badai tropis yang semakin kuat dan banjir yang lebih sering, meningkatkan risiko kerusakan pada infrastruktur kritis dan properti. Kerusakan ini tidak hanya memengaruhi sektor properti, tetapi juga industri asuransi dan keuangan. Klaim asuransi yang meningkat dapat menyebabkan kenaikan premi dan biaya asuransi, sementara kerugian infrastruktur dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pertumbuhan.
3. **Ancaman terhadap industri pariwisata:** Perubahan iklim dapat mengganggu daya tarik destinasi pariwisata karena cuaca ekstrem, kenaikan suhu, atau perubahan ekosistem. Ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan, pendapatan pariwisata, dan lapangan kerja terkait industri pariwisata. Negara-negara yang bergantung pada pariwisata sebagai sumber pendapatan utama akan terkena dampak secara ekonomi.
4. **Peningkatan Biaya Kesehatan:** Perubahan iklim juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya akan memengaruhi ekonomi. Penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti malaria dan demam berdarah dapat menyebar lebih luas karena iklim yang lebih hangat dan kondisi lingkungan yang memungkinkan bagi vektor penyakit untuk berkembang biak. Biaya perawatan kesehatan yang meningkat akibat peningkatan penyakit menular akan mengurangi produktivitas tenaga kerja dan menimbulkan beban ekonomi pada sistem kesehatan.
5. **Tantangan bagi Keuangan Global:** Perubahan iklim juga memberikan tantangan bagi sektor keuangan global. Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam dapat memberikan tekanan pada pasar keuangan, memengaruhi harga aset, dan memperburuk stabilitas keuangan global. Institusi keuangan juga harus menghadapi risiko investasi yang meningkat terkait dengan proyek-proyek yang terkena dampak langsung atau tidak langsung oleh perubahan iklim.

Selain kerugian fisik dan material, masyarakat juga berpeluang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak negatif dari pola iklim tersebut. Berdasarkan kajian Kementerian PPN/Bappenas di 2019, kerugian ekonomi untuk empat sektor prioritas RPJMN 2020-2024 diperkirakan sebesar Rp 102,3 triliun di 2020 dan Rp 115,4 triliun pada 2024 atau meningkat sebesar 12,76 persen selama lima tahun. Nilai tersebut belum mempertimbangkan konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah sebagai variabel antara yang menghubungkan antara perubahan iklim dengan kondisi makroekonomi, baik di level nasional maupun provinsi.

Berbagai upaya dan kebijakan dilakukan oleh Pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Beberapa upaya dan kebijakan yang dilakukan, antara lain:

1. Pengurangan Emisi dari Sumber Energi
 - a. Pengembangan Energi Terbarukan: mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan bioenergi.
 - b. Efisiensi Energi: mengimplementasikan teknologi dan praktik yang meningkatkan efisiensi penggunaan energi di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga.
 - c. Transisi ke Energi Bersih: mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih, seperti gas alam atau energi nuklir.
2. Pengelolaan Hutan dan Lahan
 - a. Reboisasi dan Aforestasi: menanam kembali hutan yang telah rusak dan mengembangkan hutan baru di lahan yang kosong.
 - b. Penghentian Deforestasi: melindungi hutan dari penebangan ilegal dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan.
 - c. Restorasi Lahan Gambut: memulihkan lahan gambut yang rusak untuk mengurangi emisi karbon dari lahan tersebut.



3. Pertanian Berkelanjutan

- a. Praktik Pertanian Ramah Lingkungan: menggunakan metode pertanian yang mengurangi emisi GRK, seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan pengelolaan air yang efisien.
- b. Pengelolaan Pupuk dan Limbah Ternak: mengoptimalkan penggunaan pupuk dan mengelola limbah ternak untuk mengurangi emisi metana dan dinitrogen oksida.

4. Pengelolaan Limbah

- a. Pengurangan dan Daur Ulang Limbah: mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dan meningkatkan tingkat daur ulang.
- b. Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA): mengelola TPA dengan baik untuk mengurangi emisi metana, termasuk pemanfaatan gas metana sebagai sumber energi.

5. Teknologi dan Inovasi

- a. Pengembangan Teknologi Rendah Karbon: mendorong penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat mengurangi emisi GRK.
- b. Capture and Storage of Carbon (CCS): mengimplementasikan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon dari pembangkit listrik dan industri.

6. Kebijakan dan Regulasi

- a. Pemberlakuan Pajak Karbon: menerapkan pajak karbon untuk mengurangi emisi dengan membuat emisi menjadi lebih mahal bagi perusahaan.
- b. Perdagangan Emisi: menggunakan mekanisme cap-and-trade yang memungkinkan perusahaan untuk membeli dan menjual izin emisi.

7. Edukasi dan Kesadaran Publik

- a. Kampanye Kesadaran: meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya mitigasi perubahan iklim dan cara-cara untuk mengurangi jejak karbon pribadi.
- b. Pendidikan dan Pelatihan: memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan industri mengenai praktik-praktik yang berkelanjutan.

8. Kerjasama Internasional

- a. Partisipasi dalam Perjanjian Internasional: berpartisipasi dalam perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris untuk berkontribusi pada upaya global dalam mengurangi emisi.
- b. Dukungan Finansial dan Teknologi: mendapatkan dukungan finansial dan teknologi dari negara-negara maju untuk mengimplementasikan proyek-proyek mitigasi.

Tujuan kegiatan analisis perubahan iklim dan upaya pemerintah untuk memitigasi dampaknya ialah mengetahui bagaimana pengaruh perubahan iklim terhadap sektor perekonomian, mengetahui bagaimana usaha Pemerintah untuk memitigasi dampak perubahan iklim, dan mengevaluasi usaha yang telah dilakukan Pemerintah. Penyusunan analisis perubahan iklim dan upaya pemerintah untuk memitigasi dampaknya ini terbagi ke dalam tiga seri analisis yakni analisis pengaruh perubahan iklim terhadap kinerja sektor perekonomian regional (identifikasi sektor terdampak), analisis *policy responses* Pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim, dan evaluasi atas *policy response* Pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim.

4.2 Analisis Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Kinerja Sektor Perekonomian Regional (Identifikasi Sektor Terdampak)

Pada bagian ini dilakukan identifikasi atas sektor-sektor perekonomian regional Provinsi Bengkulu yang terdampak perubahan iklim. Analisis mencakup hal berikut:

- a. Fenomena perubahan iklim dunia;
- b. Perkembangan Perubahan Iklim Provinsi Bengkulu;
- c. Identifikasi sektor-sektor perekonomian regional Provinsi Bengkulu yang terdampak perubahan iklim;
- d. Analisis Regresi Indikator Perubahan Iklim Terhadap Produksi Unggulan Sektor Perekonomian;
- e. Hasil Focus Group Discussion Pengaruh Perubahan Cuaca terhadap Kinerja Sektor Perekonomian.



4.2.1 Fenomena Perubahan Iklim Dunia

Indonesia adalah salah satu negara tropis yang terdampak oleh iklim, berada di daerah tropis menjadikan Indonesia salah satu negara yang terpengaruh oleh beberapa fenomena alam. Fenomena alam memberikan pengaruh yang sangat besar dalam banyak hal, terutama yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya curah hujan. Fenomena alam yang terjadi termasuk fenomena El Nino dan La Nina.

Fenomena El Nino, terjadi ketika suhu permukaan air laut di Pasifik bagian timur akan naik. Fenomena ini bisa dilihat secara kasat mata di daerah Ekuador dan Peru. Ada beberapa tahapan terjadinya El Nino, pertama ialah naiknya suhu di bagian tengah dan timur perairan Pasifik, kedua ialah pembentukan awan yang terjadi di daerah tersebut dan ketiga ialah terhambatnya pembentukan awan di daerah barat Samudera Pasifik dikarenakan tekanan udara yang meningkat. La Nina adalah keadaan alam yang berbanding terbalik dengan El Nino. La Nina secara etimologi diartikan anak perempuan, kejadian La Nina adalah turunnya suhu di daerah Samudera Pasifik dan sekitar daerah Ekuador. Berbeda dengan El Nino yang dapat dilihat tandanya secara fisik, La Nina tidak dapat dilihat secara fisik sehingga sulit untuk memperkirakan terjadinya La Nina. Pengaruh yang ditimbulkan La Nina juga mempengaruhi daerah di Indonesia, beberapa pengaruh akibat terjadinya La Nina adalah naiknya potensi hujan dan juga naiknya tinggi curah hujan di berbagai daerah di Indonesia dan sekitarnya. Sementara fenomena El Nino meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah, dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia sehingga memicu terjadinya kondisi kekeringan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kerangka kerja perubahan iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* memberi definisi perubahan iklim sebagai perubahan yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud ialah komposisi material atmosfer bumi berupa gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbondioksida, metana, nitrogen dan sebagainya. Emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim berasal dari emisi kendaraan bermotor, penggunaan batu bara, pembakaran lahan, gas metana tempat pembuangan sampah dsb. Pada dasarnya, gas rumah kaca dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi tetap stabil, akan tetapi konsentrasi gas rumah kaca yang semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi yang disebut dengan pemanasan global.

4.2.2 Perkembangan Perubahan Iklim Provinsi Bengkulu

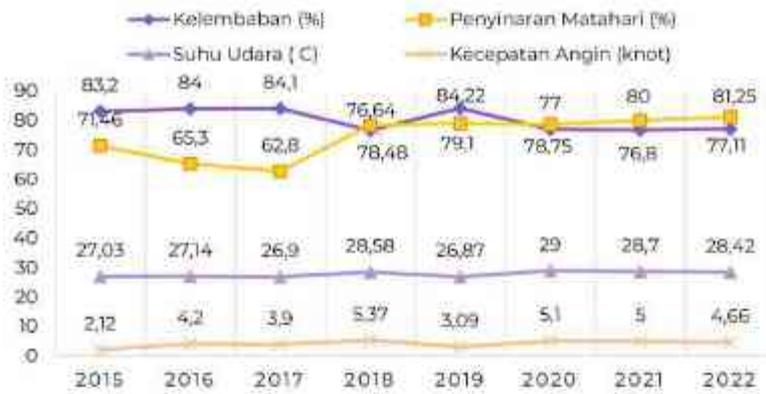
Pembahasan selanjutnya terkait perkembangan perubahan iklim selama tahun 2015 s.d. 2022 yang terlihat dari indikator kelembapan, suhu udara, penyinaran matahari, kecepatan angin, tekanan udara, jumlah curah hujan, indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks lingkungan hidup. Penyinaran matahari pada tahun 2022 sebesar 81,25% merupakan yang tertinggi sejak tahun 2015. Kelembapan udara tertinggi pada tahun 2019 sebesar 84,22% kemudian menurun menjadi sebesar 77,11% pada tahun 2022. Suhu udara cenderung stabil, terendah pada tahun 2019 sebesar 26,87 C, tertinggi pada tahun 2020 sebesar 29 C. Kecepatan angin terendah pada tahun 2015 sebesar 2,12 knot, tertinggi tahun 2018 sebesar 5,37 knot. Tekanan udara relatif stabil dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 sebesar 1007,98 mb. Curah hujan berfluktuatif, terendah pada tahun 2019 sebesar 1825 mm, tertinggi pada tahun 2022 sebesar 4518,5 mm. Indeks kualitas udara, indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks kualitas air di Provinsi Bengkulu selama tahun 2015 s.d. 2022 cenderung mengalami penurunan. Data selengkapnya terkait perkembangan indikator perubahan iklim terlihat pada gambar dibawah ini.

"You better change (kamu lebih baik berubah) atau kamu punah."

Sri Mulyani Indrawati



Grafik 4.1 Perkembangan Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022



Sumber: data SLHI, 2024

Grafik 4.2 Perkembangan Tekanan Udara dan Curah Hujan di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022



Sumber: data SLHI, 2024

Grafik 4.3 Perkembangan Indeks Kualitas Air, Udara, dan Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2022



Sumber: data SLHI diolah penulis, 2024

4.2.3 Identifikasi Sektor-Sektor Perekonomian Regional Provinsi Bengkulu yang Terdampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim global merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sektor pertanian dan perikanan di Provinsi Bengkulu. Dampak dari perubahan iklim, seperti peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrem, telah memberikan tekanan signifikan pada volume produksi berbagai komoditas pertanian dan perikanan di wilayah ini (Hamdan et al., 2019; Mulyasari et al., 2020; Sarvina et al., 2023; Sumartono et al., 2021). Berdasarkan data BPS Provinsi

Bengkulu, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024 semua lapangan usaha (16 sektor) tumbuh positif kecuali pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami kontraksi sebesar minus 0,40 persen (y-o-y). Dalam struktur PDRB Provinsi Bengkulu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor utama yang berkontribusi 29,07% terhadap PDRB. Analisis dampak perubahan iklim terhadap perekonomian sektor di Provinsi Bengkulu berfokus pada produksi kelapa sawit, karet, kopi, dan padi serta sektor perikanan yang merupakan komoditas unggulan Provinsi Bengkulu.

1. Pertumbuhan Volume Produksi Kelapa Sawit

Selama tahun 2019 s.d. 2022 Secara umum volume produksi kelapa sawit cenderung berfluktuatif, pertumbuhan volume produksi secara total pada Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 naik 5,55 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2020 kontraksi 69,76 persen, tahun 2021 naik signifikan 210 persen, tahun 2022 naik 0,35 persen. Selanjutnya, data pertumbuhan volume produksi kelapa sawit dapat dilihat pada tabel 4.1.

2. Pertumbuhan Volume Produksi Karet

Selama tahun 2019 s.d. 2022 Secara umum volume produksi karet cenderung berfluktuatif, pertumbuhan volume produksi secara total pada Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 kontraksi 0,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2020 kontraksi 14,12 persen, tahun 2021 naik 21,84 persen, tahun 2022 kontraksi kembali sebesar 13,24 persen. Selanjutnya, data pertumbuhan volume produksi karet dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 **Pertumbuhan Volume Produksi Kelapa Sawit dan Karet Per Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2022**

BENGKULU Kab/Kot	Pertumbuhan Produksi Kelapa Sawit				Pertumbuhan Produksi Karet			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Bengkulu Selatan	4.40	1.85	-6.64	-19.91	-13.60	-0.41	6.64	-48.64
Rejang Lebong	16.63	0.00	0.87	-0.86	-4.39	-8.46	8.27	-46.07
Bengkulu Utara	0.52	-6.79	27.48	9.41	-3.42	-13.88	21.12	-12.93
Kaur	22.31	1.69	-4.72	0.47	12.73	-0.81	-11.79	-47.83
Seluma	-0.14	-3.09	0.17	0.19	-0.33	-2.50	0.64	-3.06
Mukomuko	6.67	-99.98	376375.00	0.13	-4.48	-99.88	85200.00	0.00
Lebong	-90.32	0.00	16.67	0.00	22.15	-14.67	-3.91	0.81
Kepahiang	4.35	0.00	0.00	16.67	-5.66	0.00	0.00	0.00
Bengkulu Tengah	1.19	0.25	112.08	0.08	-0.22	0.00	42.95	0.00
Kota Bengkulu	22.47	4.89	-20.05	2.52	-4.76	0.00	100.00	0.00
Provinsi Bengkulu	5.55	-69.76	210.12	0.35	-0.58	-14.12	21.84	-13.24

Sumber: data BPS, 2024

3. Pertumbuhan Volume Produksi Kopi

Selama tahun 2019 s.d. 2022 Secara umum volume produksi kopi cenderung berfluktuatif, pertumbuhan volume produksi secara total pada Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 kontraksi 99,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2020 naik 0,19 persen, tahun 2021 kontraksi 0,03 persen, tahun 2022 kontraksi kembali sebesar 10,48 persen. Selanjutnya, data pertumbuhan volume produksi kopi dapat dilihat pada tabel 4.2.

4. Pertumbuhan Volume Produksi Padi

Selama tahun 2019 s.d. 2022 Secara umum volume produksi padi cenderung berfluktuatif, pertumbuhan volume produksi secara total pada Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 naik 2,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2020 kontraksi 1,23 persen, tahun 2021 kontraksi 7,42 persen, tahun 2022 naik sebesar 3,87 persen. Selanjutnya, data pertumbuhan volume produksi padi dapat dilihat pada tabel 4.2.

"Jangan pernah menyerah dan putus asa untuk selalu mencintai negeri kita ini."

Sri Mulyani Indrawati



Tabel 4.2 Pertumbuhan Volume Produksi Kopi dan Padi Per Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2022

BENGKULU Kab/Kot	Pertumbuhan Produksi Kopi				Pertumbuhan Produksi Padi			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Bengkulu Selatan	-0.20	0.49	0.00	-23.90	2.88	4.08	-1.68	-14.12
Rejang Lebong	12.95	11.29	-5.00	-21.94	14.74	-2.11	2.33	27.90
Bengkulu Utara	4.92	-45.07	42.23	-68.26	25.05	-10.10	-32.81	25.65
Kaur	2.81	-8.08	-14.76	0.62	-20.63	16.17	-22.61	3.54
Seluma	-0.25	3.90	-1.19	0.00	-14.81	-1.69	12.61	-11.54
Mukomuko	-20.27	-100.00	0.22	0.00	-23.07	53.26	-43.55	49.78
Lebong	0.10	0.80	1.19	0.78	41.67	-28.06	13.75	5.98
Kepahiang	-0.55	0.47	3.90	0.25	12.75	-18.06	-11.71	4.33
Bengkulu Tengah	-0.11	-0.29	-0.86	0.29	-5.25	-6.16	0.52	-25.74
Kota Bengkulu	-100.00	0.00	0.00	0.00	1.06	26.01	-1.82	-5.25
Provinsi Bengkulu	-99.90	0.19	-0.03	-10.48	2.65	-1.23	-7.42	3.87

Sumber: data BPS, 2024

5. Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan

Selama tahun 2016 s.d. 2022 produksi sektor perikanan di Provinsi Bengkulu relatif tumbuh positif, terutama pertumbuhan produksi pada tahun 2021. Memasuki tahun 2022 laju pertumbuhan menurun bahkan mengalami kontraksi. Data selengkapnya terkait pertumbuhan produksi sektor perikanan terlihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2022

Tahun	Pertumbuhan Produksi Perikanan Laut	Pertumbuhan Produksi Perikanan Umum	Pertumbuhan Produksi Sektor Perikanan
2016	0.217	-0.333	0.201
2017	5.333	-0.278	5.176
2018	2.348	0.725	2.305
2019	5.245	6.368	5.273
2020	-3.895	0.000	-3.791
2021	9.690	9.682	9.690
2022	0.413	-2.136	0.343

Sumber: data BPS, 2024

4.2.4 Analisis Regresi Indikator Perubahan Iklim Terhadap Produksi Unggulan Sektor Perekonomian

Berdasarkan data produksi produk unggulan wilayah Sumbagsel selama tahun 2015 s.d. 2022 yakni padi, kelapa sawit, karet, kopi dan perikanan dilakukan analisis pengaruh indikator perubahan iklim yang meliputi kelembapan, suhu udara, penyinaran matahari, kecepatan angin, tekanan udara, jumlah curah hujan, indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks lingkungan hidup terhadap tingkat produksi produk unggulan di wilayah Sumbagsel dengan menggunakan metode regresi menggunakan data periode tahun 2015 sampai dengan 2022. Ringkasan hasil regresi terlihat pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Regresi Perubahan Iklim Terhadap Sektor Perekonomian di SUMBAGSEL Tahun 2015-2022

Variabel Independen	Variabel Dependen				
	Produksi Perikanan	Produksi Padi	Produksi Kelapa Sawit	Produksi Karet	Produksi Kopi
Indeks Kualitas Air	4.649***	27.469	10.717	11.571	1.364
Indeks Kualitas Udara	-0.274	-211.996***	27.667	-24.643*	-6514**
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-3.488	-19.477	-37.565	-4.761	-1.691
Suhu Udara	16.387	79.401	975.567***	256.649***	43.473***
Tekanan Udara	-3.469	-57.136	80.607*	13.733	-3.479
Kecepatan Angin	21.781**	206.910	-525.741***	-47.377	2.450
Kelembaban	2.642	-44.852	125.298**	18.699	0.768
Curah Hujan	-0.0148	-0.353	0.339	0.0212	-0.009
Penyinaran Matahari	-1.394	-12.198	-113.525	-0.5737	-0.473
Konstanta	3008.68	79783.8	-116076.2**	-19909.68	2914.145
R-Squared	0.764	0.841	0.760	0.729	0.850
Jumlah Observasi	40	40	40	40	40

Keterangan: Unit analisis berada di Wilayah Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) terdiri dari Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung. Tingkat signifikansi 1% (< 0.01)***, 5% (< 0.05)** dan 10% (< 0.1)*. Sumber: data BPS diolah penulis, 2024.

Berdasarkan tabel hasil regresi dengan tingkat signifikansi 1% kualitas air berpengaruh positif terhadap produksi perikanan, hal ini sesuai dengan pernyataan FAO (2000) Kualitas air yang buruk adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan hasil panen perikanan di seluruh dunia. Pencemaran air, eutrofikasi, dan sedimentasi dapat merusak habitat ikan dan mengurangi produktivitas perairan.

Hasil regresi menunjukkan bahwa suhu udara berpengaruh positif terhadap produksi karet, karena suhu udara yang tinggi dapat membuat fotosintesis lebih efisien, aktivitas enzim yang mendukung produksi getah karet meningkat. (Taiz & Zeiger, 2010; Buchanan, Gruijssem, & Jones, 2015; Priyadarshan, 2011; Sethuraj & Mathew, 1992). Suhu udara juga berpengaruh positif terhadap produksi kopi, karena suhu udara yang tinggi dapat membuat fotosintesis lebih efisien, mempercepat proses pematangan buah kopi. (Taiz & Zeiger, 2010)

Hasil regresi ini menegaskan bahwa perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian dan perikanan di Provinsi Bengkulu, namun dampak itu bervariasi dari yang negatif sampai positif. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai dengan karakteristik masing-masing komoditas.

4.2.5 Hasil *Focus Group Discussion* Pengaruh Perubahan Cuaca terhadap Kinerja Sektor Perekonomian

Dalam rangka memperdalam analisis sektor-sektor perekonomian yang terdampak perubahan iklim, telah dilaksanakan FGD dengan BMKG Provinsi Bengkulu, BPS Provinsi Bengkulu, Dinas TPHP Prov. Bengkulu, Dinas Pariwisata Prov. Bengkulu, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu, dan Akademisi Universitas Bengkulu dengan hasil sebagai berikut:

- Menurut Perwakilan Dinas Tanaman Pangan dan HPP Prov. Bengkulu: "Pada setiap kabupaten rata-rata 100 ha - 200 ha lahan pertanian mengalami kekeringan. Disamping itu serangan hama menjadi lebih masif".
- Menurut Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu: "Cuaca ekstrem menyebabkan nelayan sering takut untuk melaut, budidaya ikan air tawar/payau terganggu/gagal panen, pengolahan ikan asin juga terganggu, sehingga stok ikan laut maupun budidaya menurun sehingga harga ikan laut meningkat walaupun tidak terlalu berpengaruh terhadap inflasi karena adanya barang substitusi".

- Menurut Perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu: "Jumlah penyelenggaraan kegiatan/event pariwisata yang tertunda/gagal meningkat signifikan terutama yang outdoor yang merupakan potensi wisata utama di Bengkulu, hal ini terjadi karena pola hujan yang tidak dapat diprediksi setiap tahun yang meningkatkan potensi risiko bagi wisatawan".

4.3 Analisis Policy Responses Pemerintah dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim

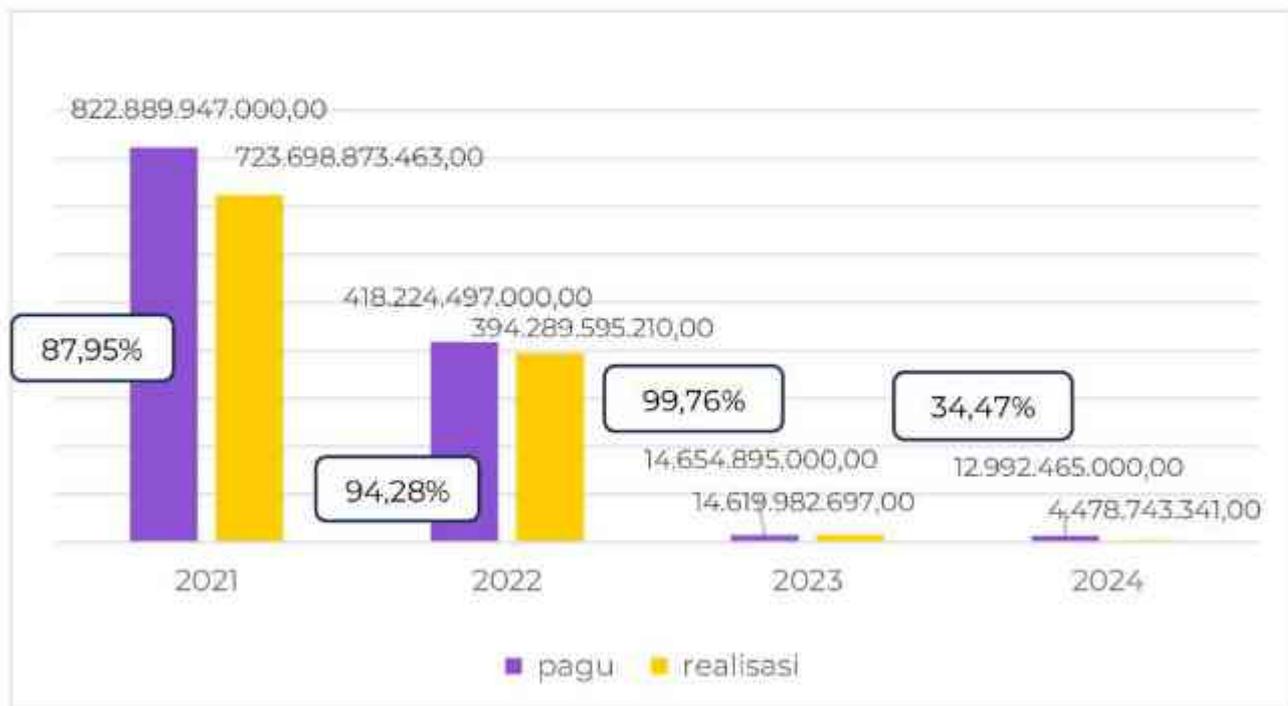
Analisis pada bagian ini dilakukan dengan mengidentifikasi upaya-upaya mitigasi dan/atau penanggulangan dampak perubahan iklim di wilayah Provinsi Bengkulu, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Analisis yang dilakukan mencakup hal-hal berikut:

- Intervensi Pemerintah melalui kebijakan belanja sebagai berikut:
 - Alokasi dan realisasi belanja K/L terkait perubahan iklim.
 - Alokasi dan realisasi belanja TKD terkait perubahan iklim.
 - Alokasi dan realisasi belanja APBD terkait perubahan iklim.
- Intervensi pemerintah melalui kebijakan non belanja.

4.3.1 Intervensi Pemerintah melalui kebijakan belanja

- Alokasi dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (Belanja Kementerian Negara/Lembaga) terkait Perubahan Iklim.

Grafik 4.4 Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah terkait Perubahan Iklim tahun 2021 s.d. 2024



Sumber: DMS PAN (diolah)

Perkembangan alokasi dan realisasi belanja Pemerintah Pusat terkait perubahan iklim pada Provinsi Bengkulu selama tahun 2021 s.d. 2024 menunjukkan tren penurunan. Dari sisi pagu belanja, pagu tertinggi terdapat pada tahun 2021 sebesar Rp822 Miliar, turun menjadi sebesar Rp12,9 Miliar pada tahun 2024. Pada tahun 2024 detail data program ialah sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Detail Program terkait Perubahan Iklim Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024

Uraian Program	Pagu	Realisasi s.d. 30 Juni	%
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	9.975.134.000,00	3.159.000.000,00	31,67%
Program Infrastruktur Konektivitas	1.047.998.000,00	549.711.694,00	52,45%
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1.578.894.000,00	619.353.547,00	39,23%
Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	296.263.000,00	103.158.100,00	34,82%
Program Penyiaran Publik	94.176.000,00	47.520.000,00	50,46%
Total	12.992.465.000,00	4.478.743.341,00	34,47%

Sumber: DMSPAN (diolah)

Selama tahun 2021 s.d. 2024, alokasi pagu terkait perubahan iklim tersebar pada beberapa kementerian/lembaga yakni Kementerian Pertanian (018), Kementerian Kesehatan (024), Kementerian Sosial (027), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (029), Kementerian Kelautan dan Perikanan (032), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (033), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (116), Kementerian Perhubungan (022), badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (075). Alokasi pagu dan realisasi terbesar terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp1,1 Triliun dengan realisasi Rp1,029 Triliun (89,8%). Data selengkapnya terlihat pada gambar dibawah ini.

Grafik 4.5 Pagu dan Realisasi terkait Perubahan Iklim tahun 2021 s.d. 2024 per Kementerian/Lembaga



Sumber: DMSPAN (diolah)

2) Alokasi dan Realisasi Belanja TKD terkait Perubahan Iklim

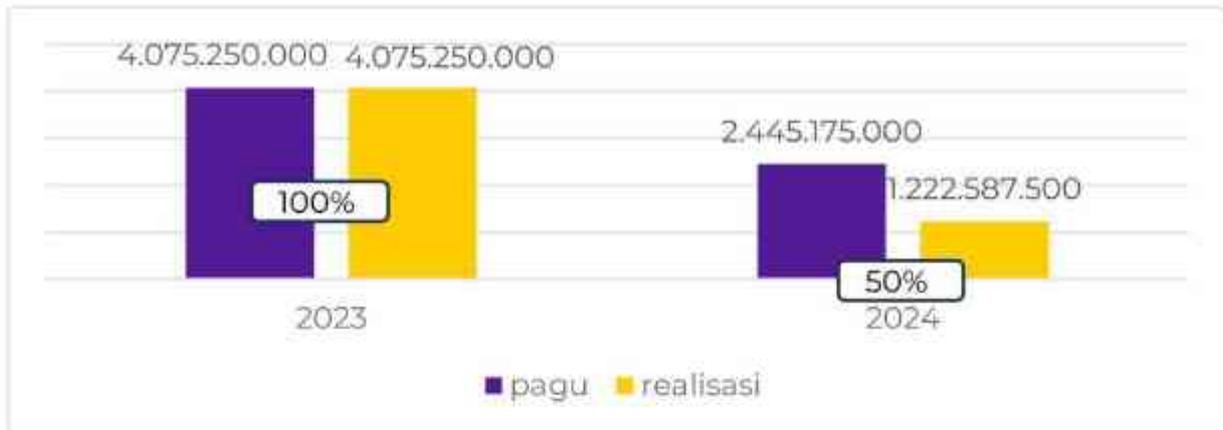
a. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) dana ketahanan pangan dan pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian. Penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian bertujuan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil budi daya pertanian di pekarangan sebagai sumber pangan dalam mendukung penurunan prevalensi stunting, fasilitasi pelayanan penyuluhan dan informasi pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani, dan fasilitasi pelayanan kesehatan hewan oleh petugas puskesmas dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.



Data alokasi dan realisasi DAK Nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian pada Provinsi Bengkulu tahun 2023 s.d. 2024 (realisasi per 30 Juni 2024) sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 4.6 Data alokasi dan realisasi DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Provinsi Bengkulu tahun 2023 s.d. 2024



Sumber: OMSPAN TKD (diolah)

b. Alokasi Dana Alokasi Fisik (DAK) Bidang Pertanian

Salah satu bentuk dukungan fiskal terhadap penanganan dampak perubahan iklim ialah alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian. Pada tahun 2024 Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp34,27 Miliar menurun 11,75 persen dibandingkan alokasi tahun 2023 sebesar Rp38,29 Miliar. Dak Fisik bidang pertanian tersebut merupakan penugasan dengan tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani), dengan tujuan untuk pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dilengkapi dengan: (i) sarana dan prasarana produksi pertanian; (ii) sarana dan prasarana kelautan dan perikanan; (iii) irigasi; dan (iv) aksesibilitas jalan dan jembatan. Data selengkapnya alokasi dan realisasi terkait DAK Fisik Bidang Pertanian tahun 2023 s.d. 2024 terlihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 4.7 Data Alokasi dan Realisasi Dana Alokasi Fisik (DAK) Bidang Pertanian pada Provinsi Bengkulu tahun 2023 s.d. 2024



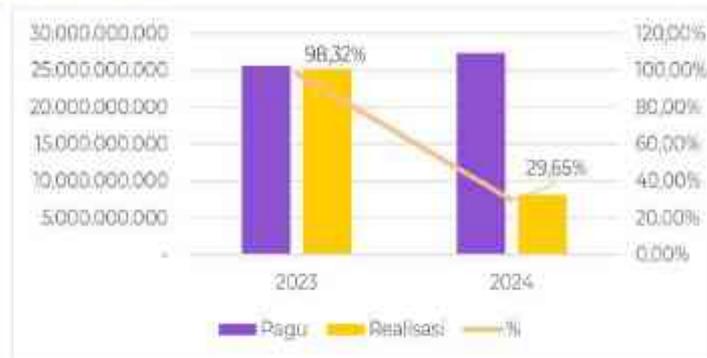
Sumber: OMSPAN TKD (diolah)

c. Alokasi Dana Alokasi Fisik (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan

Dukungan fiskal lainnya terhadap penanganan dampak perubahan iklim ialah alokasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2024 Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi DAK Fisik

Bidang Kelautan dan Pertanian sebesar Rp27,36 Miliar meningkat 6,92 persen dibandingkan alokasi tahun 2023 sebesar Rp25,59 Miliar. Dak Fisik bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif serta pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air. Data selengkapnya alokasi dan realisasi terkait DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2023 s.d. 2024 terlihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 4.8 Data Alokasi Dana Alokasi Fisik (DAK) Bidang Perikanan pada Provinsi Bengkulu tahun 2023 s.d. 2024

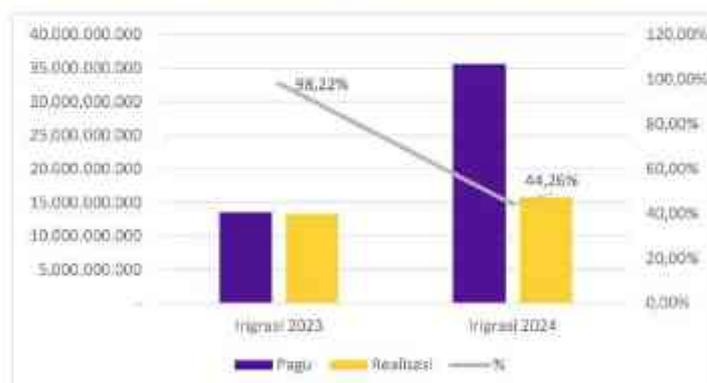


Sumber: OMSPAN TKD (diolah)

d. Alokasi Dana Alokasi Fisik (DAK) Bidang Irigrasi

Dukungan fiskal lainnya terhadap penanganan dampak perubahan iklim selanjutnya ialah alokasi DAK Fisik Bidang Irigrasi dengan penugasan tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan dan hewani). Pada tahun 2024 Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Irigrasi sebesar Rp35,6 Miliar meningkat 163 persen dibandingkan alokasi tahun 2023 sebesar Rp13,5 Miliar. Data selengkapnya alokasi dan realisasi terkait DAK Fisik Bidang Irigrasi tahun 2023 s.d. 2024 terlihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 4.9 Data Alokasi Dana Alokasi Fisik (DAK) Bidang Irigrasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan pada Provinsi Bengkulu tahun 2023 s.d. 2024



Sumber: OMSPAN TKD (diolah)

e. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan

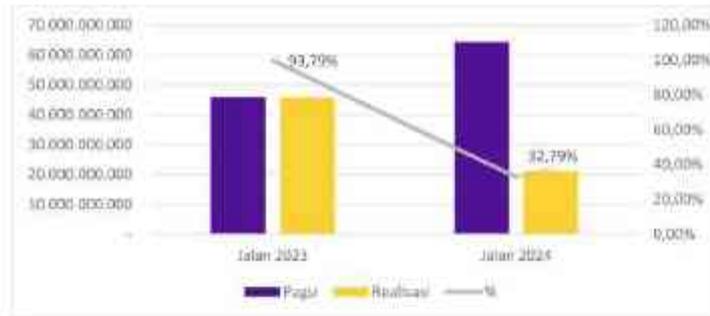
Dukungan fiskal lainnya terhadap penanganan dampak perubahan iklim selanjutnya ialah alokasi DAK Fisik Bidang Jalan dengan penugasan tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan dan hewani). Pada tahun 2024 Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Jalan sebesar Rp64,4 Miliar meningkat 39,9 persen dibandingkan alokasi tahun 2023 sebesar Rp46 Miliar. Data selengkapnya alokasi dan realisasi terkait DAK Fisik Bidang Jalan tahun 2023 s.d. 2024 terlihat pada gambar di bawah ini.

"Sempurna itu bukan nilai 100. Kita tidak akan pernah mencapai puncak terbaik, karena kita diberi ladang amal untuk lebih baik."

Sri Mulyeni Indrawati



Grafik 4.10 Data Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan pada Provinsi Bengkulu tahun 2023 s.d. 2024



Sumber: OMSPAN TKD (diolah)

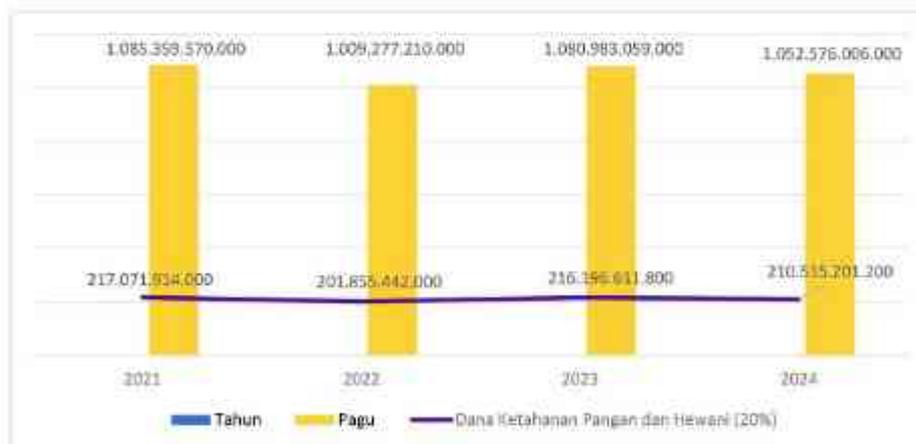
f. Alokasi Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN, dinyatakan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total alokasi dana desa. Tujuan kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa;
- Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat desa;
- Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Secara umum total alokasi dana desa untuk Provinsi Bengkulu berada diatas satu triliun rupiah, alokasi terbesar pada tahun 2021 sebesar Rp1,085 triliun, terendah pada tahun 2022 sebesar Rp1,009 triliun. Data selengkapnya terdapat pada gambar dibawah ini.

Grafik 4.11 Alokasi Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani Tahun 2021 s.d. 2024 pada Provinsi Bengkulu



Sumber: OMSPAN TKD (diolah)

g. Alokasi Belanja APBD terkait Perubahan Iklim

Alokasi Belanja APBD terkait belanja perubahan iklim pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu total sebesar Rp23,7 Miliar, dana tersebut tersebut tersebar di berbagai OPD. Data selengkapnya terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6 Alokasi Belanja APBD Pemda Provinsi Bengkulu Terkait Perubahan Iklim Tahun 2024

OPD	Program/SubKegiatan	Total anggaran
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	<p>Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan sebaran publik, pestisida, Alsintan, dan sarana pendukung pertanian • Perbanyak benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang • Perbanyak benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih <p>Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertanian <p>Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan dan hortikultura, dan perkebunan 	Rp25.020.000.000
Dinas Kelautan dan Perikanan	<p>Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat • Rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil • Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 	Rp430.000.000
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Program perencanaan lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi • Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJDP/RPJMD <p>Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut • Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 	Rp3.715.000.000
	<p>Program pengelolaan keanekaragaman hayati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati <p>Program pengelolaan persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah 	



OPD	Program/SubKegiatan	Total anggaran
	<p>di TPS/TPST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST • Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi <p>Program pengelolaan hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan • Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi • Pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara • Pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan • Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi • Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan <p>Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan • Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial 	
Dinas Ekonomi Sumber Daya Manusia (ESDM)	<p>Program pengelolaan mineral dan batubara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan bantuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil laut. • Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 daerah provinsi • Pembinaan pelaksanaan izin usaha pertambangan • Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi 	Rp1.305.000.000



OPD	Program/SubKegiatan	Total anggaran
Dinas Perhubungan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan (LLAJ) Provinsi 	Rp660.000.000
Dinas PUPR	Program pengelolaan sumber daya air (SDA) <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi 	Rp300.000.000

Sumber: Pemda terkait (diolah)

4.3.2 Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan non Belanja

Berdasarkan hasil rapat pembahasan tematik ALCO dengan DLHK Provinsi Bengkulu, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, DTPHP Provinsi Bengkulu, DKP Provinsi Bengkulu, Bappeda Provinsi Bengkulu, BPS Provinsi Bengkulu serta BMKG Provinsi Bengkulu sesuai surat undangan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Nomor S-950/WPB.09/2024 tanggal 10 Juni 2024 serta sumber dokumentasi pemberitaan di website, telah teridentifikasi kebijakan mitigasi dampak perubahan iklim sebagai berikut:

Tabel 4.7 Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Non Belanja Tahun 2024

No	Klasifikasi Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim	Kebijakan yang Telah Dilakukan
1	Pengurangan Emisi dari sumber energi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana alat tangkap nelayan dan pelatihan penggunaan kapal yang lebih besar yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar per output/tangkapan ikan (Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Bengkulu). • Bantuan proyek/program penurunan emisi karbon dengan menggunakan lembaga perantara atau <i>non governmental organization</i> (NGO) dari KLH dan Kementerian Kehutanan sebesar USD 727.255 atau Rp11 miliar lebih. • Sumber: https://kalsei.antaraneews.com/rilis-pers/3911109/bengkulu-terima-insentif-karbon-rp11-miliar
2	Pengelolaan Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi pembenihan 0-5 tahun peningkatan restorasi kondisi ekosistem laut, terumbu karang, dan ekosistem lainnya yang rusak (Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Bengkulu). • Gerakan Penanaman Serentak Mangrove "Penanaman Mangrove Untuk Pemulihan DAS dan Mitigasi Perubahan Iklim" • Sumber: https://bengkuluprov.go.id/tanam-mangrove-upaya-bengkulu-selamatkan-bumi-dari-perubahan-iklim/ • Gerakan Penanaman Pohon Serentak (inflasi menanam) Sumber: https://www.rri.co.id/daerah/499148/gubernur-rohidin-tanam-pohon-dalam-rangka-mitigasi-perubahan-iklim

Kekecewaan itu harus kita salurkan dengan bekerja lebih baik lagi dan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi."

Sri Mulyani Indrawati



No	Klasifikasi Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim	Kebijakan yang Telah Dilakukan
3	Pertanian Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Program penanaman padi gogo / padi darat dan tadah hujan, bantuan berupa benih padi darat ke kelompok-kelompok tani dan pompanisasi yang merupakan program kerjasama kementerian pertanian melalui MoU dengan TNI Polri dan PSIP. - Pembuatan Pupuk kompos Organik - Sumber: https://bengkulu.bsip.pertanian.go.id/berita/bsip-bengkulu-dampngi-siswa-magang-dalam-pembuatan-pupuk-kompos-organik
4	Pengelolaan Limbah	<ul style="list-style-type: none"> - Program mitigasi perubahan iklim telah diberikan kepada 67 lokasi desa Kawasan ProKLIM program pembangunan Kawasan iklim. - Pengelolaan sampah di TPA Sebakul Kota Bengkulu - Sumber: https://bengkulu.antaraneews.com/berita/291807/dih-kota-bengkulu-usulkan-lima-hektare-untuk-perluasan-tpa-air-sebakul
5	Teknologi dan Inovasi	Membuat aplikasi pendeteksi pergerakan komoditas ikan – aplikasi dari kementerian kelautan (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu).
6	Kebijakan dan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu evaluasi terkait Tingkat kepatuhan Perusahaan atau produsen terhadap kebijakan proklam dan hal ini terdapat insentif (reward) dan sanksi. - Dukungan penuh dalam penurunan emisi gas rumah kaca sektor FOLU - Sumber: https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7027/dukungan-penuh-langkah-maju-penurunan-emisi-grk-sektor-folu-di-bengkulu
7	Edukasi dan Kesadaran Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah lapang iklim dan Sekolah lapang cuaca (BMKG). - Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklam) di Provinsi Bengkulu. - Sumber: https://www.bengkuluinteraktif.com/target-20-ribu-kampung-iklim-terwujud-di-provinsi-bengkulu
8	Kerjasama Internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Penandatanganan MoU dengan investor dari Swiss Green Projects sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Bengkulu untuk pengelolaan sampah yang berada di tempat pembuangan akhir (TPA) agar pengolahan sampah menjadi lebih bermanfaat. - Sumber: https://dih.bengkulukota.go.id/dinas-lingkungan-hidup-kota-bengkulu-datangkan-investor-dari-swiss-dalam-pengelolaan-sampah/

Sumber: Media (diolah).

4.4 Evaluasi atas *Policy Response* Pemerintah dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim

Evaluasi terhadap kebijakan respon pemerintah daerah dalam memitigasi dampak perubahan iklim menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini mencakup analisis terhadap efektivitas belanja dan non-belanja dalam konteks mitigasi perubahan iklim (Putri & Kusuma, 2019). Efektivitas belanja merujuk pada bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan untuk program-program mitigasi perubahan iklim, seperti pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, atau perbaikan infrastruktur yang tahan iklim. Di sisi lain, efektivitas non-belanja melibatkan aspek-aspek seperti regulasi, koordinasi antar lembaga, dan peningkatan

penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik, mengungkap tantangan, dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan upaya mitigasi dampak perubahan iklim secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Evaluasi belanja pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim merupakan proses penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Aspek ini mencakup beberapa komponen kunci diantaranya 1) alokasi anggaran dimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program-program terkait mitigasi perubahan iklim. Hal ini melibatkan analisis proporsi anggaran yang dialokasikan untuk berbagai sektor seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, transportasi ramah lingkungan, dan adaptasi infrastruktur (Mardiyah & Nurkhollis, 2020); 2) efisiensi penggunaan dana guna mengevaluasi sejauh mana dana yang dialokasikan digunakan secara efisien (Pratiwi et al., 2019); 3) dampak program yang didanai terhadap tujuan mitigasi perubahan iklim (Sulistiowati et al., 2021); 4) kesesuaian dengan tujuan kebijakan dimana belanja pemerintah sejalan dengan tujuan kebijakan mitigasi perubahan iklim yang telah ditetapkan (Wijaya et al, 2017); 5) transparansi dan akuntabilitas seperti penggunaan dana dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melaporkan hasil program mitigasi perubahan iklim (Putri & Kusuma, 2019); 6) potensi keberlanjutan program jangka panjang dan kemampuan menarik investasi swasta (Setiadi & Pratiwi, 2016); 7) kapasitas absorpsi yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap dan mengelola dana yang dialokasikan untuk program mitigasi perubahan iklim termasuk kendala dalam implementasi program dan identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas (Mardiyah & Nurkhollis, 2020); 8) sinergi antar program secara keseluruhan (Pratiwi et al, 2019).

Selain itu, evaluasi non-belanja pemerintah, terutama dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat, merupakan aspek juga tak kalah penting mendapat perhatian. Efektivitas kegiatan-kegiatan ini sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program mitigasi perubahan iklim karena melibatkan masyarakat umum sekitar. Dalam evaluasi kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek kunci diantaranya 1) jangkauan program dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat (Nurdianto & Munawar, 2018); 2) efektivitas metode penyampaian informasi tentang perubahan iklim seperti melalui seminar, workshop, kampanye media sosial, program edukasi, program bakti sosial, atau program lainnya yang mempertimbangkan kesesuaian metode dengan karakteristik kelompok sasaran (Wibowo & Ginanjar, 2020); 3) perubahan literasi dan sikap masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mitigasi (Hardiyansyah et al, 2019); 4) peningkatan kesadaran dan perilaku seperti pengurangan sampah plastik, penghematan energi, dan partisipasi dalam program mitigasi perubahan iklim lainnya (Putri & Kusuma, 2019); 5) kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti LSM, institusi pendidikan dan sektor swasta dalam menjalankan program peningkatan kesadaran dampak perubahan iklim; 6) inovasi dan adaptasi program termasuk penggunaan teknologi baru dalam penyampaian informasi; 7) umpan balik dari masyarakat dan perbaikan program yang berkelanjutan.

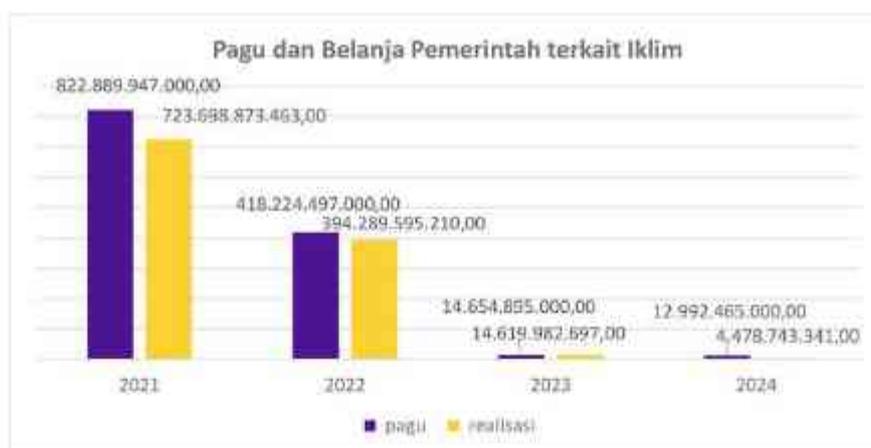
Evaluasi komprehensif terhadap aspek-aspek non-belanja ini penting untuk memastikan bahwa upaya peningkatan kesadaran masyarakat berkontribusi secara efektif terhadap strategi mitigasi perubahan iklim secara keseluruhan. Maka dari itu, diperlukan adanya kajian evaluasi respon kebijakan pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Evaluasi komprehensif terhadap aspek-aspek belanja pemerintah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, hasil evaluasi dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan dan pengembangan program, serta membantu mengoptimalkan belanja pemerintah dan non belanja pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim terkhusus di Provinsi Bengkulu.

a. Kinerja Belanja Anggaran terkait Perubahan Iklim

Evaluasi respon kebijakan pemerintah daerah terhadap mitigasi dampak perubahan iklim di Provinsi Bengkulu dilakukan dengan dua (2) pendekatan yaitu 1) pendekatan analisa kinerja belanja pemerintah di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari belanja K/L, Transfer ke Daerah (TKD) dan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu untuk alokasi anggaran perubahan iklim, dan 2) pendekatan kualitatif guna mengevaluasi program-program non belanja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu yang telah dilakukan melalui laporan, sumber dan/atau dokumentasi yang terpublikasi.



Grafik 4.12 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah terkait Perubahan Iklim selama tahun 2021 s.d. 2024



Sumber: data Sintesa, 2024 (diolah)

Tabel 4.8 Kinerja Belanja K/L terkait Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu tahun 2021 s.d. 2024

Tahun	pagu	realisasi	%	Kategori
2021	822.889.947.000,00	723.698.873.463,00	87,95%	Cukup
2022	418.224.497.000,00	394.289.595.210,00	94,28%	Baik
2023	14.654.895.000,00	14.619.982.697,00	99,76%	Sangat Baik
2024	12.992.465.000,00	4.478.743.341,00	34,47%	-

Sumber: data Sintesa, 2024 (diolah)

Kinerja realisasi belanja K/L terkait perubahan iklim di Provinsi Bengkulu selama tahun 2021 s.d. tahun 2024 tampak pada gambar dan tabel diatas. Kinerja belanja Pemerintah terkait perubahan iklim pada tahun 2021 terkendala karena masih dalam tanggap darurat pandemi COVID-19, beberapa kegiatan sosialisasi/FGD/sejenisnya tidak dapat dilaksanakan secara luring tapi secara umum output tercapai walaupun realisasi anggaran tidak tercapai karena kegiatan dilaksanakan secara daring, terdapat juga kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dengan pagu Rp28,4 Miliar yang dialihkan pelaksanaannya di tahun 2022. Kinerja realisasi belanja pada tahun 2022 termasuk kategori baik, terdapat kegiatan pengembangan jaringan irigrasi air manjuto yang ditingkatkan tidak terserap optimal dari pagu Rp48,5 Miliar hanya terserap Rp28,5 Miliar (58,8%). Kinerja realisasi belanja pada tahun 2023 termasuk kategori sangat baik, sementara kinerja realisasi belanja s.d. triwulan II 2024 dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 50 persen.

Secara umum tren alokasi pagu dan realisasi terkait perubahan iklim selama tahun 2021 s.d. 2024 mengalami tren penurunan. Terdapat beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang tidak mendapatkan alokasi dana terkait perubahan iklim di tahun 2024 yakni Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu faktor penyebab penurunan alokasi anggaran tersebut ialah telah berakhirnya Pandemi COVID-19 karena beberapa kegiatan pada Kementerian PUPR tertanda kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Keberanian untuk melakukan perubahan dan memberantas segala bentuk korupsi merupakan langkah tepat yang akan membuat kita bisa lebih dihargai."

Sri Mulyeni Indrawati

Grafik 4.13 **Pagu-Realisasi Belanja K/L untuk Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu per Juni 2024**



Sumber: data Sintesa, 2024 (diolah)

Tabel 4.9 **Kinerja Belanja K/L untuk Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu tahun 2023- per Juni 2024**

Tabel 4.9 Kinerja Belanja K/L untuk Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu tahun 2023- per Juni 2024

Belanja K/L untuk Adaptasi perubahan iklim	Kategori Kinerja	
	2023	2024
Kementerian Pertanian	98,35% Sangat Baik	26,83%
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99,72% Sangat Baik	35,24%
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	99,44% Sangat Baik	34,82%

Sumber: data Sintesa, 2024

Sumber: data Sintesa, 2024

Realisasi belanja K/L untuk adaptasi perubahan iklim di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 termasuk kategori sangat baik, hal tersebut dilihat dari capaian realisasi belanja mencapai lebih dari 95 persen dari pagu belanja. Namun di tahun 2024 per Juni, penyerapan anggaran pada Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika belum mencapai target penyerapan anggaran pada triwulan II sebesar 50 persen.

Grafik 4.14 **Pagu-Realisasi Belanja K/L untuk Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu per Juni 2024**



Sumber: data Sintesa, 2024 (diolah)

Sumber: OMSRAN TKD (diolah)



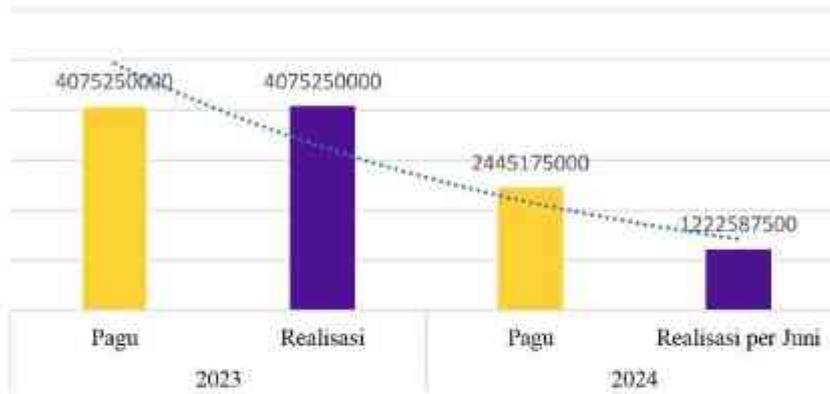
Tabel 4.10 Kinerja Belanja K/L untuk Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Bengkulu tahun 2023- per Juni 2024

Belanja K/L untuk Mitigasi perubahan iklim	Kategori Belanja	
	2023	2024
Kementerian Perhubungan	99,62%	Sangat Baik
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99,37%	Sangat Baik
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	97,05%	Sangat Baik

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Realisasi belanja K/L untuk mitigasi perubahan iklim di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 termasuk dalam kategori sangat baik, hal ini dilihat dari capaian realisasi belanja mencapai diatas 95 persen dari pagu belanja. Di tahun 2024 per Juni, penyerapan anggaran pada Kementerian Perhubungan dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia telah mencapai target penyerapan pada triwulan II sebesar 50 persen.

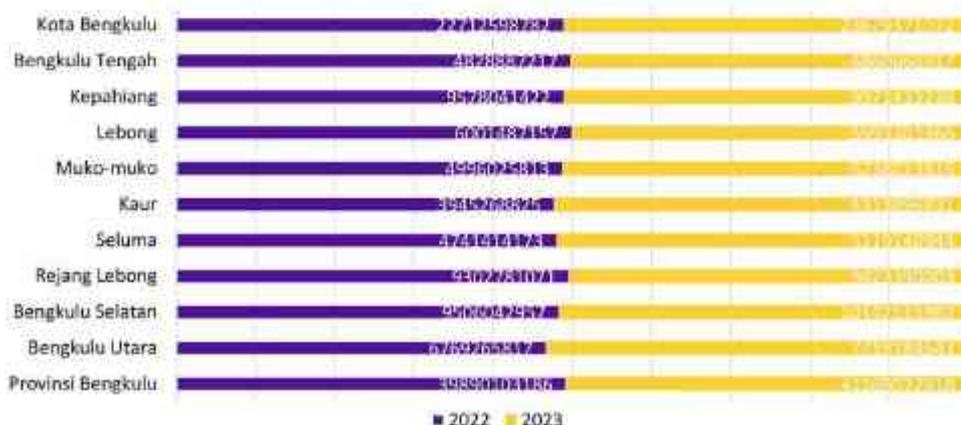
Grafik 4.15 Pagu-Realisasi TKD - DAK Non Fisik untuk Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2023- Per Juni 2024 di Provinsi Bengkulu



Sumber: Sintesa, 2024 (diolah)

Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) terkhusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 mengalami kontraksi pagu anggaran dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 pagu anggaran TKD DAK Non Fisik untuk Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mencapai 4 Triliun namun di tahun 2024 pagu anggaran tersebut turun menjadi 2.4 triliun. Secara umum kinerja realisasi belanja TKD khususnya DAK Nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun 2023 termasuk kategori sangat baik, demikian pula kinerja realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2024 telah mencapai target penyerapan yang telah ditetapkan.

Grafik 4.16 Realisasi APBD Bengkulu - belanja fungsi untuk urusan Lingkungan Hidup 2022-2023



Sumber: OMSPAN, 2024 (diolah)

Berdasarkan gambar 4 dan 5 menunjukkan bahwa secara umum realisasi APBD Bengkulu pada belanja fungsi untuk urusan lingkungan hidup dari 2020 mengalami peningkatan ke tahun 2023. Namun hanya satu kabupaten yang mengalami kontraksi realisasi sebesar -0.14 persen di Kabupaten Lebong.

Grafik 4.17 Presentase kenaikan APBD Bengkulu - belanja fungsi untuk urusan Lingkungan Hidup dari tahun 2022-2023



Sumber: QMSPAN, 2024 (diolah)

b. Pelaksanaan Program Kebijakan non Belanja terkait Perubahan Iklim

Evaluasi program non-belanja pemerintah, terutama dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat, evaluasi kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

1. Jangkauan program dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat;
2. Metode penyampaian informasi tentang perubahan iklim seperti melalui seminar, workshop, kampanye media sosial, program edukasi, program bakti sosial, atau program lainnya yang mempertimbangkan kesesuaian metode dengan karakteristik kelompok sasaran;
3. Perubahan literasi dan sikap masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mitigasi;
4. Peningkatan kesadaran dan perilaku seperti pengurangan sampah plastik, penghematan energi, dan partisipasi dalam program mitigasi perubahan iklim lainnya;
5. Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti LSM, institusi pendidikan dan sektor swasta dalam menjalankan program peningkatan kesadaran dampak perubahan iklim;
6. Inovasi dan adaptasi program termasuk penggunaan teknologi baru dalam penyampaian informasi;
7. Umpan balik dari masyarakat dan perbaikan program yang berkelanjutan.

Beberapa pelaksanaan program non belanja di Provinsi Bengkulu diantaranya sebagai berikut:

1) Program Kampung Iklim (Proklim) di Provinsi Bengkulu

Program ini diinisiasi untuk menciptakan kesadaran akan dampak perubahan iklim dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi. Proklim adalah program yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim. Program ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan tersebut.

Proklim menciptakan pendekatan inovatif melalui kemitraan publik-swasta dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 melalui upayanya sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan kerja sama internasional. Proklim dilaksanakan dengan beberapa tujuan, di antaranya:



1. Meningkatkan Pemahaman: Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim dan dampaknya.
2. Kemandirian Masyarakat: Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan tradisional.
3. Jembatan Kebutuhan: Menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang memberikan dukungan untuk aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
4. Kerjasama Nasional dan Daerah: Meningkatkan kerjasama di semua tingkatan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi.
5. Gerakan Nasional: Menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan berbasis masyarakat yang aplikatif dan berkelanjutan.

2) Kegiatan MOU BMKG dengan Stakeholders terkait untuk Percepatan Pemberian Informasi Cuaca dan Iklim

Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan upaya komunikasi Sinergi dan Kolaborasi dalam rangka percepatan penyebaran informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Provinsi Bengkulu kepada stakeholder dan masyarakat untuk mengurangi resiko kerugian akibat bencana.

3) Program Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi di Provinsi Bengkulu

PAT padi di Provinsi Bengkulu berbentuk padi gogo, sebab varietas padi gogo merupakan padi unggulan yang dapat ditanam pada areal perkebunan dan tidak membutuhkan irigasi khusus sehingga padi gogo tersebut dapat ditanam pada di wilayah atau area lahan yang terbengkalau dan tidak termanfaatkan dengan baik.

4) Aplikasi laut Nusantara sebagai alat pendeteksi keberadaan komoditas ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan XL Axiata

Aplikasi Laut Nusantara besutan Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama XL Axiata kini mampu mendeteksi keberadaan ikan tuna sirip kuning, tuna sirip biru, dan albacore yang ketiganya memiliki nilai ekonomi tinggi dan primadona di pasar dunia. Keberadaan fitur pendeteksi ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi merupakan terobosan dalam upaya meningkatkan pendapatan para nelayan dengan mengubah paradigma nelayan dari mencari ikan menjadi menangkap ikan. Dalam aplikasi ini, informasi ditampilkan secara sederhana untuk membantu nelayan sehingga kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan aman.

5) Gerakan Penanaman Serentak Mangrove

Pemanasan global menjadi isu besar yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan makhluk hidup di dunia, yakni perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Peningkatan karbondioksida di atmosfer merupakan salah satu penyebab terbesar terjadinya pemanasan global, mangrove menjadi solusi dan memberi banyak manfaat bagi kehidupan kita. Mangrove merupakan ekosistem kaya karbon yang mampu mencegah pelepasan emisi karbon ke udara. Daerah Bengkulu yang wilayahnya terletak disepanjang bibir garis pantai barat Sumatera membutuhkan mangrove sebagai upaya menjaga ekosistem laut, melestarikan biota laut, penahan ombak dan tsunami. Keberadaan mangrove memberikan fungsi dan manfaat baik bagi lingkungan. Mangrove dapat menjadi objek daya tarik wisata alam serta atraksi eko wisata dan tentu menambah pendapatan masyarakat sekitar pesisir.

6) Gerakan Penanaman Pohon Serentak

Penanaman pohon serentak se-Indonesia yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus membangkitkan semangat, motivasi dan menggerakkan seluruh elemen masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu untuk menanam dan memelihara pohon.



7) Penunjukkan *Green Ambassador* Provinsi Bengkulu

Sebanyak 1.994 pelajar dari 1.068 sekolah lingkup Provinsi Bengkulu ditetapkan sebagai *Green Ambassador* yang dipersiapkan sebagai generasi muda yang kreatif, produktif, inovatif dan berdedikasi untuk melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan. *Green Ambassador* diharapkan bergerak memulihkan lingkungan dan kehutanan dengan lebih masif, inklusif, dan inovatif, sehingga bumi dapat kembali pulih dan nyaman untuk ditinggali bagi semua makhluk hidup.

Tabel 4.11 **Program mitigasi perubahan iklim pemerintah daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan dokumentasi publikasi**

Nama Kegiatan
Gerakan Penanaman Serentak Mangrove "Penanaman Mangrove Untuk Pemulihan DAS dan Mitigasi Perubahan Iklim" Sumber: https://bengkuluprov.go.id/tanam-mangrove-upaya-bengkulu-selamatkan-bumi-dari-perubahan-iklim/
Gerakan Penanaman Pohon Serentak (inflasi menanam) Sumber: https://www.rri.co.id/daerah/499148/gubernur-rohidin-tanam-pohon-dalam-rangka-mitigasi-perubahan-iklim
Sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Provinsi Bengkulu Sumber: https://www.bengkuluinteraktif.com/target-20-ribu-kampung-iklim-terwujud-di-provinsi-bengkulu https://www.sinarfakta.com/2023/12/17/sosialisasi-program-kampung-iklim-proklim-kota-bengkulu-untuk-peningkatan-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/
Bantuan pompanisasi irigasi dari kementerian pertanian Sumber: https://bengkulu.bsip.pertanian.go.id/berita/bsip-bengkulu-dukung-kegiatan-pompanisasi-di-kabupaten-bengkulu-selatan-dan-seluma https://mediasinarDunia.com/pemerintah-pusat-setujui-pembangunan-irigasi-perpipaan-di-desa-talang-baru-mukomuko
Program penanaman padi Gogo https://www.antaraneWS.com/berita/4121994/pemprov-bengkulu-gelar-gerakan-tanam-padi-gogo-di-pulau-terluar https://bengkulu.bsip.pertanian.go.id/berita/polda-bengkulu-bersama-kementan-gelar-gertam-padi-gogo-di-bengkulu https://bpbdbengkulutengahkab.go.id/postingan/detail_postingan/Penanaman-Padi-Gogo-di-Desa-Air-Putih
Mou Dinas pertanian dan BMKG terkait sinergi pemberian informasi cuaca dan iklim Sumber: https://www.bmkg.go.id/berita/?p=adakan-fgd-bmkg-bengkulu-berkomitmen-tingkatkan-sinergi-dan-kolaborasi&lang=ID
Program Perluasan Areal Tanam (PAT) padi di Provinsi Bengkulu Sumber: https://www.antaraneWS.com/berita/4099851/dinas-pertanian-bengkulu-optimalisasi-program-pat
Bantuan sarana kapal/ perahu dan alat tangkap ikan Sumber: https://bengkulutengahkab.go.id/postingan/detail_postingan/DALAM-MENINGKATKAN-HASIL-TANGKAPAN-IKAN-PEMKAB-BENTENG-SERAHKAN-BANTUAN https://infopublik.id/kategori/nusantara/515706/nelayan-tradisional-dukung-pemerintah-beri-bantuan-alat-tangkap-ramah-lingkungan-untuk-nelayan-trawl?video=
Bantuan pembudidayaan dan pemberian bibit - benih ikan https://infopublik.id/kategori/nusantara/649100/index.html https://www.antaraneWS.com/berita/3407619/dkp-bengkulu-siapkan-rp15-miliar-untuk-budi-daya-ikan-sistem-bioflok https://bengkulu.bsip.pertanian.go.id/berita/bpsip-bengkulu-lakukan-pendistribusian-bantuan-benih-gogo-di-kabupaten-seluma https://bengkulu.antaraneWS.com/berita/353463/pemkot-bengkulu-segera-distribusikan-bantuan-untuk-pembudidayaan-ikan
Bantuan pembangunan rumpon untuk nelayan pesisir https://siberzone.id/dkp-provinsi-bengkulu-usulkan-23-pembangunan-rumpon-guna-dorong-peningkatan-potensi-pesisir

Nama Kegiatan

Bantuan proyek/program penurunan emisi karbon dengan menggunakan lembaga perantara atau non governmental organization (NGO) dari KLH dan Kementerian Kehutanan sebesar USD 727.255 atau Rp11 miliar lebih. <https://kalsel.antaranews.com/rilis-pers/391109/bengkulu-terima-insentif-karbon-rp11-miliar>

Bantuan proyek / program Forestry and other Land Use/FOLU Net Sink 2030.
<https://www.antaranews.com/berita/3734076/dlhk-46-persen-wilayah-bengkulu-untuk-folu-net-sink-2030>
<https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/416065/gubernur-bengkulu-akan-presentasi-program-folu-net-sink-2030-bengkulu-di-klhk>

Aplikasi laut Nusantara sebagai alat pendeteksi keberadaan komoditas ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan XL Axiata <https://bengkulu.antaranews.com/berita/171234/kkp-aplikasi-laut-nusantara-bisa-deteksi-lokasi-ikan-tuna>
<https://www.indonesiaexpose.co.id/2021/07/18/32085/>

c. Analisis Rekomendasi Kebijakan Intervensi Pemerintah dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim melalui Analisis SWOT

Dalam rangka peningkatan efektivitas dari program/kebijakan/belanja pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim perlu dilakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan fenomena perubahan iklim dan sektor-sektor yang terdampak. Analisis rekomendasi menggunakan analisis SWOT, dengan hasil sebagai berikut:

1) Analisis SWOT pada Sektor Perekonomian (Agregat) Bengkulu

Respon kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim terhadap sektor perekonomian di Provinsi Bengkulu, Indonesia:

• **Kekuatan (Strengths):**

1. Bengkulu memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang dapat menjadi modal dalam menghadapi perubahan iklim.
2. Pemerintah daerah telah menyadari pentingnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sehingga telah menyusun rencana aksi daerah.
3. Adanya dukungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

• **Kelemahan (Weaknesses):**

1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani isu perubahan iklim.
2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
3. Infrastruktur dan sistem penanggulangan bencana yang masih belum memadai.

• **Peluang (Opportunities):**

1. Pengembangan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan yang dapat menjadi solusi dalam menghadapi perubahan iklim.
2. Peningkatan kerjasama regional dan internasional dalam berbagi pengetahuan dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
3. Peluang untuk mengembangkan sektor ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti ekowisata dan pertanian organik.

• **Ancaman (Threats):**

1. Dampak perubahan iklim yang semakin parah, seperti peningkatan suhu, pergeseran pola curah hujan, dan naiknya permukaan air laut.
2. Keterbatasan sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan lingkungan.
3. Ketidakpastian dalam kebijakan dan dukungan pemerintah pusat terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah.

• **Rekomendasi**

1. Berdasarkan analisis SWOT di atas, pemerintah daerah Bengkulu perlu memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:



1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
2. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta meningkatkan kesadaran melalui kampanye dan edukasi.
3. Memperbaiki infrastruktur dan sistem penanggulangan bencana dengan mengintegrasikan aspek perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan.
4. Mengembangkan sektor ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti ekowisata, pertanian organik, dan energi terbarukan.
5. Meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

2) Analisis SWOT dari Sektor Pertanian dan Perkebunan Bengkulu

Respon kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim terhadap sektor pertanian di Provinsi Bengkulu, Indonesia:

• Kekuatan (*Strengths*):

1. Bengkulu memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang subur dan iklim yang mendukung berbagai jenis tanaman.
2. Adanya program dan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pertanian dan perkebunan berkelanjutan.
3. Ketersediaan sumber daya manusia di sektor pertanian dan perkebunan yang berpengalaman.

• Kelemahan (*Weaknesses*):

1. Keterbatasan infrastruktur irigasi dan sistem pengelolaan air yang memadai untuk menghadapi perubahan iklim.
2. Rendahnya adopsi teknologi pertanian dan perkebunan modern dan tahan perubahan iklim oleh petani.
3. Kurangnya anggaran dan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.

• Peluang (*Opportunities*):

1. Peningkatan permintaan untuk produk pertanian organik dan ramah lingkungan.
2. Pengembangan teknologi dan inovasi pertanian dan perkebunan yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti varietas tanaman tahan kekeringan atau banjir.
3. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan organisasi internasional dalam bidang pertanian berkelanjutan.

• Ancaman (*Threats*):

1. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.
2. Serangan hama dan penyakit tanaman yang meningkat akibat perubahan iklim.
3. Konversi lahan pertanian dan perkebunan menjadi lahan non-pertanian/perkebunan akibat urbanisasi dan pembangunan infrastruktur.

• Rekomendasi

Berdasarkan analisis SWOT di atas, pemerintah daerah Bengkulu dapat menerapkan beberapa strategi berikut untuk menghadapi perubahan iklim dalam sektor pertanian:

1. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur irigasi dan sistem pengelolaan air yang adaptif terhadap perubahan iklim.
2. Mendorong adopsi teknologi pertanian dan perkebunan modern dan tahan perubahan iklim melalui program pelatihan dan penyuluhan bagi petani.
3. Meningkatkan anggaran dan dukungan untuk penelitian dan pengembangan varietas tanaman tahan perubahan iklim serta praktik pertanian/perkebunan berkelanjutan.
4. Mengembangkan pertanian organik dan ramah lingkungan untuk memenuhi permintaan pasar dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
5. Memperkuat kerjasama dengan lembaga penelitian dan organisasi internasional dalam bidang pertanian dan perkebunan berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim.
6. Menerapkan kebijakan yang melindungi lahan pertanian dan perkebunan dari konversi lahan dan menjaga keberlanjutan produksi pangan.



3) Analisis SWOT dari Sektor Perikanan Bengkulu

Respon kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim terhadap sektor perikanan di Provinsi Bengkulu, Indonesia:

• **Kekuatan (Strengths):**

1. Bengkulu memiliki wilayah perairan laut dan sumber daya perikanan yang besar.
2. Adanya program dan kebijakan pemerintah daerah untuk pengembangan sektor perikanan berkelanjutan.
3. Ketersediaan sumber daya manusia di sektor perikanan yang berpengalaman.

• **Kelemahan (Weaknesses):**

1. Kurangnya infrastruktur dan teknologi pendukung, seperti pelabuhan perikanan dan fasilitas pendingin ikan.
2. Rendahnya adopsi teknologi dan praktik perikanan ramah lingkungan. Terbatasnya anggaran dan pendanaan untuk penelitian dan pengembangan sektor perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim.

• **Peluang (Opportunities):**

1. Peningkatan permintaan untuk produk perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Pengembangan teknologi dan inovasi dalam budidaya perikanan yang tahan terhadap perubahan iklim.
3. Kerjasama dengan lembaga penelitian dan organisasi internasional dalam bidang perikanan berkelanjutan.

• **Ancaman (Threats):**

1. Dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu laut, naiknya permukaan air laut, dan kerusakan terumbu karang.
2. Overfishing dan praktik perikanan yang tidak berkelanjutan.
3. Pencemaran laut dan kerusakan ekosistem pesisir akibat aktivitas manusia.

• **Rekomendasi**

Berdasarkan analisis SWOT di atas, pemerintah daerah Bengkulu dapat menerapkan beberapa strategi berikut untuk menghadapi perubahan iklim dalam sektor perikanan:

1. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan teknologi pendukung sektor perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
2. Mendorong adopsi teknologi dan praktik perikanan ramah lingkungan melalui program pelatihan dan penyuluhan bagi nelayan.
3. Meningkatkan anggaran dan dukungan untuk penelitian dan pengembangan budidaya perikanan yang tahan terhadap perubahan iklim.
4. Mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk memenuhi permintaan pasar.
5. Memperkuat kerjasama dengan lembaga penelitian dan organisasi internasional dalam bidang perikanan berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim.
6. Memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah overfishing dan praktik perikanan yang tidak berkelanjutan.
7. Melindungi dan merehabilitasi ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan mangrove untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

4) Analisis SWOT dari Sektor Pariwisata Bengkulu

Respon kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan iklim terhadap sektor pariwisata di Provinsi Bengkulu, Indonesia:

• **Kekuatan (Strengths):**

1. Bengkulu memiliki potensi pariwisata alam yang besar, seperti pantai, gunung, dan hutan.
2. Adanya program dan kebijakan pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan.
3. Kekayaan budaya dan warisan sejarah yang dapat menjadi daya tarik wisatawan.

• **Kelemahan (Weaknesses):**

1. Infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang masih terbatas dan belum memadai.
2. Kurangnya promosi dan pemasaran yang efektif untuk menarik wisatawan.

3. Terbatasnya sumber daya manusia yang terampil di bidang pariwisata berkelanjutan.

• **Peluang (Opportunities):**

1. Peningkatan minat wisatawan terhadap ekowisata dan pariwisata berkelanjutan.
2. Peluang untuk mengembangkan jenis pariwisata baru seperti agrowisata dan desa wisata.
3. Kerjasama dengan lembaga pariwisata internasional untuk mempromosikan pariwisata Bengkulu.

• **Ancaman (Threats):**

1. Dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu, cuaca ekstrem, dan naiknya permukaan air laut yang dapat merusak destinasi wisata.
2. Eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan yang dapat mengurangi daya tarik pariwisata.
3. Persaingan dengan destinasi pariwisata lain di Indonesia atau negara tetangga.

• **Rekomendasi**

Berdasarkan analisis SWOT di atas, pemerintah daerah Bengkulu dapat menerapkan beberapa strategi berikut untuk menghadapi perubahan iklim dalam sektor pariwisata:

1. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan tahan terhadap perubahan iklim.
2. Melakukan promosi dan pemasaran yang efektif untuk menarik wisatawan dengan menekankan pariwisata berkelanjutan.
3. Memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata berkelanjutan.
4. Mengembangkan jenis pariwisata baru seperti ekowisata, agrowisata, dan desa wisata yang meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
5. Memperkuat kerjasama dengan lembaga pariwisata internasional untuk mempromosikan dan meningkatkan standar pariwisata berkelanjutan.
6. Memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk melindungi lingkungan dan menjaga keberlanjutan destinasi wisata.
7. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

***"Bagaimana bisa kalian
mengharapkan perubahan tanpa
merubah diri kalian terlebih dahulu."***

Sri Mulyani Indrawati

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



DJPb Bengkulu berkomitmen untuk melaksanakan upaya-upaya yang berkaitan dengan anti penyuapan sesuai SMAP ISO 37001:2016

Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu beserta seluruh KPPN dibawahnya dapat terus menyajikan pelayanan dengan bersih, jujur dan transparan demi terciptanya good governance.



Kawasan sejarah yang dihuni masyarakat keturunan tionghoa di Bengkulu. Kawasan ini juga merupakan pusat kuliner *street food*.

KAMPUNG *China*

05 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab 1 sampai bab 4, berikut hal-hal yang dapat disimpulkan dan dijadikan catatan penting dalam Kajian Fiskal Regional triwulan II tahun 2024 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu.

Kinerja Indikator Perekonomian dan Kesejahteraan

1. Perekonomian Provinsi Bengkulu triwulan II 2024 tetap tumbuh positif 4,70 persen (yoy)

Berdasarkan lapangan usaha, Perekonomian Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,82 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi komponen penyumbang terbesar sebesar 41 persen. Hingga akhir triwulan II 2024, nilai **nominal PDRB Provinsi Bengkulu mencapai Rp26,50 triliun (ADHB) dan sebesar Rp13,91 triliun (ADHK tahun 2010)**. Secara spasial PDRB Bengkulu berkontribusi sebesar 2,18 persen terhadap PDRB regional Sumatera, ini merupakan yang terendah di regional Sumatera.

2. Perkembangan Inflasi Daerah, pada bulan Juni 2024, tingkat inflasi Provinsi Bengkulu sebesar 3,64 persen (yoy)

Tingkat Inflasi ini terjadi karena kenaikan indeks harga pada sebagian kelompok pengeluaran, terbesar pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,54 persen. **Sedangkan secara month to month (m-to-m) pada bulan Juni 2024 Provinsi Bengkulu mengalami deflasi sebesar 0,04 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Juni 2024 sebesar 1,56 persen**. Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional di bulan Juni 2024 yang berkisar pada angka -0,08 persen (mtm) dan sebesar 2,51 persen (yoy), maka inflasi Provinsi Bengkulu berada lebih tinggi dibandingkan nasional baik secara yoy maupun secara mtm.

3. Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bengkulu secara umum mulai membaik

Indikator kesejahteraan mengalami peningkatan/perbaikan kinerja yaitu **Tingkat Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 13,56 persen menurun 0,48 persen** dibanding Maret 2023 yang sebesar 14,04 persen namun masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,03% dan termasuk 18 provinsi di bawah nasional serta tertinggi nomor dua di regional Sumatera setelah Provinsi Aceh; **Rasio Gini Maret 2024 (0,342) meningkat tipis sebesar 0,009 persen poin** dari Rasio Gini Maret 2023 (0,333); **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 turun 0,04 persen poin** menjadi 3,49 persen dibandingkan Februari 2023; **NTP Provinsi Bengkulu Juni 2024 sebesar 181,42 atau naik 3,49 persen** dibanding NTP bulan Mei 2024; **NTN Juni 2024 berada pada level 107,08 mengalami penurunan 0,79 persen** dari bulan Mei 2024.

Kinerja Fiskal Regional Provinsi Bengkulu

1. Kinerja APBN sisi pendapatan mengalami penurunan sebesar 13,1 persen. Sementara kinerja APBN sisi belanja tumbuh sebesar 14 persen

Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan APBN sampai dengan akhir Triwulan II 2024 sebesar Rp1.598,30 miliar atau 47,97 persen dari estimasi pendapatan yang ditargetkan. **Kinerja ini turun 13,1 persen dibandingkan Triwulan II TA 2023. Namun kontraksi ini semakin kecil apabila dibandingkan triwulan I TA 2024 yang sebesar 15,3%**. Seluruh komponen pendapatan negara mengalami penurunan. Kinerja Pendapatan Perpajakan turun 7,3 persen sedangkan PNBPN turun 25,5 persen. Penurunan kinerja pendapatan disebabkan oleh menurunnya produksi sawit akibat musim trek serta menurunnya

permintaan ekspor CPO, selain itu permintaan ekspor dan harga batu bara juga mengalami penurunan. Dari sisi kontribusi belanja pemerintah, kontraksi realisasi belanja modal dan DAK Fisik juga menyumbang perlambatan realisasi penerimaan pajak.

Dari sisi pengeluaran, belanja APBN hingga akhir triwulan II 2024 sebesar Rp7.545,81 miliar atau 46,69 persen dari pagu, naik sebesar 14 persen dibandingkan semester II 2023. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.368,42 miliar naik signifikan sebesar 20,1 persen sementara belanja TKD sebesar 5.177,4 miliar naik sebesar 11,4 persen. Meningkatnya kinerja belanja didorong oleh pelaksanaan pemilu 2024 pada awal tahun, kenaikan gaji, pembayaran THR, dan gaji ketiga belas. Kontraksi realisasi belanja modal disebabkan oleh adanya blokir anggaran dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan perlambatan realisasi DAK Fisik disebabkan oleh adanya penyesuaian regulasi dan sistem sehingga penyaluran baru efektif mulai bulan Mei 2024. Sementara penurunan kinerja penyaluran Dana Insentif Fiskal dipicu oleh turunnya alokasi Dana Insentif Fiskal yang cukup signifikan pada TA 2024.

2. Kinerja APBD baik Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda) sisi pendapatan mengalami kenaikan sebesar 31,77 persen, sementara sisi belanja juga mengalami kenaikan sebesar 21,99 persen

Realisasi pendapatan APBD Provinsi Bengkulu hingga akhir triwulan II 2024 tercatat Rp5.304,69 miliar, naik 31,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja naik sebesar 21,99 persen yang terealisasi sebesar Rp4.796,23 miliar. Seluruh komponen pendapatan daerah mengalami kenaikan kecuali Komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang belum ada realisasi serupa dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Komponen belanja operasi naik sebesar 25,70 persen dan belanja transfer pemerintah daerah naik 12,74 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara komponen belanja modal turun 4,03 persen dan belanja tidak terduga turun 0,59 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kendala dalam pelaksanaan APBD ialah adanya pendapatan transfer (TKD) khususnya DAK Fisik yang belum optimal penyalurannya sehingga realisasi belanja modal juga mengalami perlambatan.

Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah

1. Analisis Antara RO Harmonis dengan Total Alokasi Belanja K/L Tingkat Wilayah

Porsi alokasi pagu belanja K/L yang mendukung DAK Fisik sampai dengan triwulan II tahun 2024 dibandingkan total pagunya cukup signifikan, hal ini sebagai wujud dukungan dalam harmonisasi DAK Fisik di daerah.

1. Kementerian PUPR, dengan nilai pagu Rp777,59 Miliar atau 65,55 persen dari total pagu yang dimiliki oleh satker lingkup Kementerian PUPR di Bengkulu dengan jumlah Satker sebanyak 14 satker yang terdiri dari 125 RO pada DIPA;
2. Kementerian Dikbud, Riset dan Teknologi, dengan alokasi pagu belanja yang mendukung DAK Fisik sebesar Rp44,27 Miliar atau dengan porsi 7,25 persen dari total pagunya, dengan jumlah satker sebanyak 6 satker dan 54 RO;
3. Kementerian Pertanian, dengan alokasi pagu sebesar Rp4,17 Miliar atau 13,07 persen dari total pagunya, dengan jumlah satker sebanyak 13 satker dan jumlah RO 67;
4. Kementerian Kesehatan, dengan alokasi pagu belanja pendukung DAK Fisik terkecil sebesar Rp2,54 Miliar atau 2,78 persen dari porsi total pagunya, dengan jumlah satker sebanyak 3 satker dan 107 RO.

2. Analisis Alokasi Belanja K/L Per Bidang

Analisis alokasi Belanja pada setiap Bidang di Kementerian/Lembaga antara lain:

- 1) Kementerian PUPR**, Alokasi belanja sebagai pendukung DAK Fisik tersebar pada 3 Bidang, yaitu:
 - a. Bidang Air Minum, alokasi pagu sebesar Rp296,48 Miliar dengan capaian realisasi 4,84 persen dari pagu. Bidang ini diampu oleh 4 satker dengan jumlah RO sebanyak 5 RO;
 - b. Bidang Jalan, alokasi pagu belanja terbesar dibandingkan dengan bidang lain, sebesar Rp479,06 Miliar, dengan serapan realisasi sebesar 33,74 persen dari pagu. Alokasi belanja tersebar pada 3 Satker dengan 21 RO;
 - c. Bidang Sanitasi, alokasi pagu belanja terkecil dibandingkan bidang lain, dengan nilai sebesar Rp2,05 Miliar, serapan realisasi 34,37 persen, dan bidang ini hanya diampu oleh satu Satker;

2) Kementerian Dikbud, Riset dan Teknologi, sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang Pendidikan, maka satker lingkup Kementerian Dikbud, Riset dan Teknologi yang berjumlah 3 Satker mengampu bidang ini, alokasi belanjanya sebesar Rp44,23 Miliar dengan serapan realisasi sebesar 22,27 persen.

3) Kementerian Pertanian, alokasi belanja pada bidang pertanian sebesar Rp4,17 Miliar dengan serapan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 36,60 persen dari pagu, tersebar pada 7 satker sebagai pengampu dan dibebankan pada 15 RO.

4) Kementerian Kesehatan, Pada bidang Kesehatan hanya terdiri dari 1 satker dengan alokasi belanja tidak begitu signifikan nilainya dibandingkan bidang lain, capaian realisasi sampai dengan triwulan II masih sangat rendah sebesar 3,50 persen dari pagu belanja Rp2,54 Miliar.

Analisis Tematik: Perubahan Iklim dan Upaya Pemerintah untuk Memitigasi Dampaknya

1. Analisis Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Kinerja Sektor Perekonomian Regional (Identifikasi Sektor Terdampak)

Berdasarkan analisis regresi indikator perubahan iklim terhadap produksi unggulan sektor perekonomian, kualitas air berpengaruh positif terhadap produksi perikanan, suhu udara berpengaruh positif terhadap produksi karet, suhu udara juga berpengaruh positif terhadap produksi kopi. Hasil regresi ini menegaskan bahwa perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap sektor pertanian dan perikanan di Provinsi Bengkulu, namun dampak itu bervariasi dari yang negatif sampai positif.

Berdasarkan hasil *focus group discussion* pengaruh perubahan iklim terhadap kinerja sektor perekonomian:

- Pada setiap kabupaten rata-rata 100 ha - 200 ha lahan pertanian mengalami kekeringan. Disamping itu serangan hama menjadi lebih masif;
- Cuaca ekstrem menyebabkan nelayan sering takut untuk melaut, budidaya ikan air tawar/payau terganggu/gagal panen, pengolahan ikan asin juga terganggu;
- Jumlah penyelenggaraan kegiatan/event pariwisata yang tertunda/gagal meningkat signifikan terutama yang *outdoor* yang merupakan potensi wisata utama di Bengkulu.

2. Analisis Policy Responses Pemerintah dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim

Perkembangan alokasi dan realisasi belanja Pemerintah Pusat terkait perubahan iklim pada Provinsi Bengkulu selama tahun 2021 s.d. 2024 menunjukkan tren penurunan. Dari sisi pagu belanja, pagu tertinggi terdapat pada tahun 2021 sebesar Rp822 Miliar, turun menjadi sebesar Rp12,9 Miliar pada tahun 2024 sekaligus menjadi pagu terendah. Terdapat beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang tidak mendapatkan alokasi dana terkait perubahan iklim di tahun 2024 yakni Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu faktor penyebab penurunan alokasi anggaran tersebut ialah telah berakhirnya Pandemi COVID-19 karena beberapa kegiatan pada Kementerian PUPR tertunda kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Terdapat beberapa alokasi transfer ke daerah terkait perubahan iklim di Provinsi Bengkulu yakni pertama, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2024 teralokasi sebesar Rp2,4 Miliar. Kedua, DAK Fisik Bidang Pertanian pada tahun 2024 teralokasi sebesar Rp34,27 miliar turun 11,75 persen dibandingkan tahun 2023. Ketiga, DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 dialokasikan Rp27,36 Miliar naik 6,92 persen dibandingkan tahun 2023. Keempat, DAK Fisik Bidang Irigrasi Tematik Pengutan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan Dan Hewan) pada tahun 2024 dialokasikan Rp35,6 Miliar naik 163 persen dibandingkan tahun 2023. Kelima, DAK Fisik Bidang Jalan Tematik Pengutan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan Dan Hewan) pada tahun 2024 dialokasikan Rp64,4 Miliar naik 39,9 persen dibandingkan tahun 2023. Keenam, alokasi Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan Dan Hewan



yakni Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk Program Ketahanan Pangan Dan Hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total alokasi dana desa. Sedangkan alokasi belanja APBD tahun 2024 terkait belanja perubahan iklim pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu total sebesar Rp23,7 Miliar yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah.

Intervensi Pemerintah melalui kebijakan non belanja pada Provinsi Bengkulu:

1. **Pengurangan emisi dari sumber energi**, kebijakan yang telah dilakukan diantaranya peningkatan sarana alat tangkap nelayan dan pelatihan penggunaan kapal yang lebih besar dan lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar per output/tangkapan ikan dan bantuan proyek/program penurunan emisi karbon dengan menggunakan lembaga perantara atau non governmental organization (NGO) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. **Pengelolaan hutan dan lahan**, kebijakan yang telah dilakukan diantaranya implementasi pembenihan 0-5 tahun peningkatan restorasi kondisi ekosistem laut, terumbu karang, dan ekosistem lainnya yang rusak, gerakan penanaman serentak mangrove, dan gerakan penanaman pohon serentak;
3. **Pertanian berkelanjutan**, kebijakan yang telah dilakukan diantaranya program penanaman padi gogo/padi darat dan tadah hujan, bantuan berupa benih padi darat ke kelompok-kelompok tani dan pompanisasi yang merupakan program kerjasama kementerian pertanian melalui MoU dengan TNI Polri dan PSIP serta pembuatan pupuk kompos organik;
4. **Pengelolaan limbah**, kebijakan yang telah dilakukan diantaranya Program mitigasi perubahan iklim telah diberikan kepada 67 lokasi desa Kawasan program pembangunan Kawasan iklim dan pengelolaan sampah di TPA Sebakul Kota Bengkulu;
5. **Teknologi dan Inovasi**, kebijakan yang telah dilakukan diantaranya membuat aplikasi pendeteksi pergerakan komoditas ikan;
6. **Kebijakan dan Regulasi kebijakan** yang telah dilakukan diantaranya evaluasi terkait tingkat kepatuhan perusahaan atau produsen terhadap kebijakan proklamasi dalam hal ini terdapat insentif (reward) dan sanksi serta dukungan penuh dalam penurunan emisi gas rumah kaca sektor FOLU;
7. **Edukasi dan Kesadaran Publik**, kebijakan yang telah dilakukan diantaranya Sekolah lapang iklim dan Sekolah lapang cuaca (BMKG), serta sosialisasi program kampung iklim (Proklamasi) di Provinsi Bengkulu;
8. **Kerjasama Internasional** kebijakan yang telah dilakukan diantaranya penandatanganan MoU dengan investor dari Swiss Green Projects sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Bengkulu untuk pengolahan sampah yang berada di tempat pembuangan akhir (TPA) agar pengolahan sampah menjadi lebih bermanfaat.

3. Evaluasi atas Policy Response Pemerintah dalam Memitigasi Dampak Perubahan Iklim

Kinerja belanja Pemerintah terkait perubahan iklim pada tahun 2021 termasuk **kategori kinerja cukup** karena terkendala karena masih dalam tanggap darurat pandemi COVID-19, beberapa kegiatan sosialisasi/FGD/sejenisnya tidak dapat dilaksanakan secara luring tapi secara umum output tercapai walaupun realisasi anggaran tidak tercapai karena kegiatan dilaksanakan secara daring, terdapat juga kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dengan pagu Rp28,4 Miliar yang dialihkan pelaksanaannya di tahun 2022. Kinerja realisasi belanja pada tahun 2022 termasuk **kategori baik**, terdapat kegiatan pengembangan jaringan irigrasi Air Manjuto yang ditingkatkan tidak terserap optimal dari pagu Rp48,5 Miliar hanya terserap Rp28,5 Miliar (58,8%). Kinerja realisasi belanja pada tahun 2023 termasuk kategori sangat baik, sementara kinerja realisasi belanja s.d. triwulan II 2024 dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 50 persen.

Kinerja Belanja Transfer ke Daerah (TKD) terkhusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2024 mengalami kontraksi pagu anggaran dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 pagu anggaran TKD DAK Non Fisik untuk Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mencapai 4 Triliun namun di tahun 2024 pagu anggaran tersebut turun menjadi 2.4 triliun. Secara umum kinerja realisasi belanja TKD khususnya DAK Nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun 2023 termasuk kategori sangat baik, demikian pula kinerja realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2024 telah mencapai target penyerapan yang telah ditetapkan.

Secara umum pelaksanaan program kebijakan non belanja pemerintah terkait perubahan iklim terutama dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat telah memenuhi beberapa aspek yang



menjadi indikator keberhasilan. Namun untuk meningkatkan efektivitas dari kebijakan belanja pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim sesuai dengan fenomena iklim dan sektor-sektor yang terdampak telah dilakukan analisis SWOT untuk memberikan rekomendasi intervensi kebijakan yang lebih strategis.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan guna perbaikan kinerja ekonomi dan fiskal di Provinsi Bengkulu:

1. **Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2024 meningkat menjadi 4,70 (yoy) namun masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,05 (yoy), selain itu kontribusi PDRB Bengkulu terhadap PDRB Pulau Sumatera merupakan yang terendah se-Sumatera.** Walaupun tingkat konsumsi masyarakat sudah semakin membaik dengan pertumbuhan 5,05 persen (yoy) namun aktivitas perekonomian masyarakat masih perlu terus didorong sebagaimana sebelum pandemi. Investasi di sektor riil serta hilirisasi pertanian dan perkebunan masih perlu terus ditingkatkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah perlu terus ditingkatkan agar perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh secara inklusif dan akseleratif. Pemerintah harus tetap optimis untuk meningkatkan ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut setidaknya terdapat 3 kebijakan yang harus dilakukan, yaitu: peningkatan konsumsi regional, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi yang harus dilaksanakan secara simultan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi terkait.
2. **Dalam rangka implementasi transformasi ekonomi, Bengkulu perlu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri pengolahan.** Jumlah penduduk miskin mencapai 13,56 persen sementara TPT hanya sebesar 3,17 persen, hal tersebut menandakan sebagian masyarakat bekerja tetapi dengan tingkat upah yang rendah. Sebagian besar angkatan kerja bekerja di sektor informal terutama di sektor pertanian dan perkebunan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Inflasi *year on year (y-on-y)* Juni 2024 Provinsi Bengkulu sebesar 3,64 persen diatas inflasi nasional sebesar 2,51 persen. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau memberikan andil inflasi sebesar 7,54 persen, dan Cabe Merah menjadi komoditas dominan yang memberikan andil inflasi yaitu 0,79 persen. Untuk itu, diperlukan pembangunan industri pengolahan atau hilirisasi produk unggulan di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan seperti beras, cabe merah, minyak goreng dan produk turunan sawit lainnya, produk turunan kopi dan karet, dll) untuk membuka lapangan kerja dengan tingkat upah yang lebih baik. Selain itu, hilirisasi dapat meningkatkan permintaan hasil pertanian dan perkebunan domestik dengan harga yang lebih stabil. Pada akhirnya hilirisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, menekan inflasi (memotong ongkos distribusi), meningkatkan penghasilan masyarakat, dan penurunan angka kemiskinan.
3. **Optimalisasi Pelabuhan Pulau Baal** Pelayanan ekspor oleh PT. Pelindo masih relatif lama serta masih belum memadainya infrastruktur Pelabuhan Pulau Baal untuk ekspor curah cair serta pendangkalan yang terus terjadi sehingga kapal-kapal besar tidak bisa merapat menyebabkan perusahaan penghasil CPO mengalihkan eksportasinya ke pelabuhan lain di pulau Sumatera terutama Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat. Pendangkalan juga menyebabkan tertundanya ekspor cangkang sawit sehingga menimbulkan kontraksi yang cukup dalam pada penerimaan Bea Keluar s.d. triwulan II Tahun 2024. Untuk itu dibutuhkan peningkatan fungsi infrastruktur Pelabuhan Pulau Baal agar kegiatan ekspor maupun impor dapat berjalan dengan optimal. Bila diperlukan pemerintah dapat menerapkan pola KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dengan PT. Pelindo untuk percepatan pengembangan Pelabuhan Pulau Baal. Melalui peningkatan infrastruktur dan didukung oleh implementasi *National Logistic Ecosystem (NLE)* pada Pelabuhan Pulau Baal, diharapkan kegiatan ekspor impor melalui Pelabuhan Baal dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan penerimaan di Bengkulu baik perpajakan, PNBK, maupun PAD serta menggerakkan sektor-sektor ekonomi terkait lainnya.
4. **Pemerintah Daerah Terlambat Menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Mengenai PDRD Sesuai Amanat UU HKPD** Pasal 192 UU HKPD mengatur bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, artinya paling lambat tanggal 5 Januari 2024, kecuali untuk PKB, BBNKB, dan pajak MBLB paling lama 3 tahun. Faktanya sebagian besar pemerintah daerah di Bengkulu terlambat bahkan sampai



dengan 31 Maret 2024 masih terdapat 2 (dua) kabupaten yang belum menerbitkan Perda PDRD yang baru. Sesuai ketentuan penerbitan Perda PDRD juga tidak bisa berlaku surut. Akibatnya pemda tidak punya dasar hukum untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sampai Perda dimaksud diterbitkan.

Dalam surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-32/PK.5/2024 tentang Himbauan Penyampaian Perda PDRD dari DJPK Kemenkeu dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum mengirimkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH. Untuk lebih mendorong kepatuhan pemda dalam melaksanakan amanat UU dan mencegah timbulnya kerugian hilangnya pendapatan asli daerah yang lebih besar yang pada akhirnya akan merugikan pembangunan dan masyarakat secara umum di daerah, perlu diterapkan monitoring yang ketat dan sanksi yang lebih tegas kepada pemda yang terlambat menetapkan Perda baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Perda PDRD juga diperlukan penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perekada). Sampai saat ini Perkada turunan Perda PDRD seluruhnya masih dalam proses penyusunan dan/atau evaluasi. Untuk itu, Pemda diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan Perkada dimaksud agar kejadian hilangnya potensi pendapatan tidak terulang kembali.

5. Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu perlu lebih mengintensifkan penerimaan perpajakan dan retribusi daerah dalam rangka mengurangi ketimpangan fiskal vertikal Mengingat masih rendahnya rasio kemandirian fiskal, pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu agar terus menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah sesuai keunggulan masing-masing daerah seperti destinasi wisata unggulan dan potensi investasi daerah. Pemerintah perlu mengintensifkan penerimaan perpajakan daerah melalui peningkatan basis data perpajakan, penataan kelembagaan, penyempurnaan regulasi, penyesuaian dasar pengenaan perpajakan, serta percepatan digitalisasi penerimaan daerah melalui *cashless transaction*.

6. Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu perlu terus mendorong dan mengintensifkan kinerja ekspor komoditi khas daerah Untuk meningkatkan penerimaan dari bidang ekspor di Provinsi Bengkulu, pemerintah daerah perlu terus mendorong ekspor komoditas unggulan Bengkulu oleh para pelaku UMKM seperti: kopi, kepiting, lintah, dan lain-lain. Kemenkeu Satu melalui DJPBC dapat melakukan pendampingan dan klinik ekspor bagi para pelaku UMKM yang memiliki potensi untuk melakukan ekspor produknya. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi dan PT. Pelindo juga perlu mempercepat realisasi peningkatan fungsi pelabuhan Pulau Bai melalui kerja sama dengan investor dan/atau melalui skema KPBU.

7. Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu perlu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah Bengkulu memiliki potensi ekonomi yang luar biasa meliputi potensi sumber daya alam, wisata, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Seluruh potensi ini harus dimanfaatkan secara optimal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Investasi Daerah perlu terus mempromosikan potensi investasi, menciptakan kemudahan investasi, memperbaiki akses, menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan, menjamin kemudahan dan kepatian investasi. Pemda Keberadaan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) merupakan aspek yang menjadi perhatian penting para investor. Pemda juga perlu membuat terobosan untuk lebih menarik investasi masuk melalui insentif pajak atau tax holiday.

8. Pemerataan Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang Harmonis dengan Belanja DAK Fisik di Seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu Berdasarkan lokus Pemda, dari sebelas pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu, baru tiga pemerintah daerah yang terdapat belanja K/L harmonis dengan belanja DAK Fisik yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Perlu untuk meningkatkan upaya harmonisasi belanja dari tahap perencanaan anggaran di tingkat pusat. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) agar berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian negara/lembaga serta pemerintah daerah dalam upaya pengharmonisasian belanja KL di daerah terutama untuk daerah yang belum harmonis antara belanja K/L dengan belanja DAK Fisik, sehingga dapat dihasilkan sinergi fiskal yang saling menguatkan dan melengkapi antara alokasi DAK Fisik yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pemda dengan belanja K/L sehingga dapat dihasilkan output dan outcome yang maksimal dalam rangka peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi di daerah.



9. Rekomendasi Respon Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Perubahan Iklim pada Sektor Perekonomian (Agregat) Bengkulu sesuai Hasil Analisis SWOT

Dalam rangka peningkatan efektivitas dari program/kebijakan/belanja pemerintah dalam memitigasi dampak perubahan iklim perlu dilakukan langkah-langkah strategis sesuai dengan fenomena perubahan iklim dan sektor-sektor yang terdampak. Analisis rekomendasi menggunakan analisis SWOT, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
- 2) Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta meningkatkan kesadaran melalui kampanye dan edukasi.
- 3) Memperbaiki infrastruktur dan sistem penanggulangan bencana dengan mengintegrasikan aspek perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan.
- 4) Mengembangkan sektor ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti ekowisata, pertanian organik, dan energi terbarukan.
- 5) Meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 6) Sinergitas antara program belanja dan non belanja dalam rangka menghadapi dampak perubahan iklim perlu terus dilaksanakan dengan evaluasi dampak yang lebih terukur.

"Semua kekecewaan harus dialirkan menjadi energi positif untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih keras lagi, sehingga berbagai prestasi yang lebih baik dan lebih tinggi bisa diraih"

Sri Mulyani Indrawati



DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi OMSPAN, <https://spanint.kemenkeu.go.id>.

Aplikasi OMSPANTKD, <https://spanint.kemenkeu.go.id/tkd>.

Aplikasi MEBE, <https://ditpa.kemenkeu.go.id>.

Aplikasi SIKD, <https://sikd.kemenkeu.go.id>.

Aplikasi SIKP, <https://sikp.kemenkeu.go.id>.

Aplikasi SIMTRADA, <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada>.

Aplikasi Sintesa, <http://sintesa.kemenkeu.go.id/v3>.

Bappenas. (2019). Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Jakarta: Bappenas.

Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Bappenas.

Bappenas. (2021). Pembangunan Rendah Karbon yang Tangguh Iklim. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pembangunan-rendah-karbon-yang-tangguh-iklim/>.

BMKG. (2021). Sistem Peringatan Dini Iklim. Diakses dari <https://www.bmkg.go.id/iklim/sistem-peringatan-dini-iklim.bmkg>.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 48/08/17/Th. XXIII, 5 Agustus 2024 – PDRB Provinsi Bengkulu Triwulan II 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024 – Inflasi Provinsi Bengkulu Triwulan II 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 45/08/17/Th. XI, 1 Agustus 2024 – Ekspor Impor Provinsi Bengkulu Triwulan II 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 29/05/17/Th. XVI, 6 Mei 2024 – Tingkat Pengangguran Provinsi Bengkulu Februari 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024 – Tingkat Ketimpangan Pendapatan Provinsi Bengkulu Maret 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 75/12/17/Th. XV, 1 Desember 2023 – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu Tahun 2023.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024 – Profil Kemiskinan Provinsi Bengkulu Maret 2024.

Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Bengkulu Nomor 36/07/17/Th. XXVI, 1 Juli 2024 – Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Bengkulu Juni 2024.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb Bengkulu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPKD) triwulan IV-2023.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb Bengkulu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPKD) triwulan II-2023.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb Bengkulu, Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) triwulan IV-2023.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb Bengkulu, Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) triwulan IV-2023.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb Bengkulu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) triwulan IV-2023.

Buchanan, B. B., Gruissem, W., dan Jones, R.L. (2015). *Biochemistry and Molecular Biology of Plants* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Provinsi Bengkulu. (2024, 23 Mei). Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan di Provinsi Bengkulu. Diakses pada 30 Juli 2024, dari <https://bengkulu.bps.go.id/static/abie/2024/05/23/1757/panjang-jalan-menurut-tingkat-kewenangan-di-provinsi-bengkulu-2023.html>.

Hamdan, H., Fauzi, A., Rusli, M., & Rustiadi, E. (2019). A Study of the Smallholder Coffee Agroindustry Sustainability Condition Using the Life Cycle Assessment Approach in Bengkulu Province, Indonesia. *Journal of Ecological Engineering*. <https://doi.org/10.12911/22998993/108636>.

Hardiansyah, R., Putra, A. S., & Rahmawati, D. (2019). Analisis Dampak Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 5(2), 103-118.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Low Carbon Development: A Paradigm Shift Towards a Green Economy in Indonesia*. Jakarta: Bappenas.

Kementerian Pertanian. (2020). *Strategi Adaptasi Sektor Pertanian terhadap Perubahan Iklim*. Jakarta: Kementan.

KLHK. (2021). *Kerjasama Internasional Perubahan Iklim*. Diakses dari <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kerjasmaiklim/>.

Laporan ALCo Regional Bengkulu Realisasi April, Mei dan Juni 2024.

Malau, L. R. E., Rambe, K. R., Ulya, N. A., & Purba, A. G. (2023). The Impact Of Climate Change On Food Crop Production In Indonesia: *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 23 (1), 34-46. <https://doi.org/10.25181/jppt.v23i1.2418>.

Mardiyah, S., & Nurkholis, N. (2020). Evaluasi Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Perubahan Iklim. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 77-91.

Mulyasari, G., I., Waluyati, L., & Suryantini, A. (2020). Livelihood vulnerability to climate change of fishermen in the coastal area of Bengkulu province, Indonesia. *Aaci Bioflux*, 13, 1242-1254.

Nurdianto, A., & Munawar, M. (2018). Evaluasi Program Edukasi Perubahan Iklim di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 67-82.

OJK. (2021). Asuransi Mikro Berbasis Indeks Iklim. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Asuransi-Mikro-Berbasis-Indeks-Iklim.aspx>.

Pratiwi, D. A., Santoso, E. B., & Zulaikha, S. (2019). Efektivitas Anggaran Daerah dalam Program Mitigasi Perubahan Iklim: Studi Kasus di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 112-125.

Priyadarshan, P. M. (2011). *Biology of Hevea Rubber*. CABI.

Putri, A. R., & Kusuma, H. E. (2019). Evaluasi Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim di Kota Surabaya. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 7(1), 38-51.

Sadono, Sukirno. (1994). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sarvina, Y., June, T., Sutjahjo, S., Nurmalina, R., & Surmaini, E. (2023). Projection of Robusta Coffee's Climate Suitability for Sustainable Indonesian Coffee Production. *International Journal of Sustainable Development and Planning*. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180409>.

Sethuraj, M. R., & Mathew, N. M. (1992). *Natural Rubber: Biology, Cultivation and Technology*. Elsevier. Setiadi, R., & Pratiwi, F. D. (2016). Analisis Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim di Tingkat Daerah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 14(1), 39-48.

Setneg. (2023, 16 Agustus). *Upaya Membangun Harmonisasi Pemerintah Pusat dan Daerah*. Diakses pada 31 Juli 2024, dari <https://www.setneg.go.id/>.

Sulistiwati, N. M. D., Suharto, R. B., & Sulistio, H. (2021). Efektivitas Program Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Daerah: Studi Kasus Kota Denpasar. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 89-102.

DAFTAR PUSTAKA

Sumartono, E., Mulyasari, G., & Sukiyono, K. (2021). Assessment Model Impact of Climate Change on Potential Production for Food and Energy Needs for the Coastal Areas of Bengkulu, Indonesia. *Agro Bali: Agricultural Journal*. <https://doi.org/10.37637/AB.V4i2.714>.

Susanto, Eddy. (2024, 24 Juli). Press Release Realisasi Semester I Apbn 2024: Responsif Terhadap Dinamika Perekonomian Antisipatif Terhadap Berbagai Tantangan, Dan Suportif Terhadap Agenda Pembangunan Nasional. Diakses pada 28 Juli 2024, dari <https://www.djkn.kemendek.go.id/kanwil-lampung-bengkulu/baca-berita/36125/SIARAN-PERS-KEMENTERIAN-KEUANGAN-NOMOR-SP-30KLI2024.html>. Taiz, L., & Zeiger, E. (2010). *Plant Physiology* (5th ed.). Sinauer Associates Inc.

UNDP Indonesia. (2020). *The Economic, Social and Environmental Impacts of Climate Change in Indonesia*. Jakarta: UNDP.

Wibowo, A., & Ginanjar, A. (2020). Efektivitas Kampanye Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Perubahan Iklim. *Jurnal Komunikasi Lingkungan*, 4(1), 15-30.

Wijaya, A., Chrysolite, H., Ge, M., Wibowo, C. K., Pradana, A., Utami, A. F., & Austin, K. (2017). How can Indonesia achieve its climate change mitigation goal? An analysis of potential emissions reductions from energy and land-use policies. *World Resources Institute Indonesia*.



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

 Jl. Adam Malik (d.h. Jl P Natadirja no.27)
Km. 8 Kota Bengkulu 38225

 Telp : 0736 - 345237, 343081

 Fax : 0736 - 345311

 email : djpbm.bengkulu@gmail.com

www.djpbm.kemenkeu.go.id/kanwil/bengkulu

KANWIL DIJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI BENGKULU